

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

FAKHRI ABDULLATIEF

NIM. 530004018

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



Human Resource Development Strategy in the Management of Village-Owned Enterprises in the District of Pamboang.

Fakhri Abdullatief
(fakhri.abdullatief.s.sos@gmail.com)
Open University Postgraduate Program

Abstract

Limitations on the Capacity of HR Managers in a number of BUMDes in Kec. Pamboang Kab. Majene resulted in the management not running optimally, especially in terms of HR development.

Purpose of this research is to analyze the HR Development Strategy in BUMDes Management.

SWOT analysis is used to find indicators of strategy for developing HR and Management of BUMDes.

Results of the study concluded that SO Strategy: Uses equity investment, facilities, and infrastructure to empower high school and graduate graduates to work on marine and agricultural potentials, develop knowledge, abilities and skills in local village human resources, hire a professional manager to develop and foster management BUMDes, Utilizing the potential of the sub-district and district markets. WO Strategy: Utilizing existing Village Local Human Resources, Increasing the capacity of managers by working while learning, Increasing community participation by empowering citizens to take advantage of the potential of the marine and agricultural markets. ST Strategy: Maximizing the use of existing investment capital, facilities, infrastructure, empowering Local Village Human Resources, high school graduates and Bachelor's degree to: Manage savings and loan units and molen rentals; employ Village Local HR in BUMDes business units; Add business units in accordance with the local potential of village communities by continuing to develop the issue of terminating the Village Fund subsidy from the Central Government; Increase the intensity of BUMDes management by utilizing the Political Situation and Conditions in the Village. WT Strategy: Utilizing the limitations of Local Village Human Resources to always be given guidance and empowered according to their abilities.

Keywords: SWOT, HR Development, BUMDes Management.

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang.

Fakhri Abdullatief
(fakhri.abdullatief.s.sos@gmail.com)
Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Abstrak

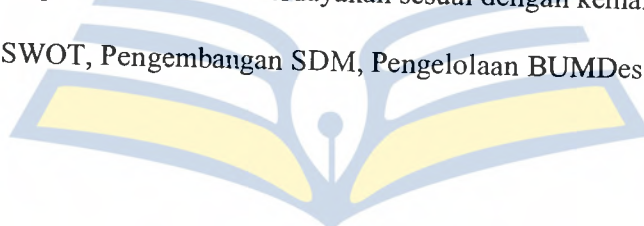
Keterbatasan Kapasitas SDM Pengelola sejumlah BUMDes di Kec. Pamboang Kab. Majene mengakibatkan pengelolaan tidak berjalan maksimal terutama dari sisi pengembangan SDM.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menganalisis Strategi Pengembangan SDM dalam Pengelolaan BUMDes.

Analisis SWOT digunakan untuk menemukan indikator strategi pengembangan SDM dan Pengelolaan BUMDes.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategi SO : Menggunakan modal penyertaan, Fasilitas, Prasarana yang ada untuk memberdayakan SDM tamatan SMA dan Sarjana menggarap potensi laut dan pertanian, Mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM lokal desa, Menyewa seorang Manajer professional dalam mengembangkan dan membina pengelolaan BUMDes, Memanfaatkan potensi pasar kecamatan dan kabupaten. Strategi WO : Memanfaatkan SDM Lokal Desa yang ada, Meningkatkan kapasitas pengelola dengan bekerja sambil belajar, Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan warga untuk memanfaatkan potensi pasar hasil laut dan pertanian. Strategi ST : Memaksimalkan penggunaan modal penyertaan, fasilitas, sarana, prasarana yang ada, memberdayakan SDM Lokal Desa, tamatan SMA dan Sarjana untuk : Mengelola unit usaha simpan pinjam dan penyewaan molen; mempekerjakan SDM Lokal Desa pada unit-unit usaha BUMDes; Menambah unit usaha sesuai dengan potensi lokal masyarakat desa dengan tetap mengembangkan issue pemberhentian subsidi Dana Desa dari Pemerintah Pusat; Meningkatkan intensitas pengelolaan BUMDes dengan memanfaatkan Situasi dan Kondisi Politik Desa. Strategi WT : Memanfaatkan keterbatasan SDM Lokal Desa untuk selalu diberikan pembinaan dan diberdayakan sesuai dengan kemampuannya.

Kata Kunci : SWOT, Pengembangan SDM, Pengelolaan BUMDes.



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Penyusun : Fakhri Abdullatief

TAPM

NIM : 530004018

Program Studi : Magister Management Sumber Daya Manusia

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II

Dr. Amri Darwis, MM.
NIP.

Pembimbing I

Dr. Hamka Hakim, M.Si.
NIP.

Penguji Ahli

Dr. Amir Tengku Ramly, SP., M.Si.
NIDN. 0407077005.

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis

Dekan Fakultas Ekonomi

Amalia Kusuma Wardini, SE., M.Com.
NIP. 197009182005012001

Dr. Ali Muktiyanto, SE., M.Si.
NIP. 197208242000121001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

PENGESAHAN

Nama : Fakhri Abdullatief
 NIM : 530004018
 Program Studi : Magister Manajemen Sumber Daya Manusia
 Judul TAPM : Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 6 September 2019

W a k t u : 13.15 Wita

Dan Telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji

Nama : Drs. Arifin Tahir, S.Pd., M.Pd.

Penguji Ahli

Nama : Dr. Amir Tengku Ramly, SP., M.Si.

Pembimbing I

Nama : Dr. H. Hamka Hakim, M.Si.

Pembimbing II

Nama : Dr. Amri Darwis, MM.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M.) dalam bidang keahlian Sumber Daya Manusia pada Program Studi Pascasarjana Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka dengan sumber dana berasal dari dana pribadi penulis.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, kepada :

1. Bapak DR. H. Hamka Hakim, M.Si., atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan.
2. Bapak DR. Amri Darwis, MM., yang telah membimbing penulis melalui aplikasi whatsapp karena beliau berada jauh di Jakarta.
3. Bapak DR. Tengku Amir Ramly, SP., M.Si., yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal tesis.
4. Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka.
5. Seluruh Dosen program Pascasarja Magister Manajemen Universitas Terbuka yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Manajemen SDM.
6. Ketua UPBJJ-UT Majene Drs. H. Arifin Tahir, S.Pd., M.Pd. beserta staf pengurus.
7. Almarhum dan Almarhumah Ayahanda Abdullatief Muhayyong dan Ibunda Sitti Rabiyyah Baedjuri Latif, yang telah membesarkanku dan memberikan didikan dan pendidikan terbaik kepada Penulis.
8. Mertuaku H. Sudarmi Mustajab dan Hj. Hadawiah Husain, beserta keluarga besar di Pamboang Majene yang sangat mendukung pendidikan dan pekerjaan Penulis.
9. Adik kandung Penulis satu-satunya Takdir Abdullatief beserta keluarga kecilnya di Kota Makassar yang selalu memberikan support dalam penulisan.
10. Istriku Wahda Sudarmi, S.Ag., kedua Anak-anakku Gadies Saqina Fakhri dan Hafiedz Achmad Fakhri yang telah mendukung segala aktivitas pekerjaan dan pendidikanku.
11. Keluarga Besar Kakek Puang Buyung dan Nenek Halapang di manapun berada.
12. Rekan-rekan S-2 Program Studi Pascasarjana Manajemen SDM angkatan 2017.2. Semoga Allah SWT, memberkati jalan kita semua. Aamiin.
13. Rektor dan semua Civitas akademika Universitas Terbuka.
14. Rekan-rekan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terkhusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian studi.

15. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa TAPM/Tesis ini masih banyak kekurangan dan diharapkan ada pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar TAPM/Tesis ini dapat lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap TAPM/Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Majene, September 2019

Fakhri Abdullatief



RIWAYAT HIDUP

- Nama : Fakhri Abdullatief
 NIM : 530004018
 Program Studi : Magister Manajemen
 Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Mei 1975
 Riwayat Pendidikan : - Lulus dari SD Mongisidi II Makassar pada Tahun 1986.
 - Lulus dari SMP Negeri 3 Makassar pada Tahun 1989.
 - Lulus dari SMA Negeri 14 Makassar pada Tahun 1993.
 - Lulus dari Program D3 Kesekretariatan Universitas Hasanuddin pada Tahun 1998.
 - Lulus dari Program S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin pada Tahun 2003.
- Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2006 s/d 2007 sebagai Staf Pengelola Bimbingan Belajar di Multi Prima College Makassar.
 - Tahun 2007 s/d 2008 sebagai Staf Pengelola Koperasi Multi Niaga di Makassar.
 - Tahun 2008 s/d 2009 sebagai Debt Collector Khusus PNS pada Koperasi Multi Niaga di Makassar.
 - Tahun 2010 terangkat sebagai CPNS pada Pemerintah Kabupaten Majene.
 - Tahun 2010 s/d 2015 sebagai PNS di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene sebagai staf Bidang Pemberdayaan Media Telekomunikasi dan Informatika.
 - Tahun 2011 s/d Sekarang sebagai Tenaga Tutorial Ilmu-Ilmu Sosial di UPBJJ UT Majene.
 - Tahun 2015 s/d 2018 sebagai Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
 - Tahun 2018 s/d Sekarang sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene.

Majene, 20 Februari 2019

Fakhri Abdullatief
 NIM. 530004018

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan, Tabel dan Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Berpikir	32
D. Operasionalisasi Konsep	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	36
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	37
C. Instrumen Penelitian	38
D. Prosedur Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	46
B. Hasil	72
C. Pembahasan	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR BAGAN dan TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun ekonomi daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional dimana Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang akan disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha milik desa atau disebut dengan BUMDes. BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas Badan Usaha Milik Desa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama.

Berbagai program Pemerintah untuk pengembangan ekonomi di perdesaan antara lain Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), serta Program UPK-PKP-PKK sudah digulirkan untuk memperkuat perekonomian di desa, namun hasilnya belum memuaskan. Faktor penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola, dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan.

Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah. BUMDes, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Kinerja setiap kegiatan individu merupakan kunci pencapaian produktivitas. Sebab kinerja adalah suatu hasil dimana orang-orang sumber daya lain yang ada dalam organisasi secara bersama sama membawa hasil akhir yang didasarkan pada tingkat mutu standar yang telah ditetapkan. Konsekuensinya adalah organisasi memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik sesuai dengan visi dan misi organisasi.

SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pengembangan SDM adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan SDM melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal.

Salah satu cara untuk mengembangkan SDM dalam perusahaan, yaitu dengan meningkatkan kompetensi karyawan pada perusahaan. SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Pengembangan adalah suatu proses aktif untuk merubah suatu keadaan ke keadaan yang lain yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan suatu keadaan mungkin berhubungan dengan manusia (pegawai) atau pun organisasi. SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya insani dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting.

Salah satu tantangan peningkatan kinerja BUMDes khususnya pada Desa-desa yang berada di Wilayah Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat adalah keterbatasan kapasitas SDM yang mengelola

BUMDes, problem SDM yang terjadi bukan pada kapasitas personal pengurus BUMDes, karena sebagian dari pengurus BUMDes tersebut merupakan lulusan sarjana. Namun, lebih pada kemampuan mengelola unit usaha serta pembuatan laporan keuangan. Solusinya bisa dengan menggelar peningkatan kapasitas pengelolaan, melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu tantangan dari BUMDes adalah kesulitan mendapatkan SDM untuk membangun unit usaha BUMDes. Padahal sebagai lembaga usaha BUMDes sangat membutuhkan SDM utamanya anak-anak muda untuk menjalankan bisnis. Sebagian anak muda belum tertarik karena belum melihat potensi BUMDes sebagai aktivitas yang bisa menopang kebutuhan ekonomi mereka.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDesa. Pembentukan BUMDesa ini merupakan tindak lanjut ketentuan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa merupakan program nasional yang diberikan amanat kepada pemerintah Desa yang masih tergolong baru. Hingga saat ini, masih banyak desa yang dibuat bingung dalam merumuskan aset dan potensi yang mereka miliki. Pertama adalah banyak desa dalam wilayah berdekatan memiliki potensi yang hampir sama bahkan benar-benar sama. Kedua, keterbatasan SDM yang terjadi pada wilayah-wilayah desa di luar pulau Jawa.

Sumber : (www.berdesa.com/ Pedoman Teknis BUMDESA Bersama Oleh Kemendesa, Tanggal 5 Juli 2017, didownload pada 2 September 2018 oleh Penulis). Lebih lanjut diinformasikan oleh media tersebut, kekuatan "*market linkage*" adalah salah satu kunci menuju BUM Desa yang berhasil. "*Market Linkage*" jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keterkaitan pasar yang merupakan fasilitas hubungan perdagangan antara populasi target, produsen kecil, perusahaan lokal dan koperasi, serta pasar eksternal. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kunci sukses BUMDes dalam operasionalisasinya adalah dengan menggunakan "*Market Linkage*" atau Jaringan Sosial. Saat ini diketahui banyak asosiasi perdagangan, koperasi, kemitraan sektor swasta, dan program pengembangan bisnis menggunakan model "*Market Linkage*" ini.

Disadari atau tidak, situasi desa antara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan kearifan lokal tersendiri berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Tradisi yang hidup dan berkembang pada wilayah pedesaan, juga perlu dijadikan aspek pendukung dalam menganalisis rumusan strategi pengembangan SDM pada pengelolaan BUMDes. Cara pandang masyarakat desa terhadap BUMDes cenderung dianggap sebagai dana bantuan dari pemerintah yang bersifat hibah. Keterbatasan cara berfikir ini merupakan salah satu kendala yang mesti segera diatasi oleh pemerintah, seperti misalnya gencar memberikan sosialisasi mengenai apa maksud dan tujuan BUMDes diadakan, meski kegiatan ini membutuhkan proses yang cukup lama.

Sehubungan dengan pengembangan SDM BUMDes, strategi umum yang cenderung dilakukan oleh Pengelola BUM Desa adalah Belajar ke Desa lain atau bekerjasama dengan BUM Desa lain, karena disamping

memungkinkan terjalinnya kerjasama yang lebih baik dan efisien, juga ditengarai leluasa membangun jaringan usaha termasuk perluasan pasar. Meski strategi tersebut di atas, kerap menjadi salah satu sikap BUMDes dalam usaha pengembangannya, namun tetap saja badan usaha bentukan desa hingga saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pendapatan asli desa. Seperti dikutip dari sumber Surat Kabar Radar Sulbar, Majene – dengan Judul Telan Rp. 3,5 M Keuntungan Minim. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 62 Desa se-Majene, belum bisa memberi kontribusi pendapatan yang berarti. Tersirat ada proses pengelolaan yang keliru dalam penetapan rencana strategis pengembangan BUMDes, yang perlu segera dicarikan solusi dan dibenahi berdasarkan kearifan lokal masing-masing desa.

Setiap BUMDes berdasarkan regulasi pembentukannya minimal harus memiliki Nama BUMDes, Struktur Pengelola yang terdiri dari Penasehat (Kepala Desa), Pelaksana Operasional yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan Pengawas yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota. Lalu memiliki Unit Usaha yang ditandai dengan adanya Nomor Rekening, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Alamat untuk kegiatan surat menyurat. Pada observasi awal, kelengkapan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh BUMDes yang beroperasi di Kabupaten Majene.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene yang bertugas memonitoring pelaksanaan Badan Usaha

Milik Desa di Kabupaten Majene bahwa terdapat 62 Desa yang wajib memiliki BUMDes tersebar ke dalam 8 (delapan) Kecamatan, dan khusus untuk kecamatan Pamboang terdapat 13 (tiga belas) BUMDes.

Dari beberapa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BUM Desa tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa pengelolaan BUMDes di Kabupaten Majene belum dikelola dengan maksimal terutama dari sisi pengembangan SDM yang merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi, agar pengetahuan (*Knowledge*), kemampuan (*Ability*), dan keterampilan (*Skill*) yang dimiliki sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan.

Keberhasilan manajemen SDM tergantung pada tercapainya kinerja dari fungsi manajerial dan operasionalnya. Oleh sebab itu, manajemen SDM di BUMDes harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Directing*), dan pengendalian (*Controlling*) secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian teoritis, proposisi dan studi empirik serta fakta dan permasalahan yang terjadi di atas sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi pengembangan SDM dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Wilayah Kecamatan Pamboang merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Pamboang berada di daerah pinggiran pantai dengan ketinggian antara 1-50 meter di atas permukaan air laut, beriklim tropis dengan curah

hujan rata-rata 800-1200 mm/tahun, mempunyai luas wilayah 70,19 km². Adapun jarak antara kantor pemerintahan Kecamatan Pamboang dengan desa terjauh berkisar ± 9 km, Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Majene adalah ± 15 km., dan Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat adalah ± 129 km. Akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Pamboang dengan kecamatan lainnya dan antar desa sudah cukup memadai.

Kecamatan Pamboang terdiri dari 2 kelurahan dan 13 desa, masing-masing desa telah mendirikan BUM Desa. Beberapa desa diantaranya dipilih oleh penulis berdasarkan karakteristik yang berbeda yaitu Desa yang terletak di Wilayah Pegunungan, Desa yang terletak di Wilayah Pesisir Pantai, serta Desa yang terletak di antara pegunungan dan pesisir pantai. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, maka penulis memilih BUM Desa Al Baroqah Desa Adolang Dhua yang terletak di wilayah pegunungan, BUM Desa Marendeng Desa Bonde Utara yang berada wilayah pesisir pantai dan berbatasan dengan Kecamatan Banggae, BUMDes Sulo Pammase Desa Pesuloang yang juga berada di wilayah pesisir pantai, serta BUM Desa Dalle' Passiolaolang yang wilayahnya terdapat pasar Kecamatan Pamboang.

Pada observasi awal, terdapat beberapa Desa di Kecamatan Pamboang baru mendirikan Lembaga BUMDesa-nya. Ada juga yang sudah terbentuk, namun belum dijalankan. Ada yang sudah terbentuk dan penyertaan modal sudah diberikan, namun belum jalan juga. Kondisi inilah yang membuat Penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa, sehingga muncul permasalahan-permasalahan di atas,

Oleh karena itu penulis berusaha meramu dan menganalisis permasalahan yang mengemuka dalam urusan Badan Usaha Milik Desa ini, sehingga mengambil judul "*Strategi Pengembangan SDM Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang.
2. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

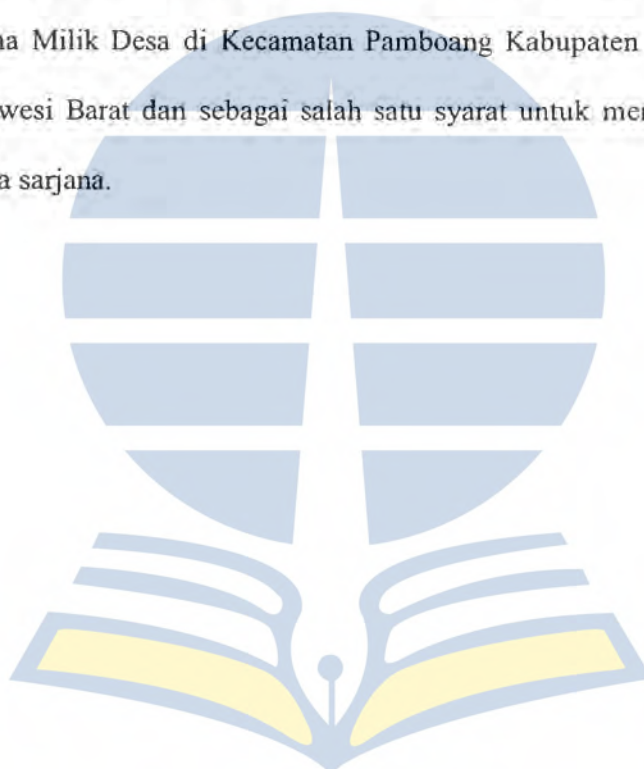
D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan dapat di peroleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan bukti empiris khususnya mengenai manajemen SDM, yang berkaitan dengan strategi pengembangan SDM1 dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam menganalisis progress perkembangan Badan Usaha Milik Desa yang berada di bawah naungan Pemerintahan Desa khusus di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, untuk dapat lebih meningkatkan kemampuannya hingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Untuk peneliti, menambah wawasan keilmuan tentang manajemen SDM, khususnya tentang strategi pengembangan SDM dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pasca sarjana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.

Dalam penelitian ini, terdapat teori-teori pendukung penelitian tentang Strategi Pengembangan SDM dalam Pengelolaan BUMDES. Landasan teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Menurut Grant dalam Manajemen Strategik, Agus Maulana (2015 : 1.4), yang membedakan strategi dari taktik.

“ Strategi adalah rencana yang bersifat menyeluruh menyangkut penerahan sumber daya untuk meraih posisi yang menguntungkan. Sedangkan taktik adalah skema untuk suatu tindakan tertentu”.

Pada teori Grant di atas, terdapat tiga unsur atau aspek yang dapat menjadi indikator dalam menganalisis strategi organisasi, yaitu : aspek rencana yang bersifat menyeluruh, aspek penerahan sumber daya, dan aspek meraih posisi yang menguntungkan.

a. Faktor Rencana yang bersifat menyeluruh.

faktor ini menganalisis rencana besar atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, yang kemudian diurai menjadi rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dari rencana-rencana tersebut di atas, tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai standar ukuran keberhasilan. Dari sinilah analisis strategi dimulai untuk dikembangkan.

b. Faktor Pengerahan sumber daya

Faktor ini merupakan pengembangan dari faktor rencana di atas. Analisa sumber daya yang akan digunakan dalam mendukung perencanaan. Seberapa besar sarana prasarana yang akan dikerahkan dalam mendukung rencana, dan seberapa besar sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung rencana. Semua diuraikan pemanfaatannya dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

c. Faktor Meraih posisi yang menguntungkan.

Lalu faktor ketiga ini merupakan langkah berikutnya yang masih terus dievaluasi. Sebab faktor ini adalah target strategi yang merupakan posisi aman pertama yang harus dilalui oleh sebuah organisasi.

Masih dalam buku yang sama, Grant dan Pearce dan Robinson, mengatakan bahwa keputusan strategik memiliki enam karakteristik utama, yaitu :

- 1) *Penting bagi keseluruhan organisasi sehingga memerlukan keputusan di tingkat manajemen puncak.*
- 2) *Menuntut komitmen sumber daya yang relatif besar.*
- 3) *Mempunyai dampak besar terhadap kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang.*
- 4) *Berorientasi ke masa depan yang cukup jauh.*
- 5) *Mempunyai dampak lintas fungsional atau lintas-bisnis.*
- 6) *Menuntut organisasi untuk mempertimbangkan pengaruh dari faktor-faktor luar organisasi.*

Beberapa karakteristik utama di atas, merupakan indikator-indikator yang mampu mendukung berjalannya strategi. Tidak dapat dipungkiri, sebuah strategi yang tepat merupakan langkah awal yang tercermin dari langkah strategi sebelumnya. Karena strategi dibuat untuk

memenangkan sebuah pertempuran, situasi dan kondisi arena perlu dikuasai, sehingga perlu analisa yang sistematis dalam pengukurannya.

2. Pengembangan SDM

Menurut Kurniawati dalam Pengembangan SDM (2015: 1.30) menuliskan bahwa Pengembangan SDM ini penting searah dengan pengembangan perusahaan. Pada halaman lainnya, Kurniawati mengatakan bahwa pengembangan SDM adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang optimal. Namun pada dasarnya, Kurniawati mengakui bahwa Pengembangan SDM merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah karyawan guna meningkatkan produktivitas organisasi sekaligus mempersiapkan karyawan untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan SDM tidak dilakukan hanya sekali, bahkan berkali-kali. Menjadi sebuah program yang berkelanjutan dan bersifat berjenjang.

Dalam beberapa pandangan tersebut di atas, nampak beberapa unsur atau karakteristik yang dapat ditarik dari konsep pengembangan SDM, yaitu : Pengembangan SDM merupakan upaya terencana dari organisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM, dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang, dilakukan untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan jabatan, ditujukan terhadap peningkatan kinerja individu yang bermuara pada kinerja organisasi.

3. Peran SDM dalam Manajemen Kinerja

Manajemen Kinerja diperlukan bukan hanya untuk menilai kinerja tetapi juga bagaimana mengembangkan kinerja seluruh karyawan yang ada melalui tahapan manajemen kinerja yang sistematis. Organisasi yang telah melakukan manajemen kinerja dianggap telah menyadari bahwa keterlibatan sumber daya manusia sangat berarti dalam pencapaian tujuan organisasi. Sehingga manajemen kinerja diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong sumber daya manusia agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif serta sesuai dengan proses kerja yang benar sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Menurut Achmad Sobirin (2015) keterlibatan karyawan dalam manajemen kinerja mulai dari tahap perencanaan, kesepakatan kinerja (kontrak kerja), tindak lanjut dan pengembangan. Pada tahap monitoring dan umpan balik membutuhkan sikap saling terbuka, jujur dan saling berkomunikasi antara atasan dan bawahan sepanjang tahun. Pada tahap review dan umpan balik, atasan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mendiskusikan hasil dan tindak lanjut evaluasi kinerja.

Manfaat Manajemen kinerja akan dirasakan oleh karyawan karena manajemen kinerja membimbing karyawan untuk mencapai tujuan pribadinya sendiri dalam bekerja. Karena pada dasarnya, setiap individu yang memutuskan bergabung pada suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk memperoleh kepuasan kerja, ingin berkembang dalam karirnya, memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, berprestasi yang layak dan hidup yang berkecukupan.

4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Kedudukan BUMDesa dipandang dari perspektif hukum administrasi menegaskan kedudukannya dalam konteks hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :

1. Sumber wewenang
 - a. BUM Desa termasuk kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan secara atribusi (pasal 19 huruf b jo. Pasal 72 ayat (1) beserta penjelasan UU Desa);

- b. Kepala desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa setelah disepakati melalui Musyawarah Desa merupakan wewenang atribusi yang ditetapkan oleh UU Desa. Wewenang atribusi adalah (a) wewenang yang ada pada jabatan; (b) diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.
2. Asas umum prosedur yang bertumpu pada 3 (tiga) landasan utama hukum administrasi, yaitu :
 - a. Asas Negara Hukum Dalam Prosedur, berkaitan dengan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga Desa dalam mendirikan badan usaha yang bercirikan desa;
 - b. Asas Demokrasi Dalam Prosedur, berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa;
 - c. Asas Instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*; daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*; hasil guna) pengelolaan unit-unit usaha BUM Desa untuk kemakmuran warga Desa.

BUMDesa skala lokal cukup dibentuk dan didirikan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Norma kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibatasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang mendorong perkembangan BUMDesa, misalnya tentang hibah dan/atau akses permodalan; pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Ketika BUMDesa ditetapkan pendiriannya,

disahkan pula Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa oleh Peraturan Desa Pendirian BUM Desa tersebut. Sesuai ketentuan pasal 136 ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 dan Pasal 5 Permendes No. 4 Tahun 2015, AD/ART cukup dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. AD/ART dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP. No. 43 Tahun 2014. Idealnya, secara hukum prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang didasari oleh Peraturan Desa pendirian BUM Desa.

Dalam skala Kabupaten, kelembagaan BUMDesa diatur dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Kabupaten Majene telah mengatur regulasinya dalam Peraturan Bupati Majene No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Mengenai pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Ada 5 (lima) point tujuan pembentukan BUMDesa menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 , yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa, dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. Menciptakan lapangan kerja; dan
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.

Adapula sasaran BUM Desa seperti termaktub dalam pasal (4) Permendesa No. 4 Tahun 2015, yaitu :

- a. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat memiliki peran ganda, yaitu

1. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata investasi yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat pada modal; dan

2. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDes berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015, dituntut untuk :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha mikro di Desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Sehingga usaha mikro di Desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan;
- b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Secara umum, prinsip dasar dalam pembentukan BUMDes berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015 adalah :

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat ;
- b. Keberagaman usaha masyarakat dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;

- c. Partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa; dan
- d. Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) klasifikasi sebagai berikut:

a. **Bisnis Sosial**

Jenis usaha bisnis sosial dalam Badan Usaha Milik Desa yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.

b. **Bisnis Uang**

Badan Usaha Milik Desa menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank bank konvensional. Seperti koperasi simpan pinjam desa yang dikelola oleh warga desa setempat yang sudah mendapatkan peraturan bagaimana cara mengelola koperasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan.

c. **Bisnis Penyewaan**

Badan Usaha Milik Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Seperti menyewakan peralatan untuk keperluan sawah (traktor dan sebagainya). Dengan begitu peralatan yang disewakan dapat digunakan oleh masyarakat desa, kemudian uang sewa akan masuk dalam kas.

d. Lembaga Perantara

Badan Usaha Milik Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

e. Trading atau perdagangan

BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Dengan memproduksi makanan jadi, produk dll. Maka desa akan mendapat pemasukan dari berbagai sektor. Jika produk yang dihasilkan dapat diterima di skala pasar yang lebih besar, maka pemasukan yang didapatkan akan semakin besar juga. Apalagi jika kualitas produk sangat baik maka akan mendapat keuntungan secara intens.

f. Usaha Bersama

Badan Usaha Milik Desa sebagai “usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang

berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh Badan Usaha Milik Desa agar tumbuh usaha bersama.

Dasar Hukum dari Badan Usaha Milik Desa adalah UU No.32 Tahun 2004 (Pasal 213), penjelasan adalah sebagai berikut:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa ;
- b. Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang undangan ;
- c. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang undangan ;

Tujuan Pendirian badan Usaha Milik Desa berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber pendapatan desa ;
- b. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat ;
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran di pedesaan ;
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa ;
- e. Mengurangi kemiskinan.

Landasan Kelembagaan dari BUMDes menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ;

- b. Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal ;
- c. Sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat dan otonomi asli Desa.

Pembentukan BUMDes berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan daerah,
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan menteri.
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada berbagai literatur yang mendukung sebagai acuan untuk menegaskan dan menguatkan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Selain menggunakan buku dan jurnal dari internet, peneliti juga merujuk dari berbagai penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam memperkuat teori dalam penelitian ini yaitu :

1. Hevi Prima Yunita, (2018), dengan judul "Analisis Strategi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja karyawan di BMT Pahlawan Tulungagung". Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BMT Pahlawan Tulungagung ? (2) Apa saja kendala yang dihadapi BMT Pahlawan Tulungagung dalam strategi

pengembangan SDM berbasis kompetensi ? (3) Bagaimana solusi dalam strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi di BMT Pahlawan Tulungagung. Metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif, lokasinya di BMT Pahlawan Kabupaten Tulungagung, sumber datanya informan dan dokumen, data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data yang di peroleh direduksi dan dianalisis kemudian disajikan, sedangkan teknik pengecekan keabsahan datanya dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi dalam meningkatkan kinerja karyawan di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung dengan cara memberikan motivasi secara langsung dan tidak langsung oleh manager, serta melalui metode pengembangan yaitu pendidikan, pelatihan, pengembangan karir yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan kinerja karyawan.

2. Kateria Fitriska (2018), dengan judul "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proses manajemen strategi yang dikemukakan oleh

Hunger & Wheleen (2003:9), yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi strategi dan evaluasi/pengendalian strategi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik penelitian deskriptif. Informan dari penelitian ini berjumlah 10 orang. Lokasi penelitian adalah di Desa Lancang Kuning Kecamatan Binan Utara. Adapun Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat belum berjalan maksimal. Pada pengamatan lingkungan sudah mendukung untuk berjalannya BUMDes. Pada formulasi strategi juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada implementasi strategi pengelola BUMDes belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan evaluasi/pengendalian strategi masyarakat meminta pengelola BUMDes untuk mensosialisasikan misi serta strategi dari BUMDes Jaya Gemilang.

3. Fadhil (Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Aceh, M. Syamsul Maarif dan Aji Hermawan (Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor), Tajuddin Bantacut (Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor). *Jurnal Manajemen Teknologi*, 16(2), Tahun 2017, 141-156. Available online at <http://journal.sbm.itb.ac.id>. Judul : Model Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Agroindustri Kopi Gayo dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean. Tujuan Penelitian ini adalah untuk merumuskan model strategi pengembangan sumber daya manusia

(SDM) agroindustri kopi Gayo dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Penelitian ini menghasilkan permodelan konseptual Strategi Pengembangan SDM para pemangku kepentingan (stakeholder) agroindustri dengan meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan agroindustri kopi Gayo. Strategi pengembangan SDM agroindustri kopi Gayo merupakan tindakan strategis untuk melahirkan kompetensi dan kualitas pelaku agroindustri dengan daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan global dan persaingan dalam kawasan MEA melalui berbagai program pengembangan kapasitas SDM. Investasi SDM merupakan sebuah investasi intelektual yang memiliki arti penting bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan produksi agroindustri kopi Gayo.

4. Asrudi, (2017). Judul Jurnal : Analisis Pengembangan SDM dalam Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tenggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pendidikan dan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tenggamus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan Trianggulasi. Penulis menggunakan teori Hasibuan tentang pengembangan sumber daya manusia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa proses pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia pada BUMDes di Kabupaten Tenggamas pada umumnya masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari 25 jumlah total BUMDes yang ada di Kabupaten Tenggamas hanya tiga BUMDes yang baru berjalan dan dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Tenggamas, tidak semua Kecamatan memiliki BUMDes.

5. Najmatun Nahdhah (2017). Judul : Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Kasus di PP Hidayatullah Balikpapan). Tesis Magister Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I. (2). H. Aunur Rafiq, M.Ag.,P.hd. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan strategi pengembangan SDM dalam meningkatkan keunggulan kompetitif yang dilakukan oleh PP Hidayatullah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data melalui uji kredibilitas (validitas internal) dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi : transferability (validitas eksternal), Dependability (reliabilitas) dan confirmability (objektivitas). Penelitian ini menemukan bahwa : (1) Proses pengembangan SDM di PP Hidayatullah Balikpapan terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Pelaksanaan menggunakan strategi pengkaderan, strategi pengembangan

kompetensi professional, dan strategi pengembangan karier. Ketiga strategi ini ditempuh untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar sumber daya manusia yang telah ditetapkan. (2). Tantangan pengembangan SDM ada 2 (dua) yaitu internal dan eksternal. (3). Implikasi pengembangan SDM antara lain memiliki SDM unggul dan kompetitif, memiliki perencanaan pengembangan SDM, dapat menganalisis kebutuhan pengembangan SDM, dan meningkatkan daya saing lembaga.

6. Handaru Tampiko dari Institut Teknologi Indonesia (Tahun 2014). Judul : Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Industri Kakao di Sumatera Barat. Sebagai Negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia, Indonesia masih banyak mempunyai kelemahan untuk membangun industry kakaonya, antara lain sumber daya manusia dan kelembagaan. Kedua faktor ini menyebabkan industry kakao tidak mampu bersaing di pasar global sehingga perkembangan industry tidak maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan analisis strategi dan metode AHP (Analisis Hierarki Proses) diharapkan dapat membentuk identifikasi masalah yang lebih tajam serta alternatif solusi yang terbaik dalam meningkatkan kemampuan bersaing industry kakao di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Kajian ini memperlihatkan upaya meningkatkan pemberdayaan koperasi agribisnis, terutama pengembangan diri manajer dalam bekerja efektif dan berpikir strategis sehingga

kebijakan pada perbaikan sistem manajemen dan organisasi merupakan prioritas utama.

7. Ketut Sumantra, Kadek Suryani, I Wayan Widnyana, Carmen C. Manes, IB. Putra Sutrisna, Oktarina, Rai Sukmawati Dana. Tahun 2019. Title : SWOT Analysis of Village Owned Enterprises (BUMDES) Trading Bussiness of “Ayu Bagia” Goods in Baha Village – Kecamatan Mengwi Badung District –Bali. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and be formed based on the needs and potential of the village. As one of the economic institutions operating in rural areas, BUMDes must have differences with economic institutions in general. Excavation of potentials and problems in Baha Sub-District / Mengwi Village, Badung Regency - Bali, namely by reviewing Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats for plans to develop BUMDes or strengthen the role of BUMDes in Baha Village , Mengwi-Badung. The SWOT analysis was conducted to examine the concept of the Baha-Mengwi-Badung Village-Owned Enterprise in charge of existing asset and economic management. This writing refers to Regulation of the Minister of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration number 4 of 2015 concerning BUMDes, which illustrates the concept of managing BUMDes by exploring and maximizing the potential of existing villages. The SWOT analysis carried out on BUMDes in Baha Village, Mengwi Subdistrict, Badung Regency, was carried out by collecting data on the analysis of the internal environment (HR, marketing

and distribution, financial statements, production and operational management, research and development) and external environmental analysis (government regulation / village, industry, general environment, community). The results of the SWOT analysis obtained are located in quadrant I, with a strategy to support aggressive growth policies. This is very beneficial for BUMDes in Baha Village, which have opportunities and strength, so they can take advantage of the opportunities available.

8. Didi Sundiman Management Department, Universitas Universal Kompleks Maha Vihara Duta Maitreya, Sungai Panas, Batam 29456, Indonesia Tahun 2017. Title : Human Resource Management in The Enhancement Processes of Knowledge Management. This research explored Human Resource Management (HRM) in enhancement processes of knowledge management. This research explored how HRM practice enhanced the operational of knowledge management. Data were collected by a survey by interviewing 12 informants from Small and Medium Enterprise (SME). The results show that HRM practice gives initiative in the enhancement process of the knowledge management strategy applied to the company. It can be concluded that each sub-component of HRM affects the components of knowledge management, and HRM is highly influential and has a positive effect on quality management processes and vice versa in the work environment.
9. Moh. Hudi Setyobakti. Tahun 2017. Title : Identification of Bussiness Enterprises BUMDES Based on Social and Economic Aspect. (Case Study at BUMDES Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi). Law

No. 6 of 2014 on Villages, provides an important position for the village to play its role in development. The important role of the village is the local authority possessed by the village in managing its household. Village economy is one of the important factors in assessing the success of village development. The village economic problems need to be solved by handling thoroughly, starting from the construction of infrastructure facilities, to developing the potential of the village to be optimized into opportunities for business opportunities that prosper the village community. Village Owned Enterprises, here in after referred to as BUMDes, become one of the important mandates contained in the Village Law. BUMDes urgency is affirmed in Permendesa number 4 of 2015. The context of BUMDes establishment is expected to be the driving force of the village economy, meaning that the establishment of BUMDes is not merely an orientation to the profit of the institution, but the more essence is the establishment of BUMDes should be able to provide both economic and social benefits to villagers. The type of this research is descriptive qualitative, with the aim to identify and analyze the feasibility aspects of BUMDes business in terms of social and economic aspects. The results showed that BUMDes Ijen Lestari Tamansari village District of Banyuwangi gave positive impacts economically and socially for the villagers like directly or indirectly. BUMDes's main business sector engaged in tourism management has an impact for residents around Ijen region, in the form of additional income from multiplayer tourism effects. The direct impact of BUMDes employees' involvement in the management

of activities and community involvement in BUMDes businesses such as local food producers packed with BUMDes and community-based homestay managers.

C. Kerangka Berpikir

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDesa merupakan lembaga bisnis yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat untuk dikembangkan oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Namun karena keterbatasan SDM, BUMDesa memerlukan keterlibatan konsep ilmiah yang dapat mengurai sisi keterbatasan tersebut. Diperlukan kolaborasi strategi organisasi/perusahaan dan SDM agar dapat tetap menjalankan bisnisnya demi menunjang kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Grant dalam Agus Maulana (2015),

“ Strategi adalah rencana yang bersifat menyeluruh menyangkut penerahan sumber daya untuk meraih posisi yang menguntungkan”.

Pada dasarnya strategi merupakan alat yang menghubungkan perusahaan/organisasi dengan lingkungannya, oleh karena itu organisasi harus memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menyelaraskan perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan berada.

SDM memiliki posisi yang sangat strategis dalam organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Eksistensi SDM itulah yang terdapat dalam organisasi yang kuat. Mencapai kondisi yang diharapkan diperlukan adanya manajemen

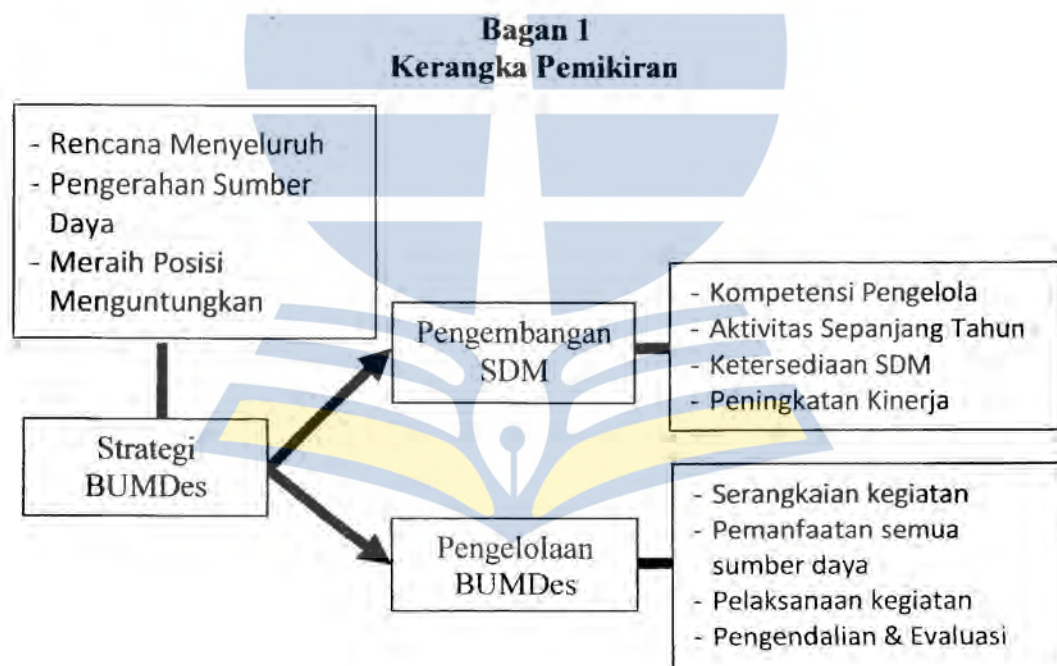
terhadap SDM secara memadai sehingga terciptalah SDM yang berkualitas, loyal dan berprestasi.

Berdasarkan pendapat para ahli, Kurniawati (2015), merumuskan beberapa karakteristik dari pengembangan SDM, yaitu :

“1) Pengembangan SDM merupakan upaya terencana dari organisasi untuk meningkatkan potensi SDM, 2) Pengembangan SDM dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang, 3) Pengembangan SDM dilakukan untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan jabatan, dan 4) Pengembangan SDM ditujukan kepada peningkatan kinerja individu yang bermuara pada kinerja organisasi.”

Dari empat karakteristik pengembangan di atas, point empat lebih memperjelas tujuan pengembangan SDM yang bermuara pada kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah BUMDesa.

Berdasarkan pemaparan konsep tersebut di atas, sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



D. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Operasional konsep pada penelitian ini adalah definisi konsep, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Definisi konsep digunakan untuk memudahkan pemberian arah dan kejelasan tentang penelitian ini penulis perlu memberi definisi dari masing-masing variabel sebagai berikut :

- a. Strategi BUMDes adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan
- c. SDM adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan.
- d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.
- e. Pengelolaan BUM Desa adalah serangkaian kegiatan pemanfaatan semua sumber daya (sumber daya manusia dan sumber daya alam) untuk mencapai tujuan BUMDes.

Berikut ini adalah indikator dari tiga variabel penelitian yang disajikan

dalam bentuk tabel. Masing-masing variabel memiliki indikator yang menjadi pedoman wawancara terhadap beberapa responden.

Tabel. 1.
Tabel Indikator Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Strategi BUMDes	1. Rencana Menyeluruh 2. Pengerahan Sumber Daya 3. Posisi Menguntungkan
2.	Pengembangan SDM BUMDes	1. Kompetensi Pengelola 2. Aktivitas Sepanjang Tahun 3. Ketersediaan SDM 4. Peningkatan Kinerja
3.	Pengelolaan BUMDes	1. Rangkaian Kegiatan 2. Pemanfaatan semua sumber daya 3. Pelaksanaan Kegiatan 4. Pengendalian dan Evaluasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai data kualitatif dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio dan video. Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini bersumber dari BUMDes di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang terkait dengan strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan BUMDes. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Berdasarkan judul yang diangkat, maka penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang terkait dengan strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer adalah merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait, mengenai strategi pengembangan SDM BUMDesa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Data sekunder adalah data yang dipilih melalui sumber tidak langsung, dimana data akan didapat salah satunya melalui survey ke instansi yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene, Pemerintah Desa yang berada di wilayah Pemerintah Kecamatan Pamboang. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Dokumen-dokumen lain yang dianggap sebagai bahan analisis yaitu data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Regulasi Pemerintah Pusat terkait Desa, Pemerintah Desa dan

BUMDes. Referensi dari berbagai media massa juga sebagai dokumen pendukung, seperti majalah, surat kabar.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Fungsi instrumen penelitian adalah untuk mendapatkan data yang *valid* (tepat) dan *Reliable* (konsisten), yang dapat dipenuhi antara lain dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang ada dan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjelaskan tentang suatu hal. Menurut Rusidi (2008) informan adalah sumber data primer yang mampu memberikan informasi mengenai diri/keadaan orang lain, atau memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya. Informan dalam penelitian ini diperoleh melalui *Key Person*. *Key Person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga ia membutuhkan *Key Person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi *Key Person* ini adalah tokoh formal atau tokoh informal.

Di dalam penelitian ini, instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah berupa Pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan mengenai apa dan bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Pedoman Wawancara disusun berdasarkan Konsep Strategi Grant (1995), Konsep Pengembangan SDM

Kurniawati (2015) dan Konsep Pengelolaan Prajudi Atmosudirjo (1982) dengan mencermati aspek-aspek yang mendukung teori-teori tersebut di atas.

Menurut Arikunto (2009), bahwa yang dimaksud subjek penelitian adalah semua orang yang menjadi sumber atau informan yang dapat memberi keterangan mengenai masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah strategi pengembangan SDM, sedangkan yang dijadikan subjek adalah Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Adapun Struktur Pengelola masing-masing BUMDes terdiri dari Kepala Desa sebagai penasehat, Pelaksana Operasional yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, serta Pengawas BUMDes merupakan informan dalam penelitian ini.

Penentuan subjek tersebut di atas didasarkan atas informan yang diperlukan oleh peneliti dalam mendapatkan data yang utuh dan naturalistik sesuai dengan fokus penelitian. Semua subjek yang terlibat perlu digali informasinya dalam bentuk tindakan maupun kata-kata, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif tentang Strategi Pengembangan SDM dalam Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat”.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang strategi pengembangan SDM dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten

Majene Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Observasi.

Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung (Sukmadinata, 2005). Observasi juga adalah kegiatan penelitian dengan terjun langsung melakukan pengamatan di lapangan sesuai dengan obyek yang amati. Selanjutnya Observasi juga adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Pengumpulan data dengan observasi dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (Riduwan, 2015) Wawancara juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung, data yang diperoleh langsung dengan informan sebagai responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis.

Menurut Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi, Dewi Fatmawati dalam buku Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (2018),

“Wawancara yang tampaknya sederhana namun sebenarnya sangat rumit, berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Kerumitan tersebut bukan hanya dari sisi teknis, namun juga dari sisi epistemologis, sehingga berkembang dari sekedar bentuk

komunikasi menjadi semacam alat produksi pengetahuan yang melalui konstruksi makna antara pewawancara dan responden”.

Menurut mereka (Indra Bastian, dkk), wawancara tidak lagi hanya fokus pada tataran elit. Setiap orang dipandang memiliki pengetahuan sehingga berpotensi sebagai responden. Singkatnya wawancara modern memberikan tempat khusus bagi pendapat semua orang.

Penulis telah melakukan wawancara pada 8 (delapan) orang tokoh kunci (key person) yang mengetahui hal ikhwal BUMDes di Desa-nya dan ditambah 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang pada salah satu tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Dokumentasi yang dilakukan melalui penelusuran terhadap dokumen yang telah tersedia pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan dijadikan arsip untuk memperkuat hasil pengamatan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif sudah dilakukan sejak awal kegiatan hingga akhir kegiatan, dengan harapan adanya konsistensi dalam analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti agar data menjadi lebih mudah difahami dan lebih bermakna adalah menggunakan model interaktif dari Sugiyono (1997) yang terdiri atas pengumpulan data mentah, *display* data, reduksi data, dan verifikasi/kesimpulan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilaian Data ;

Data yang telah dikumpulkan melalui metode dokumentasi, wawancara, dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan;

2. Analisis data;

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data yang telah ada dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan aspek strategi, aspek pengembangan sumber daya manusia, dan aspek kinerja organisasi.

Analisis data adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh hasil yang mencerminkan kedalaman dan kekayaan data. Oleh karena itu, proses analisis data kualitatif dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer, melalui tahap pengumpulan, pereduksian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Menurut Tur Nastiti (dalam bab buku : metoda pengumpulan dan teknik analisis data: 49) mengatakan bahwa

“..dalam riset etnografi, tahap analisis data tidaklah berupa tahapan yang bersifat linear. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaktif”.

Berikutnya Nur Nastiti menyebutkan masih dalam buku yang sama, bahwa

“Reduksi data merupakan proses menyeleksi menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari kata tersebut”.

Reduksi Data dilakukan untuk menyeleksi data-data yang telah dihimpun dari lapangan sesuai dengan kebutuhan maupun kategori-kategori yang telah ditentukan. Tujuan dari Reduksi Data adalah untuk memperoleh informasi yang lebih terfokus dan memang dibutuhkan.

3. Penyimpulan terhadap hasil interpretasi data.

Menurut Prasetya Irawan (2006) Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (grounded). Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan, dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis dilaksanakan secara paralel pada saat proses pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai suatu titik jenuh profil data, dan telah menemukan pola aturan yang dia cari.

Metode analisis adalah suatu cara-cara penerapan berbagai metode ilmiah dalam melakukan suatu kegiatan analisis. Dengan menggunakan metode

atau alat analisis diharapkan akan dapat menyajikan informasi yang akurat, aktual dan beberapa alternatif yang tepat dipilih untuk dilaksanakan. Analisis dilakukan berdasarkan fakta dan data. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan "SWOT" (Strenght, Weakness, Opportunities, Treat). Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka Strenght diartikan Kekuatan, Weakness berarti Kelemahan, Opportunities berarti Peluang dan Treat adalah ancaman. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tertentu secara lebih terperinci.

Menurut Limawandoyo (2013), Analisis SWOT merupakan sebuah alat pencocokan yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi, yaitu Strategi SO (Kekuatan-Peluang), Strategi WO (Kelemahan-Peluang), Strategi ST (Kekuatan-Ancaman), dan Strategi WT (Kelemahan-Ancaman). Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

1. Strenght merupakan kemampuan lebih yang dimiliki oleh internal perusahaan atau organisasi dibanding pesaing lain. Strength dijadikan sebagai kompetensi perusahaan sebagai pembanding dengan perusahaan lain.
2. Weakness merupakan kelemahan daripada sisi internal perusahaan yang umum dilakukan oleh pesaing untuk menjatuhkan perusahaan lain.
3. Opportunities merupakan peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan. Umumnya peluang ini dijadikan oleh perusahaan untuk menciptakan peluang.

4. Threat merupakan ancaman yang berasal dari kondisi eksternal perusahaan yang bisa saja dapat merugikan perusahaan sehingga harus segera diatasi.

Analisis SWOT (SWOT Analysis) menurut Richard L. Daft dalam Zuhrotun Nizak (2013) yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan Perbankan, rekan di perusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh klippin surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan.

Kemudian menurut Fredy Rangkuti dalam Zuhrotun Nizak (2013) menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah Identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu terkait dengan pengembangan misi, visi, tujuan, strategi, dan pengambilan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan dalam kondisi terkini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.

Sekilas mengenai sejarah Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 tentang Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (Bekas Hadat Tinggi) dibubarkan, bekas-bekas *afdeling* di Sulawesi Selatan menjadi *Swantara* (Otonom), sehingga bekas *Afdeling* Mandar menjadi salah satu daerah *Swantara*. Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 mengenai pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, maka daerah-daerah *Swantara* bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 termasuk Daerah *Swantara Mandar* serta Swapraja-swapraja asli (*diantara pitu babana binanga*) Neo Swapraja Kondo Sapata (ex kewedanan Mamasa) dihapuskan (dibubarkan) (Saharuddin, 1985:116; dalam Muh. Idham Khalid Bodi, Sibalipparri : Gender Masyarakat Mandar, 2005: 62).

Kabupaten Majene merupakan Kabupaten lama yang terbentuk lewat Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dengan kata lain, Majene lahir ketika Sulawesi masih utuh jadi satu. Lalu kemudian, Majene menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan ketika Provinsi ini dimekarkan lagi, Majene masuk dalam bagian Provinsi Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Kabupaten Majene termasuk dalam salah satu kabupaten pembentuk Sulawesi Barat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); maka kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju, lebih bisa berbuat lebih daripada sebelumnya. Lalu kemudian menyusul terbentuknya Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); semakin mempertegas posisi pemerintah daerah dalam membangun wilayah pemerintahannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene, dimana Kecamatan Pamboang masuk dalam Peraturan Daerah tersebut sehingga formasi kepala seksi bertambah dengan adanya seksi

ekonomi yang fokus pada urusan perekonomian di wilayah kecamatan. Kecamatan Pamboang merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Pamboang berada di daerah pesisir pantai dengan ketinggian antara 1-50 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Pamboang umumnya beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 800-1200 mm/tahun. Musim kemarau di wilayah ini biasanya terjadi pada bulan Mei hingga September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Desember hingga bulan April. Namun selama tiga tahun terakhir, perubahan musim terjadi sudah tidak menentu.

Kecamatan Pamboang secara geografis berbatasan langsung dengan Kecamatan Sendana di sebelah utara dan Kecamatan Banggae di sebelah timur, sedangkan di sebelah selatan dan barat masing-masing berbatasan dengan Teluk Majene dan Selat Makassar. Kecamatan Pamboang memiliki luas wilayah kurang lebih 70,19 Km² atau 7,41% dari luas keseluruhan Kabupaten Majene yang berjumlah 947,84 Km². Desa yang paling luas di Kecamatan Pamboang adalah Desa Banua Adolang dengan luas 12,57 Km². Sedangkan Desa yang luasnya terkecil adalah Desa Simbang dengan luas 1,62 Km². Desa Adolang sebelumnya merupakan hasil pemekaran dari desa Betteng dan Simbang. (Sumber : BPS Statistik Kab. Majene, Tahun 2017).

Jarak antara pusat-pusat pemerintahan dengan pemerintahan Kecamatan Pamboang adalah sebagai berikut :

- a. Jarak dari desa terjauh adalah \pm 21 km.
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Majene adalah \pm 15 km.

c. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat adalah \pm 130 km.

Kecamatan Pamboang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 13 (tiga belas) Desa. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Pamboang dengan Kecamatan lainnya relatif sudah cukup memadai dan lancar, baik jenis hotmix maupun semen cor. Walau masih ada beberapa jalan menuju ke desa terjauh yaitu Desa Banua Adolang, kondisi jalan aspal sudah rusak dan butuh perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya, terdapat tiga buah desa yang harus dilalui untuk menuju ke Desa Banua Adolang, yaitu Desa Adolang Dhua, dan Desa Adolang. Desa Banua Adolang inilah yang merupakan desa terjauh, dengan jarak tempuh kurang lebih 22 km dari ibukota Kecamatan Pamboang.

Kecamatan Pamboang dominan dihuni oleh masyarakat dari suku Mandar yang merupakan suku asli di wilayah Sulawesi Barat, selebihnya merupakan pendatang dari suku Bugis, Makassar dan Jawa. Umumnya mereka berbahasa dengan menggunakan Bahasa Mandar. Bahasa ini bagian dari kelompok utara dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan dalam cabang Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia (*Sumber Data : Muh. Idham Khalid Bodi, Sibalipparri : Gender Masyarakat Mandar, 2005: 65*). Bahasa Mandar yang digunakan oleh warga masyarakat Kecamatan Pamboang memiliki dialek bahasa bervariasi, namun sebagian kecil menggunakan Dialek Majene atau Bangge dan sebagian besar menggunakan Dialek Pamboang yang umum digunakan di wilayah pesisir Pamboang. Mandar adalah salah satu suku bangsa besar di Sulawesi yang sejajar dengan suku bangsa Bugis, Makassar dan Toraja. Mandar selain bahasa, juga berarti teritorial yang menempati

kawasan Provinsi Sulawesi Barat. Pada masa Pemerintahan Belanda, masuk dalam afdeling atau kota pemerintahan mandar lama.

Penduduk Kecamatan Pamboang dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi populasi jumlah penduduk adalah yang datang dan pergi. Sebagian dari penduduk umumnya bermigrasi ke wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Pulau Kalimantan dianggap sebagai sentra pekerjaan yang relatif cukup menjanjikan, karena banyak perusahaan besar yang beroperasi di sana menawarkan penghasilan yang nilainya lebih besar dari Kabupaten Majene. Sedangkan Sulawesi Tengah yang dalam hal ini Kota Palu, cenderung memberi kesimpulan yang sama yakni pekerjaan dengan pendapatan yang cukup besar. Hingga kini jumlah populasi penduduk di Kecamatan Pamboang berkisar sejumlah **22.626 jiwa**, yang terdiri dari **laki-laki 10.947 jiwa** dan **perempuan 11.679 jiwa** (*Sumber Data : BPS Kabupaten Majene Tahun 2017*).

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah cukup tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah keseluruhan sekolah yang ada di Kecamatan Pamboang berjumlah **77** (tujuh puluh tujuh) unit yang tersebar ke **13** (tiga belas) Desa dan **2** (dua) Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut : Sekolah Taman Kanak-kanak berjumlah **25** (dua puluh lima) unit, Sekolah Dasar Negeri berjumlah **36** (tiga puluh enam) unit dan Madrasah Ibtidaiyah berjumlah **2** (dua) unit, Sekolah Menengah Pertama berjumlah **8** (delapan) unit dan Madrasah Tsanawiyah berjumlah **3** (tiga) unit, Sekolah Menengah Atas

berjumlah 1 (satu) unit dan Madrasah Aliyah berjumlah 1 (satu) unit, dan Sekolah Menengah Kejuruan berjumlah 1 (satu) unit. Berdasarkan data BPS Kabupaten Majene, nampak bahwa institusi pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, dominan berkedudukan di wilayah Desa Tinambung, desa yang terletak bersebelahan dengan Ibukota Kecamatan Pamboang. Dapat dikatakan bahwa Desa Tinambung ini merupakan pusat pendidikan sekolah menengah atas maupun yang sederajat, bagi warga masyarakat di Kecamatan Pamboang. Sedangkan untuk pendidikan tingkat menengah pertama yang berjumlah 8 (delapan) unit, tingkat persebarannya cukup merata.

Ditinjau dari sisi keadaan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian yang dilakukan oleh warga masyarakat Kecamatan Pamboang, sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan pola pikir penduduknya. Letak Kecamatan Pamboang yang berbatasan langsung dengan selat Makassar, cenderung sangat berpotensi bekerja sebagai nelayan. Sektor perikanan yang merupakan potensi penting merupakan komoditas utama bagi perkembangan perekonomian warga masyarakat di Kecamatan Pamboang. Menurut data dari BPS Kabupaten Majene Tahun 2018, tercatat bahwa produksi perikanan pada tahun 2017 tercatat sebesar 254,8 ton yang terdiri atas 232,6 ton produksi perikanan budidaya. Jumlah kapal/perahu yang digunakan pada perikanan tangkap mencapai 1.165 kapal/perahu yang terdiri atas 42 perahu tanpa motor, 327 perahu motor tempel, dan 403 kapal motor. Sedangkan areal pemeliharaan/penangkapan ikan terdiri atas 2,0 Km² panjang pantai, 25 Hektar empang, dan 148,2 Km² laut.

Berdasarkan potensi perikanan, terdapat 7 (tujuh) buah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, yaitu Desa Bonde, Desa Bonde Utara, Desa Bababulo, Desa Bababulo Utara, Desa Tinambung, Desa Pesuloang, dan Desa Balombong. Desa-desa tersebut di atas sangat mudah dijangkau dengan kendaraan umum karena berada di sepanjang pinggiran jalan raya provinsi yang juga merupakan poros jalan yang menghubungkan antara kecamatan Pamboang dengan kecamatan Banggae dan Kecamatan Sendana.

Sisi sebelah timur Kecamatan Pamboang dengan kondisi geografis perbukitan, merupakan lahan bercocok tanam bagi sebagian warga masyarakat. Kondisi lapisan tanah di sebagian wilayah ini cenderung ditumbuhi tanaman jangka pendek, seperti jagung, bawang merah, kacang tanah, semangka, dan berapa tanaman jangka pendek lainnya. Bahkan pada beberapa Desa yang berada di wilayah dataran tinggi Kecamatan Pamboang, terdapat jenis komoditas lokal unggulan yang menjadi ikon Majene, seperti “*Pandeng*” (Nenas) Pamboang dan “*Loka Pere*” (pisang) Adolang. Terdapat 6 (enam) buah Desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, yaitu Desa Buttu Pamboang, Desa Simbang, Desa Betteng, Desa Adolang Dhua, Desa Adolang, dan Desa Banua Adolang. Nenas Pamboang merupakan varietas termanis kedua di Indonesia. Asal usul Nenas atau “*Pandeng*” atau “*Pondang*” (Bahasa Suku Mandar) yang ada di Desa Betteng sudah diakui secara Nasional dan memiliki sertifikat. Namun budidaya Nenas ini, belum dikembangkan produktivitasnya dengan baik utamanya dari sisi perluasan lahan. Komoditas unggulan lainnya adalah Pisang atau dalam bahasa Suku

Mandar disebut "*Loka Pere*". "*Loka Pere*" ini merupakan pisang asli di Wilayah Adolang yang memiliki bentuk menyerupai pisang tanduk tetapi tidak terlalu panjang dan berasa manis. Pisang jenis ini dapat tumbuh dimana saja, namun diperlukan perlakuan khusus melalui teknik-teknik pertanian modern.

Berdasarkan data dari *Badan Pusat Statistik Kab. Majene Tahun 2017*, tanaman pangan yang terbanyak di tanam oleh warga masyarakat Kecamatan Pamboang pada tahun 2017 adalah Jagung, dengan jumlah produksi sebanyak 363 ton. Produk buah-buahan yang banyak dihasilkan adalah Mangga dengan jumlah 1.052 ton pada luas panen sebanyak 9.150 Ha. Sedangkan produk perkebunan yang terbanyak adalah kelapa dengan jumlah sebesar 862 ton dan Kakao sebesar 69 ton. Jagung, Mangga, Kelapa dan Kakao tersebut dapat dijadikan sebagai produk unggulan wilayah desa di Kecamatan Pamboang yang cukup berpotensi untuk dikembangkan.

Populasi ternak sapi potong pada tahun 2017 sebesar 3.328 ekor, kerbau 29 ekor dan kuda 27 ekor. Populasi ternak kambing sebanyak 9.434 ekor. Ternak ayam kampung sebesar 4.632 ekor, ayam petelur sebesar 11.068, dan itik sebesar 1.800 ekor. Dibangunnya sentra pengembangbiakan ternak kambing (*bridng*) di Desa Tinambung Kabupaten Majene yang mendapat bantuan dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebanyak 200 ekor Kambing Ettawa pada tahun 2017 lalu. Dalam Majalah Majene Mammis, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP) Kabupaten Majene menjelaskan rincian jumlah kambing sebesar 150 ekor kambing betina dan 50 ekor kambing jantan. Program

pengembangbiakan kambing tersebut diprediksi akan menghasilkan 300 ekor anak kambing dalam jangka waktu satu tahun. Sehubungan dengan peningkatan populasi kambing tersebut, pada acara pembukaan sentra pengembangbiakan ternak kambing (*bridng*) yang dihadiri oleh Bupati Majene telah menginstruksikan untuk memperluas "*Briding*" sebanyak 1 hektar. Serangkaian dengan instruksi tersebut di atas, disebutkan bahwa "*Briding*" ini adalah merupakan Grand Design peternakan kambing di Kabupaten Majene yang diharapkan dapat mengembalikan ikon Majene sebagai daerah ternak kambing berkualitas. Menurut Kepala DPPP dalam Majalah Majene Mammis mengungkapkan bahwa program ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, dimana ternak kambing ini nantinya ketika sudah dewasa akan diberikan kepada masyarakat peternak dengan syarat memiliki kandang dan pakan. Setelah tiga tahun dipelihara oleh masyarakat, maka diwajibkan mengembalikan dalam bentuk anak kambing kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene, untuk kemudian kambing tersebut dipelihara lagi dan setelah besar diberikan kepada masyarakat lainnya, begitu seterusnya sehingga tersebar secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Majene.

Untuk lebih jelasnya klasifikasi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Pamboang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Pamboang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani dan Nelayan	2.260
2.	Kerajinan dan Industri	134
3.	Peternak	596
4.	Konstruksi	419

5.	Perdagangan	370
6.	Pengangkutan Umum	232
7.	TNI/Polri	36
8.	Pegawai Negeri Sipil	639
9.	Pensiunan	130
Jumlah		4.816

(Sumber : BPS kabupaten Majene, 2017)

Dari jenis pekerjaan penduduk yang diuraikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan potensi mata pencaharian dominan di Kecamatan Pamboang yaitu sebanyak 2.260 jiwa. Pada sektor Industri, Kecamatan Pamboang memiliki 52 unit usaha berskala kecil. Desa Simbang memiliki paling banyak unit usaha yaitu sebanyak 12 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 55 orang.

Ditinjau dari sisi kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat di Kecamatan Pamboang, Agama Islam paling mendominasi. Berdasarkan sejarah, awal masuknya Islam di Kerajaan Pamboang dibawa oleh Sayyid Zakariyah pada awal abad ke-17. Sayyid Zakariyah bergelar *Puang Disomba* berasal dari Magribi Jazirah Arab. Raja Pamboang masa itu "*I Salaran I Daeng Mallari*" (*La Salaga*) atau digelar "*Tomatindo di Samabayanna*" adalah anak bangsawan Kerajaan Mamuju dan Kerajaan Badung Bali yang kawin dengan Puatta Boqdi putri Raja Pamboang. Raja Pamboang, permaisuri dan seluruh warga istana semuanya masuk islam. Sesudah meninggal, Raja Pamboang bergelar *Tomatindo diagamana/ disambayanna* yang bermakna orang yang meninggal dalam beribadah (sholat). Selain itu, salah satu penyebab agama Islam sangat berkembang di Kecamatan Pamboang adalah dengan adanya Perwakilan Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1914-1915. Gerakan politik ini menjadi alat perjuangan

melawan Belanda. Kegiatan syarikat Islam di Pamboang dan sekitarnya antara lain membantu masyarakat yang tidak berkecukupan, orang sakit yang tidak memiliki biaya pengobatan dan pendanaan bagi orang mati meski mereka bukan anggota partai.

Sejumlah 13 (Tiga Belas) Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, masing-masing memiliki Badan Usaha Milik Desa yang pada umumnya terbentuk sejak tahun 2016. Dalam penelitian ini, direncanakan tiga atau empat dari tiga belas BUMDesa menjadi objek penelitian yang dapat diasumsikan sebagai perwakilan dari beberapa karakteristik desa dalam wilayah Kecamatan Pamboang. Berikut adalah BUMDes yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu :

1. BUMDesa Marendeng yang beroperasi di Desa Bonde Utara. Desa Bonde Utara merupakan desa kedua yang dijumpai setelah memasuki pintu gerbang wilayah Pemerintah Kecamatan Pamboang. Letak koordinat Kantor **Desa Bonde Utara** berada di **3° 31' 55" Bujur Selatan dan 118° 54' 47" Bujur Barat** (*Goggle Map Coordinate Application, 24 Februari 2018*).

Ditinjau dari sisi Geografis, Pemerintahan Desa Bonde Utara berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Majene. Desa Bonde Utara terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Kampung Baru, Dusun Butungan, Dusun Rea-rea, dan Dusun Bonde-Bonde. Berikut adalah Peta Desa Bonde Utara.

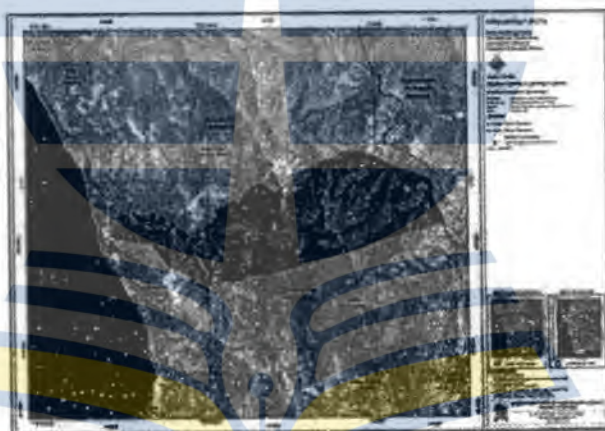


Gambar 1.
Peta Geografis Desa Bonde Utara

Desa Bonde Utara merupakan Desa yang paling banyak penduduknya dengan populasi 2.704 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.324 jiwa dan perempuan sebanyak 1.380 jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 514 kk dengan perbandingan luas area 3.47, rata-rata kepadatan penduduk di desa ini berjumlah 708 dengan anggota rumah tangga 5,25. (*Sumber : BPS Majene 2018*). Jarak tempuh dari Desa ini hingga ke Ibukota Kecamatan kurang lebih 5 km. Dominan penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. BUMDesa Marendeng dibentuk pada Hari Senin Tanggal 5 Februari 2018 di Aula Kantor Desa Bonde Utara dari hasil Musyawarah Desa pada hari itu juga dan menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BONDE UTARA Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Struktur Kepengurusan BUMDes Bonde Utara yang diberi nama Marendeng ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa Bonde Utara Nomor 18 Tahun 2018. Sebelumnya pernah terbentuk struktur kepengurusan BUMDes Tahun 2016, namun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Secara umum, Model struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa di seluruh Indonesia berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Untuk Kabupaten Majene, struktur kepengurusan BUMDes mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dimana Peraturan Bupati Majene No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan turunan dari Permendesa nomor 4 tahun 2015. Dimana struktur kepengurusan BUMDesa terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.

2. BUMDesa Al Baroqah beroperasi di Desa Adolang Dhua yang berjarak kurang lebih 10 km dari Ibu Kota Kecamatan Pamboang. Kantor **Desa Adolang Dhua** terletak pada $3^{\circ} 25' 55''$ Lintang Selatan dan $118^{\circ} 53' 27''$ Bujur Barat (*Goggle Map Coordinate Application, 24 Februari 2018*).



Gambar 2.
Peta Geografis Desa Adolang Dhua

Kurang lebih 11.15 Km^2 luas Desa yang dihuni oleh 224 kepala rumah tangga dengan 1.215 jiwa penduduk yang didominasi oleh 80% petani dan

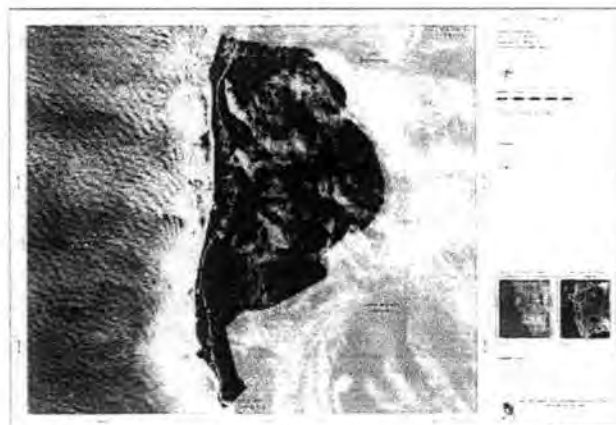
selebihnya oleh wiraswasta dan pegawai negeri sipil, Desa Adolang Dhua merupakan desa yang tidak memiliki unit usaha pada sektor industri.

Wilayah Pemerintahan Desa Adolang Dhua terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Pesapoang Barat, Dusun Siiyang, Dusun Panawar dan Dusun Mongeare. Meskipun hanya berjarak kurang lebih 10 km dari Ibu Kota Kecamatan, namun sinyal jaringan seluler di desa ini kurang terjangkau.

BUMDes Al Baroqah dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa pada tanggal 10 Desember 2016. Ditetapkan dengan Peraturan Dsa Adolang Dhua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Al Baroqah. Penetapan susunan kepengurusan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Al Baroqah Nomor 26 Tahun 2016 pada tanggal 30 Desember 2016.

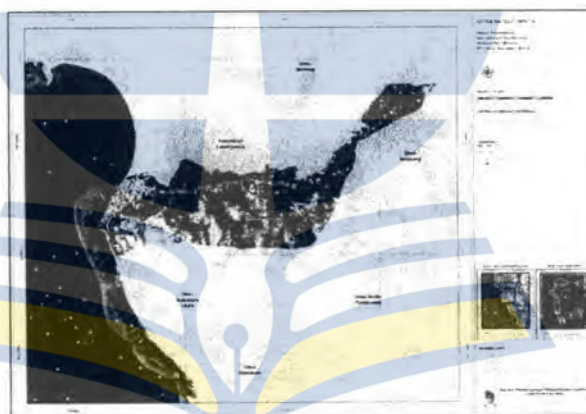
3. BUMDes Pesuloang dengan nama Sulo Pammase dibentuk berdasarkan peraturan desa Pesuloang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDESA SULO PAMMASE. Sedangkan susunan kepengurusan dibuat berdasarkan keputusan Kepala Desa Pesuloang Nomor 1.a/KEP.DS-PSL/I/2018. Desa Pesuloang berada di wilayah pesisir Kecamatan Pamboang yang berjarak tempuh kurang lebih 5 km setelah Ibukota Kecamatan Pamboang. Desa ini memiliki luas area sebesar 3.05 Km² dengan jumlah rumah tangga sebesar 193 kk. Populasi sebesar 914 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 448 orang dan perempuan 466 orang. Mayoritas penduduk desa ini didominasi oleh Nelayan. Meski demikian, 3 industri skala kecil yang mempekerjakan 19 orang, turut meramaikan dunia usaha di desa ini.

Letak Koordinat Kantor Desa Pesuloang berada di $3^{\circ} 27' 46''$ Lintang Selatan dan $118^{\circ} 52' 47''$ Bujur Barat (*Goggle Map Coordinate Application, 24 Februari 2018*).



Gambar 3.
Peta Geografis Desa Pesuloang

4. Desa Tinambung terletak pada koordinat $3^{\circ} 29' 45''$ Lintang Selatan dan $118^{\circ} 53' 43''$ Bujur Barat (*Goggle Map Coordinate Application, 24 Februari 2018*).



Gambar 4.
Peta Geografis Desa Tinambung

Dengan luas area 2,63 Km², Desa ini memiliki jumlah rumah tangga sebesar 464 kk dengan populasi sebesar 2.197 Jiwa Penduduk yang terdiri atas 1.054 laki-laki dan 1.143 perempuan.

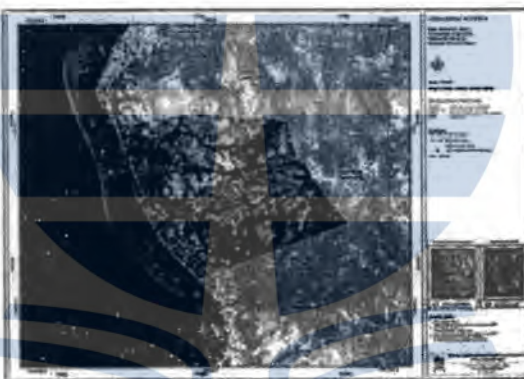
BUMDesa di Desa Tinambung bernama **Dalle' Passiolaolangang** yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Tinambung Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan Desa ini diundangkan di Tinambung pada tanggal 27 Agustus 2018. Wilayah Pemerintah Desa Tinambung memiliki lima buah dusun, yaitu Dusun Tinambung, Dusun Tappa Banua, Dusun Sappu, Dusun Lattigi, dan Dusun Kaida. Dua Dusun berada di wilayah pesisir pantai dan tiga Dusun berada agak jauh dari pesisir pantai. BUMDes Dalle' Passiolaolangang berada di wilayah pesisir pantai selat Makassar.

Desa ini berada bersebelahan dengan Ibu kota Kecamatan Pamboang, dan Pasar Kecamatan berada di wilayah desa ini. Mayoritas penduduk di desa ini didominasi oleh nelayan. Sejak terbentuk pada akhir bulan agustus tahun 2018, BUMDes Dalle' Passiolaolangang meskipun belum memiliki sekretariat, namun telah menjalankan unit usaha peternakan sapi, penyewaan mesin pengaduk semen, even organizer. Unit Usaha even organizer ini bekerja menyelenggarakan acara-acara besar yang membutuhkan banyak sumber daya, seperti menyelenggarakan acara pertandingan sepakbola, acara pernikahan, konser musik dan lain sebagainya.

5. BUMDes Desa Bababulo Utara sudah memiliki Bisnis Kambing dan Mesin Pengaduk semen. Usaha peternakan kambing menerapkan sistem bagi hasil yaitu induk kambing yang dipelihara oleh masyarakat bila

kemudian hari melahirkan dua ekor anak kambing, maka anak kambing tersebut disetor ke BUMDes, dan induknya boleh dimiliki oleh masyarakat. Untuk unit usaha Mesin Pengaduk Semen, BUMDes ini menerapkan sistem sewa dengan harga Rp 250 Ribu perhari untuk harga umum. Bagi warga masyarakat desa Bababulo Utara dikenakan sewa Rp. 150 Ribu perhari, dan untuk Pemerintah Desa sendiri dikenakan sewa Rp. 100 ribu perhari. Rencana perluasan Unit Usaha, Desa akan bekerjasama dengan Bank BRI untuk membuka BRI Link. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa Bababulo Utara ke BUMDes sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali.

Berdasarkan kondisi Geografis, **Pemerintah Desa Bababulo Utara** terletak pada koordinat $3^{\circ} 30' 27''$ Lintang Selatan, $118^{\circ} 53' 59''$ Bujur Barat (*Goggle Map Coordinate Application, 25 Februari 2018*).

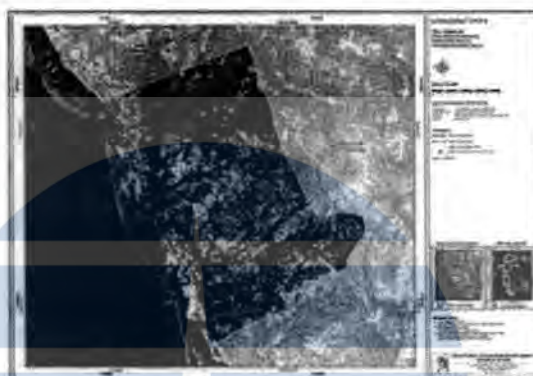


Gambar 5.
Peta Geografis Desa Bababulo Utara

6. Bumdes Desa Bababulo yang diberi nama Bannang Mapute telah menjalankan 2 (dua) unit usaha yaitu Simpan Pinjam Uang dan Penyewaan Mesin Pengaduk Semen (Molen). Secara Kelembagaan, sejak terbentuknya BUMDes Bannang Mapute telah 2 (dua) kali mengalami

pergantian kepengurusan, namun hingga saat ini belum menunjukkan adanya perkembangan yang dapat menghasilkan pendapatan asli buat desa. Para Periode Pertama terbentuknya BUMDes, Pemerintah Desa Bababulo memberikan penyertaan modal sebesar Rp. 35.000.000,- Juta. Namun pada periode kepengurusan BUMDes berikutnya, belum mendapatkan bantuan penyertaan modal dari Pemerinta Desa.

Berikut Peta Geografis Desa Bababulo yang sebelumnya merupakan induk dari pemekaran desa Bababulo Utara.

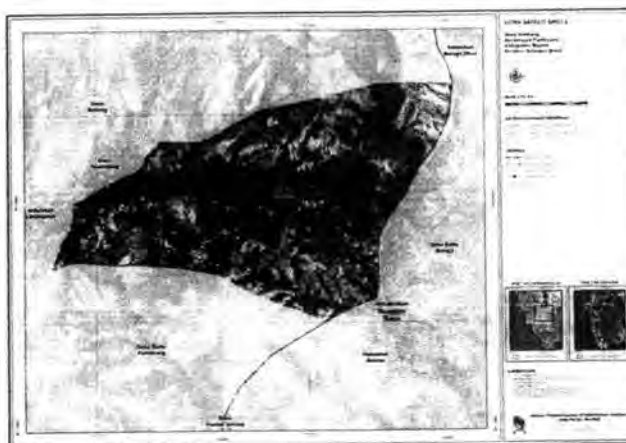


Gambar 6.
Peta Geografis Desa Bababulo

Dilihat dari peta geografis, Desa ini berpotensi untuk pengembangan hasil laut dan perikanan.

7. BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang belum pernah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Desa. Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kantor BUMDes dan Gedung Olahraga menjadi salah satu alasan sehingga belum adanya pemberian penyertaan modal operasional ke BUMDes Desa Simbang ini. Sikap kehati-hatian dari Pemerintah Desa Simbang merupakan indikator utama dari tidak

beroperasionalnya BUMDes Desa Simbang. Berikut adalah peta Geografis Desa Simbang.



Gambar 7.
Peta Geografis Desa Simbang

Dari Peta Geografis Desa Simbang di atas menunjukkan bahwa desa ini terletak di daerah Perbukitan yang berlokasi cukup jauh dari pesisir pantai Pamboang. Potensi pertanian dan perkebunan yang salah satunya adalah bawang merah menjadi primadona lahan pertanian di Desa Simbang.

8. BUMDes di Desa Betteng yang diberi nama BUMDes Samaturu, rupanya memiliki unit usaha yang serupa dengan beberapa desa lainnya yaitu mengelola usaha simpan pinjam uang dan mesin pengaduk semen. Dilihat dari kondisi geografis yang dapat dilihat dari peta di halaman berikutnya, terlihat bagian ujung bawah wilayah Desa Betteng cukup dekat dari pesisir laut Pamboang, namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa diantara pesisir laut dan wilayah Desa Betteng tersebut terbentang perbukitan yang cukup tinggi. Namun akses infrastruktur jalan menuju ke Desa Betteng sudah cukup representatif dengan konstruksi beton hingga ke dusun/kampung terjauh dari Lokasi Kantor Pemerintah Desa Betteng.



Gambar 7.
Peta Geografis Desa Simbang

Wilayah Desa Betteng berada di daerah pegunungan yang berpotensi pertanian dan perkebunan. Beberapa Produk komoditas yang dominan tumbuh di Desa Betteng, belum mampu dikelola dan dikembangkan secara lebih baik. Buah Nenas, Pisang dan Kemiri merupakan produk yang sejak dahulu di tanam oleh masyarakat Desa Betteng, namun pengelolaannya masih didominasi cara-cara tradisional seperti sistem petik-jual dan belum fokus kepada petik-olah-jual.

Terkait dengan Visi Misi dan Program Prioritas Bupati Majene yang selama ini sudah berjalan maupun sementara dalam proses. Berdasarkan dokumen, slogan Profesional, Produktif dan Proaktif memiliki makna dan arti tersendiri. Profesional memiliki tiga makna, yaitu: (1). Professional tata kelola pemerintahan yang diwujudkan melalui pengoptimalan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik di berbagai bidang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ; (2). Profesional aparat pemerintahan yang diwujudkan melalui peningkatan kompetensi

dan profesionalisme aparatur daerah ; dan (3). Profesionalisme sumber daya manusia yang diwujudkan melalui peningkatan derajat pendidikan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan keterampilan kerja masyarakat yang dilandasi nilai-nilai agama dan budaya lokal daerah.

Produktif dimaknai dengan (1). Majene produktif diwujudkan melalui penguatan dan peningkatan perekonomian kerakyatan dengan optimalisasi potensi daerah mulai dari potensi pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata. Produktif adalah meningkatkan sumber daya alam, potensi yang dijamin oleh pasar, kemudian dari sektor-sektor lain yang memungkinkan produksi lebih melimpah ; (2). Pencanaan revolusi hijau yakni bagaimana meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan melalui pengkajian tentang system pelaksanaan informasi lahan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan. Revolusi hijau juga terkait dengan pengolahan tanah yang baik, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan produksi. Nantinya setiap hasil produksi pertanian akan dilakukan proses pengolahan penambahan nilai produk. Proses nilai tambah ini, akan menggerakkan industry ekonomi kreatif sehingga dapat membuat lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program Revolusi hijau, dilaksanakan pada sebagian wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammeroddo, Kecamatan Tubo, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda ; (3). Program Revolusi Biru, adalah

upaya pemerintah Kabupaten Majene untuk meningkatkan produksi sumber daya alam yang berasal dari laut melalui upaya pengembangan bibit ikan unggul, pengembangan demplot budi daya Udang Vaname dan Ikan Bandeng, Bantuan Sarana-Prasarana perikanan dan alat bantu penangkap ikan. Kemudian penggunaan system informasi nelayan pintar. Dinas kelautan dan perikanan akan melakukan kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk memberikan informasi koordinasi spot ikan kepada nelayan setiap hari, sehingga dapat memaksimalkan produksi perikanan tangkap daerah. Selanjutnya peningkatan nilai tambah produk kelautan melalui pengolahan produksi. Nantinya setiap hasil produksi kelautan akan dilakukan proses pengolahan penambahan nilai produk. Proses nilai tambah ini, akan menggerakkan industry ekonomi kreatif sehingga dapat membuat lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program Revolusi Biru akan dilaksanakan pada Wilayah Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang dan sebagian wilayah Sendana.

Sedangkan untuk Proaktif dimaknai dengan : (1). Majene Proaktif dalam menghadirkan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemenuhan segala kebutuhan masyarakat menuju masyarakat Sejahtera tercukupinya kebutuhan manusia meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang selanjutnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Majene yang layak dan bermartabat; (2). Majene Proaktif dalam upaya mendayagunakan segala potensi sumber daya keuangan baik dari APBD Kabupaten Majene dan

sumber pembiayaan lain (APBDP, APBN dan pelibatan sektor swasta) dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah ; (3). Majene Proaktif dalam memberdayakan segala komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam menjalankan Visinya, Bupati majene memiliki 6 (enam) misi, yaitu : (1). Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat kabupaten Majene yang berkualitas ; (2). Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat ; (3). Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata ; (4). Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat ; (5). Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan ; (6). Supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan professional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan. **(Sumber : Majalah Mammis 2008, Edisi 19/Tahun II/July 2018.**

Terkait strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majene :

I. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kabupaten Majene yang berkualitas.

Program Prioritas Peningkatan SDM dilaksanakan pada 5 sektor :

- 1) Sektor Pendidikan : Peningkatkan profesionalisme tenaga pendidik ; Penganggaran sektor pendidikan dipertahankan di atas 20% ;

Pemerataan tenaga pendidik pada daerah terpencil; Peningkan infrastruktur sarana prasarana pendidikan ; Pengembangan sekolah kejuruan ; Pengembangan sekolah unggulan berstandar nasional ; Beasiswa siswa kurang mampu berprestasi ; Beasiswa S-1 dan S-2 ; Penambahan Armada Bus Sekolah Gratis ; Pembangunan Jaringan Internet kecamatan gratis.

- 2) Sektor Kesehatan : Penetapan standard pelayanan minimal pelayanan kesehatan ; Peningkatan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya ; Penyediaan Obat Paten Gratis untuk masyarakat ; Peningkatkan kualitas tenaga media dan paramedik pada Rumah Sakit, Puskemas dan Jaringannya ; Pemerataan tenaga ahli kesehatan di setiap puskesmas ; Desa siaga sebagai penyangga kesehatan masyarakat di desa.
- 3) Sektor aparat sipil Negara : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah ; Pemberlakuan punishment dan reward kepada aparat pemerintah.
- 4) Sektor Ketenagakerjaan : Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ; Pelatihan pengembangan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas ; Pendampingan pasca pelatihan kewirausahaan ; Uji sertifikasi kompetensi tenaga kerja ; Pelatihan sistem on the job training dan pemagangan di Perusahaan.

Program-program tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan nilai agamis dan berbudaya.

- 1) Peningkatan peran pemerintah, Majelis Ulama dan Tokoh Agama dalam penciptaan kerukunan Antar Umat Beragama; Kerukunan Intern Umat Beragama dan Kerukunan Antar Pemerintah dengan Umat Beragama.
 - 2) Pemberian ruang terhadap umat beragama dalam mengembangkan syiar agama masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Peningkatan pelayanan haji.
 - 4) Bebas buta aksara al-Quran masyarakat dan menjadi syarat utama bagi pendaftaran sekolah dan pengangkatan CPNS.
 - 5) Pelestarian Budaya lokal.
- II. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Program Prioritas : (1). Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan langsung masyarakat miskin, bantuan modal usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan ; (2). Peningkatan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan ; (3). Peningkatan program bantuan dan dukungan unit usaha ekonomi berbasis rumah tangga dan kelompok perempuan ; (4). Meningkatkan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ; (5). Mengurangi pengangguran melalui fasilitasi usaha masyarakat dan penyelenggaraan bursa kerja daerah.
- III. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata,

Program Prioritas : (1). Peningkatan Diversifikasi, Efisiensi, Produktivitas, Kualitas dan daya saing produksi pangan; (2).

Penyelenggaraan sistem pemasaran dan distribusi pangan; (3). Alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pemulihan sumber daya alam; (4). Peningkatan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan dan kehutanan; (5). Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; (6). Pemberdayaan kelompok pertanian, perikanan dan kelautan.

IV. Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat.

Program Prioritas : (1). Bantuan modal bagi kelompok usaha kecil; (2). Peningkatan SDM bagi pengelola usaha kecil dan menengah dibarengi dengan kegiatan pelatihan dan studi banding; (3). Kemudahan sistem perizinan untuk usaha kecil dan menengah; (4). Jaminan investasi bagi pihak swasta; (5). Peningkatan peran perbankan di daerah dalam pemberdayaan UKM melalui pinjaman yang mudah persyaratan serta bunga ringan.

V. Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan.

Program Prioritas : (1). Peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan; (2). Peningkatan kuantitas prasarana perhubungan masyarakat pada kawasan terisolir; (3). Peningkatan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat; (4). Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pertanian; (5). Peningkatan kuantitas air baku dan air bersih bagi masyarakat; (6). Peningkatan pemanfaatan energi

alternatif dan semakin luasnya jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah; (7). Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menghindari kerusakan lingkungan.

VI. Supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan professional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.

Program Prioritas : (1). Penataan Kelembagaan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien; (2). Meningkatkan akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3). Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal; (4). Mengoptimalkan pelayanan administrasi asset untuk mendukung tertib administrasi; (5). Mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh anggota masyarakat; (6). Mewujudkan penegakan hukum berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Hasil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis selama kurang lebih dua bulan di beberapa lokasi penelitian di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, beberapa informan memberikan keterangan yang cukup menginterpretasikan kondisi relatif BUMDes. Berikut hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis.

Informan berinisial “IM” dalam wawancara pada tanggal 21 Januari 2019 memberikan keterangannya terkait Perencanaan BUMDes Marendeng Desa Bonde Utara menjelaskan bahwa :

“Kami di sini sementara mempersiapkan unit usaha TV Kabel. Untuk sementara kami mempekerjakan empat orang tenaga untuk memasang dan membentangkan kabel-kabel untuk dipergunakan warga nantinya untuk berlangganan TV Kabel. Beberapa alat-alat telah kami beli. Sementara ini yang sudah jalan unit usaha TV Kabel. Di tahun 2018 telah diinvestasikan dana sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Berikutnya di tahun 2019 telah dialokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes Marendeng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan dan pengelolaan Pabrik Es. Karena warga di Desa ini lebih didominasi oleh nelayan.”

Berikut keterangan dari pengurus BUMDes yang desanya mendapatkan fokus perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Majene khusus untuk pengembangan “*lipa’ sa’be*” sarung sutera ciri khas suku Mandar yang akan diarahkan sebagai salah satu produk unggulan desa. Informasi “I” menuturkan bahwa :

“..adapun usaha pembuatan sarung sutera mandar dengan menggunakan alat Panette (alat penenun) yang saat ini dijadikan binaan oleh Pemerintah Daerah. Katanya direncanakan pengembangannya nanti untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Namun itu masih dalam tahap persiapan.”

Berikut keterangan informan inisial “IM” terkait dengan aspek pengaliran sumber daya dan dana untuk BUMDes Marendeng, dijelaskan bahwa

“Sumber Permodalan BUMDes diambil dari Dana Desa yang merupakan dana “sharing” dari pemerintah pusat yang memang diperuntukkan untuk desa-desa di Indonesia”.

Ditanyakan mengenai alat atau teknologi terkini yang digunakan dalam operasionalisasi kegiatan BUMDes Marendeng, dijelaskan oleh informasi “IM” bahwa :

“..dalam pelaksanaan pekerjaan di BUMDes, kami masih memakai potongan kertas sebagai bukti pembayaran iuran bulanan berlangganan TV Kabel. Untuk memudahkan perhitungan dan penginputan, kami sudah menggunakan komputer.”

Terkait dengan sumber daya manusia pengelola BUMDes, dalam keterangannya dijelaskan bahwa :

“Struktur kepengurusan di BUMDes terdiri dari Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional. Pada pelaksana operasional terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Masing-masing memiliki Tupoksi (tugas pokok dan fungsi)”.

Terkait dengan jaringan kerjasama atau kemitraan dengan organisasi atau lembaga yang berada di luar wilayah desa Bonde Utara, dijelaskan oleh “IM” bahwa :

“..karena kepengurusan ini tergolong masih baru, jaringan kami masih sebatas warga masyarakat di desa. belum ada jalinan kerjasama yang kami bangun dengan pihak di luar dari desa kami”.

Berikut penjelasan “IM” dalam mengerahkan dan memberdayakan warga masyarakat di Desa Bonde Utara dalam rangka pengelolaan dan pengembangan BUMDes Marendeng.

“ Kami memilih orang yang dianggap mampu mengelola usaha, tapi tetap melalui musyawarah yang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan para kepala dusun. Pelaksana operasional terpilih yang namanya telah dicantumkan di SK penetapan pengurus merupakan para sarjana strata satu. Mereka telah mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes di kantor PMD Kabupaten Majene di tahun 2018.”

Rutinitas kegiatan pengurus BUMDes dalam hal ini pelaksana operasional dijelaskan oleh “IM” bahwa :

“ Kegiatan rutin pelaksana operasional selama ini membukukan keluar masuknya uang di kas BUMDes. Karena unit usaha ini masih baru, belum ada cara-cara khusus yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja. Namun akan kami usahakan pada saatnya nanti.”

Ketika ditanyakan mengenai apa yang terbaik yang telah dilakukan oleh BUMDes Marendeng dikatakan bahwa :

”Hingga saat ini, usaha TV Kabel merupakan yang terbaik untuk saat ini, karena mengingat ini masih baru, diibaratkan bayi masih berjalan merangkak. Tapi In syaa Allah, kami akan terus upayakan untuk perbaikan hingga menjadi lebih baik”.

Informan berinisial “HR” dalam wawancara pada tanggal 28 Januari 2019 memberikan keterangannya terkait Perencanaan BUMDes Al Baroqah.

“ Hingga saat ini, BUMDes kami telah membuka unit usaha perdagangan dan masih jalan hingga saat ini, walaupun jalannya masih tersendat-sendat. Warga masyarakat sempat mengeluh karena merasa tersaingi dengan usaha perdagangan yang kami jalankan. Waktu itu di tahun 2016, kami diberi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), namun tidak habis terpakai, karena sebagian dana dipakai untuk membangun kantor operasional BUMDes Al Baroqah yang saat ini pembangunannya sudah mencapai sekitar 50%. In Syaa Allah, tahun ini 2019 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk mengembangkan usaha BUMDes. Kami rencananya akan membuka unit usaha foto copy dan menjual alat tulis kantor. Karena di desa kami, belum ada warga yang membuka usaha itu. Apalagi, di desa kami ada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan rencananya, kami akan membangun kerjasama pengadaan ATK untuk kedua sekolah tersebut. Berikutnya akan direncanakan membuat usaha ayam petelur dan jual beli air gallon. Itu sudah diusulkan kepada Kepala Desa.”

Penjelasan informan “HR” terkait sumber dana BUMDes Al Baroqah dikatakan bahwa :

“Sumber dana BUMDes Al Baroqah diambil dari Dana Desa. Dana desa ini bersumber dari pembagian anggaran Pemerintah Pusat

yang tujuan untuk desa. Pelaksana Operasional BUMDes Al Baroqah di SK-kan oleh Pemerintah Desa Adolang Dhua sejak tahun 2016. “

Informan “HR” dalam wawancara menyampaikan peluang usaha yang dapat dikembangkan didesanya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan mengatakan bahwa :

“Bisa dibilang, pengetahuan dan kemampuan kami di desa itu terbatas. Potensi pertanian dan perdagangan dengan ukuran kecil itu yang bisa kami lihat di sini. Mungkin dengan adanya sekolah, rencana usaha ATK dan Fotocopy bisa berjalan dengan baik dan semoga menguntungkan nantinya”.

Keterbatasan populasi SDM, menurut “HR” menceritakan bahwa :

“Mencari dan menemukan orang yang mau dipekerjakan oleh BUMDes di desa ini bukan hal sulit namun juga tidak mudah. Sebab, kebanyakan dari mereka aktif membantu orang tuanya bekerja di kebun dan mengambil makanan kambing. Jadi mungkin yang diperlukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para orang tua untuk bisa berperan aktif membantu pemerintah desa dalam memberikan pemahaman akan pentingnya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Namun, terus terang kami di desa belum melakukan kegiatan pemberdayaan warga desa untuk membantu BUMDes. Tapi sebelumnya, ada banyak kegiatan-kegiatan PKK yang aktif dilaksanakan disini, semacam kebun dasawisma, kegiatan pengajian ibu-ibu majelis taklim, dan lain-lain.”

Informan “HR” juga menginginkan adanya kegiatan pembimbingan dalam pengelolaan BUMDes, berikut penjelasannya :

“BUMDes Al Baroqah saat ini berjalan seperti layaknya hidup segan matipun tak mau. Kami sebenarnya malu mendengar tanggapan warga masyarakat tentang BUMDes yang bisa dibilang berjalan tapi tersendat-sendat. Pengurusnya ada, tapi tidak aktif. Bisa dibilang, kami masih awam dengan pengelolaan usaha desa ini. Jadi butuh pendampingan yang lebih dekat dan selalu, agar kami paham bagaimana membentuk dan mengelola usaha-usaha yang ada di desa.”

Informan berinisial “DY” dalam wawancara pada tanggal 04 Februari 2019 memberikan keterangannya terkait Perencanaan BUMDes Sulo Pammase.

“Kami rencana sebelumnya usaha semacam distributor barang kepada warga masyarakat. Berupa tabung gas yang dijual oleh BUMDes dengan harga distributor dan dijual eceran oleh masyarakat, namun proses pengurusan untuk menjadi pangkalan gas LPG masih sulit kami lakukan. Yang kami lakukan selama ini membeli ikan hasil tangkapan nelayan atau menukar dengan bahan bakar bensin. Ada rencana ke depan untuk mengembangkan usaha foto copy di desa ini, mumpung ada warga masyarakat yang mengerti dan bisa mengutak-atik mesin foto copy.”

Hasil wawancara di bawah ini terkait kebutuhan sumber daya manusia dari Badan Usaha Milik Desa, Informan “DY” menjelaskan bahwa :

“Kurangunya SDM di desa ini, membuat kami kesulitan mencari orang untuk dipekerjakan di BUMDes. Padahal kalau dilihat di desa ini banyak anak-anak muda dan remaja yang bisa dilatih, tapi itu butuh proses dalam mengajak mereka, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami sudah meng-SK-kan sejumlah warga untuk menjalankan BUMDes ini, namun cara mengelolanya belum dipahami oleh mereka. Jadi memang kayaknya dibutuhkan semacam pelatihan atau mungkin lebih tepatnya dibimbing secara terus menerus hingga mahir. Memang ada semacam materi tentang BUMDes yang disampaikan dan disarankan kepada kami untuk dipelajari oleh pendamping desa, tapi kami tidak paham, mungkin karena kemampuan memahami kami masih sangat kurang, sehingga sampai saat ini kami malas untuk mempelajari.”

Berikut ini adalah hasil wawancara mengenai kinerja BUMDes, Informan “DY” menjelaskan bahwa :

“Saat ini BUMDesa di sini belum bisa memberikan keuntungan yang maksimal, apalagi BUMDesa ini masih terbilang baru...dalam arti kami masih tahap meraba-raba tentang apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Terus terang kami tidak mau gegabah, hanya karena melihat desa lain sudah mulai mengembangkan BUMDes-nya dengan berbagai macam unit usaha. Bisa jadi ini yang dikatakan oleh teman-teman dari desa lain, bahwa ada semacam kekhawatiran dalam menyertakan modal usaha ke BUMDes dalam jumlah besar”

Terkait sumber daya manusia yang akan mengisi kebutuhan jabatan di BUMDes, Informan “HY” mengatakan bahwa :

“Kami berusaha mencari dan melihat potensi warga yang bisa diajak kerjasama membuka unit usaha. Ada beberapa remaja yang sudah tamat dari sekolah menengah atas, yang kami coba dekati. Masih dalam proses perekrutan kalau bisa dibilang begitu. Karena anak-anak SMA sekarang, pada umumnya sudah mampu mengoperasikan komputer dan internet. Yah, desa ini kan tidak jauh dari kota kecamatan, sehingga hal-hal yang berbaur modern sudah mulai terbiasa di desa ini. Komputer dan Internet pada anak-anak remaja seusia SMA sudah bukan hal yang luar biasa bagi mereka.”

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan “HY” terkait dengan pengembangan sumber daya manusia BUMDes yang menjelaskan bahwa :

“Terkait evaluasi kinerja BUMDes Sulo Pammase Desa Pesuloang, inilah yang selalu kami pikirkan. Jika usaha sudah ada, maka diperlukan evaluasi. Kalau diperhatikan, kami memang butuh pendampingan yang lebih serius. Artinya, butuh dibimbing setiap hari agar kami mahir dalam membuat dan mengelola. Merencanakan sebuah usaha secara mendetail itu hal tersulit bagi kami di desa. Kurangnya pengetahuan dan informasi membuat kami seperti terperangkap dalam konsep dan pemahaman tentang BUMDes. Jadi selayaknya pengelolaan BUMDes ini butuh pembimbingan secara dekat.”

C. Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Regulasi tentang Desa ini sangat sejalan dengan

Visi Misi MP3 Bupati Majene. Majene Profesional, Produktif dan Proaktif, meski di lapangan penelitian terkadang sering terjadi pergesekan pemahaman.

Penulis mencoba menganalisis bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia BUMDes di Kecamatan Pamboang dengan tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang desa dan tentang Badan Usaha Milik Desa, teori Grant mengenai strategi, teori Kurniawati mengenai Pengembangan SDM dan teori Prawiro Atmosudirjo tentang Pengelolaan.

1. Aspek Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam aspek strategi Grant, Rencana secara menyeluruh pada sebuah organisasi merupakan hal penting untuk melihat apa yang menjadi tujuan. Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pamboang pada umumnya dirikan sejak tahun 2016. Dari sisi kelengkapan kelembagaan, beberapa desa sudah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sudah memiliki memiliki payung hukum yang berdasarkan pada Peraturan Desa Pembentukan, Pendirian dan Pembubaran BUMDes, namun pada umumnya belum memiliki Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Peraturan Desa tentang penyertaan modal ini merupakan salah satu bentuk transparansi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Desa yang diketahui oleh masyarakat melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 127 Ayat 2(e) yang tertulis bahwa Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengembangkan sistem

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa).

Perencanaan usaha BUMDes ini penting dibuat sebagai dasar panduan aktivitas usaha. Pada dasarnya rencana usaha menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang. Dari hasil penelitian kajian pustaka mengenai perencanaan usaha, terdapat beberapa alasan penting mengapa pengelola harus menyusun perencanaan usaha BUMDes, yaitu :

- 1) Sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha sehari-hari.
- 2) Untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah supradesa.
- 3) Untuk mendapatkan dana investasi.
- 4) Untuk mengatur dengan siapa harus bekerjasama.
- 5) Untuk mendapatkan kontrak besar.
- 6) Untuk menarik tenaga kerja inti.
- 7) Untuk memotivasi dan fokus.

Para pengelola BUMDes di Kecamatan Pamboang relatif kurang memperhatikan rencana usaha yang akan dijelankannya. Sehingga relatif

kurang fokus dan cenderung tidak termotivasi dalam menjalankan setiap unit usahanya, sehingga mengakibatkan pengawasan dan pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dominan daripada unit usaha yang dibangun cenderung mendapatkan konotasi negatif dari warga masyarakat.

Dari aspek penguatan kelembagaan BUMDes terkait potensi usaha yang memberdayakan masyarakat, Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga seringkali masyarakat menganggap bahwa usaha yang dijalankan oleh BUMDes merupakan bantuan dari pemerintah. Mengingat Program UEP (Usaha Ekonomi Pedesaan) yang pernah dibentuk oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dalam bentuk simpan pinjam hingga kini masih menyisakan persoalan yang tidak kunjung selesai. Masih tersisa uang yang berjumlah milyaran belum bisa dikembalikan oleh beberapa warga masyarakat Kecamatan Pamboang, dikarenakan usaha yang dijalankan macet dan orangnya sudah tidak mampu membayar cicilan lunak yang diberikan oleh Pemerintah.

Dari aspek Permodalan BUMDes, Pemerintah Desa umumnya masih belum memiliki pemahaman akan konsep pembentukan, dan pengelolaan BUMDes. Sehingga Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes menganggap bahwa mendirikan usaha semata-mata hanya mengejar keuntungan demi untuk mendapatkan pendapatan asli desa. hingga saat ini, belum ada regulasi yang dibuat oleh Pemerintah yang

mengharuskan pengelola BUMDes untuk menyusun Dokumen Perencanaan Unit Usaha.

Akibat dari kurang transparannya penyertaan modal Pemerintah Desa ke BUMDes ditinjau dari tidak adanya dokumen perencanaan usaha dan peraturan desa tentang penyertaan modal, sehingga para kepala desa terkesan mendirikan BUMDesa hanya sebagai meruntuhkan kewajiban atau sebagai salah satu persyaratan dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa diantara kepala desa disinyalir berusaha mengintervensi pengelolaan BUMDes dengan cenderung mengambil alih pengelolaannya dari unsur pelaksana operasional BUMDes. Hal ini berimbas kepada pelaksana operasional yang seringkali mengeluhkan tindakan kepala desa yang belum mampu memberikan keleluasaan pengelolaan kepada pelaksana operasional. Inilah salah satu penyebab munculnya istilah dalam pengelolaan BUMDes yakni hidup segan matipun tak mau.

Upaya mensinergikan perencanaan usaha BUMDes dengan potensi yang dimiliki warga masyarakat, relatif belum dipahami dengan baik oleh para stakeholder di desa. Proposal Rencana Usaha dan Studi Kelayakan Usaha masih berada di ruang antah berantah yang teramat sulit untuk diunggah masuk ke ruang kerja pemerintah desa. Kebiasaan mencontoh kegiatan studi banding ke daerah-daerah yang telah berhasil mengembangkan BUMDes, menjadi trend di kalangan pemerintah desa belakangan ini. Melihat karakteristik kebiasaan warga masyarakat Kecamatan Pamboang yang relatif menunjukkan perbedaan yang cukup

jauh berbeda jika dipandang dari sisi sistem yang telah berkembang sejak dahulu maupun tingkat kreatifitas sebagian besar warga masyarakatnya. Sehingga program studi banding, sering dikonotasikan secara negatif oleh para kritisi sebagai acara jalan-jalan dan menghabiskan anggaran. Hal ini merupakan indikasi sinyal negatif buat kelangsungan para penguasa yang selama ini memimpin pemerintahan di desa. Oleh karena itu, seyogyanya setiap perencanaan selayaknya disosialisasikan secara “Massive” kepada warga masyarakat desa sehingga menjadi isu sentral perkembangan pembangunan desa yang diketahui oleh hampir semua masyarakat di desa. Jadi bukan hanya jargon-jargon politik saja yang mampu merasuki pikiran masyarakat, namun juga perencanaan strategis pembangunan desa juga dapat mempengaruhi pikiran positif masyarakat untuk berkembang.

Strategi BUMDes selayaknya dimulai dari perencanaan sistematis dengan substansi pemberdayaan masyarakat, yang didukung secara massif oleh hampir semua warga masyarakat desa. Program pelatihan penyusunan rencana usaha dapat menjadi kurikulum wajib sebagai upaya melahirkan perencana-perencana muda yang berkualitas dan bertalenta dalam membangun desa.

2. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Aspek pengembangan sumber daya manusia BUMDes di Kecamatan Pamboang, pada umumnya BUMDes yang berada di Kecamatan Pamboang dalam merekrut pengelola langsung menunjuk warga yang dianggap cakap dan mampu mengelola usaha yang dilakukan pada saat musyawarah desa. Dimana pada musyawarah desa tersebut

dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, dan para kepala dusun yang turut memberikan pertimbangan dan arahan terhadap kualifikasi pendidikan yang diperlukan dalam pengelolaan 3 badan usaha milik desa ini.

Kualitas dasar pendidikan warga masyarakat Kecamatan Pamboang dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) tahun terakhir ini, dinilai cukup memberikan andil yang relatif cukup untuk perkembangan daerah. Keberadaan SMAN 1 Pamboang dan SMK 3 Kelautan, telah memberikan ruang pendidikan yang cukup bagi generasi penerus bangsa. Sistem pendidikan saat ini mengarahkan anak didik untuk mampu mengoperasikan komputer yang nota bene menjadi dasar atau salah satu syarat operasionalisasi pekerjaan pada zaman milenial ini. Komputer dan Internet menjadi komponen komoditi dalam menciptakan inovasi dan kreasi dalam mengembangkan ruang-ruang potensi pekerjaan, salah satu diantaranya adalah profesi YouTuber yang disinyalir dapat mendatangkan keuntungan puluhan juta hingga milyaran rupiah (<https://www.brilio.net>). Remaja-remaja terkini cenderung lebih termotivasi untuk menggunakan media sosial di internet sebagai gaya hidup dan kesenangan mereka, sehingga perlu diarahkan penggunaannya secara lebih positif agar terhindar dari pengaruh buruk dunia maya (internet).

Namun hingga kini, Pemerintah Desa belum mampu melihat celah pengembangan potensi remaja saat ini untuk dapat didiskusikan di ruang-ruang publik masyarakat desa. Ruang Pertemuan kantor desa hanya difungsikan sebagai tempat melakukan musyawarah desa, dan sangat jarang dijadikan sebagai tempat untuk mendiskusikan berbagai potensi

yang dapat dikembangkan di desa. Padahal seringkali terjadi diskusi-diskusi lepas diantara para warga sehingga memunculkan ide-ide brillian yang dapat membangun partisipasi warga untuk memajukan dan mensejahterakan desa.

Menelisik ruang potensi desa tidak hanya didasarkan pada perspektif kondisi alam, namun perlu juga dilihat dari beberapa sudut pandang. Hobby atau kesenangan sebagian besar warga desa yang sangat antusias menonton dan menyaksikan pertandingan sepakbola, badminton dan beberapa olah raga lainnya, bahkan ajang yang mempertunjukkan bakat serta kemampuan lainnya. Potensi-potensi ini perlu dicermati dan didiskusikan lebih lanjut oleh para penggiat pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan agar selanjutnya dapat dibawa ke ranah publik untuk ditetapkan sebagai salah satu bagian dari aspek pengembangan sumber daya manusia. Hal di atas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 ayat 3 yang menyebutkan bahwa BUMDes dapat menjalanka usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, BUMDes merupakan lembaga yang unik dan khas sepadan dengan keunikan desa (Admin KeuDesa : Strategi Pengembangan BUMDes Sebagai Pilar Ekonomi Desa. Diambil pada 17 Februari 2019 dari Situs World Wide Web : <http://www.keuandesadesa.com>).

Adanya unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes juga merupakan salah satu wadah yang dapat memotivasi warga masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensinya. Mengeksplorasi potensi kemampuan sumber daya manusia warga masyarakat melalui pengelolaan unit-unit usaha yang dimanage dengan baik, dapat menimbulkan kepercayaan diri masyarakat untuk dapat belajar memperbaiki apa yang menjadi kekurangan mereka. Konsep pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan oleh BUMDes, relatif belum mampu diserap pemahamannya oleh sebagian besar pemerintah desa di Wilayah Kecamatan Pamboang, sehingga untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di wilayah pedesaan mengalami keterhambatan.

Sinergitas proses perencanaan terhadap pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari sistem manajemen yang berusaha dibangun dalam konsep pemberdayaan BUMDes. Keterlibatan masyarakat dalam perkembangan desa adalah sebuah keniscayaan yang relatif tidak dapat ditawar keberadaannya dalam dinamika pemerintahan dewasa ini, karena warga masyarakat adalah kekuatan desa dalam membangun dan berkembang. Konsep Gotong Royong yang dahulu menjadi simbol peradaban masyarakat desa, kini mulai memudar tergerus perkembangan zaman. Kebutuhan nilai rupiah dalam hidup dan berkehidupan, secara perlahan menggeser tatanan sosial kekeluargaan yang selama ini hidup dalam dinamika masyarakat Indonesia yang berbudaya, santun, saling menghargai dan saling tolong menolong.

Efek dari proses pembelajaran demokrasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia selama ini sehingga melahirkan istilah politik uang pada setiap jelang pesta perhelatan pemilihan kepala daerah, presiden maupun legislatif, cenderung relatif meracuni pikiran warga masyarakat yang nota bene membutuhkan uang. Namun apakah daya nasi sudah menjadi bubur, kondisi tersebut tidak dapat ditolak keberadaannya pada setiap situasi-situasi tertentu. Karakteristik manusiawi dari setiap warga masyarakat yang pada umumnya muncul dikarenakan tekanan mendasar dari kebutuhan manusia untuk melengkapi apa yang diperlukan dalam hidupnya. Upaya pemerintah untuk mengangkat derajat warga masyarakat desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, mulai memperlihatkan hasil walaupun tidak terlalu signifikan perkembangannya. Desa mulai berbenah, baik dalam hal pembangunan sejumlah fasilitas pelayanan sosial dasar hingga merambah ke pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi warga masyarakatnya.

3. Aspek Kinerja Organisasi.

Kinerja Organisasi dimulai dari proses perencanaan, implementasi dan evaluasi segala aktivitas rutin yang senantiasa di evaluasi dan diukur perkembangannya guna menghasilkan pekerjaan berkualitas. Pelibatan masyarakat dalam sistem input, proses dan output, selama ini berjalan secara alamiah dan relatif minim upaya pembinaan. BUMDes di Kecamatan Pamboang cenderung belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pengelolaan manajemen masih erat dengan

pola-pola lama yang lebih condong untuk bekerja sendiri daripada mempekerjakan orang lain. Karakteristik bawaan dari generasi sebelumnya masih dipegang teguh dalam mengoperasionalkan proses kerja. Kalau masih bisa dikerjakan sendiri, kenapa harus diserahkan kepada yang lain. Istilah tersebut masih ada dan berkembang hingga saat zaman milenial terkini. Karakter pengusaha masih belum bisa diadopsi oleh beberapa BUMDes yang terdapat di Kecamatan Pamboang, utamanya oleh para stakeholder di Pemerintah Desa.

Wacana kinerja belum akrab di kalangan Pemerintah Desa di Kecamatan Pamboang khususnya dalam pengelolaan BUMDes. Meskipun telah sering diperbincangkan pada pemberitaan di media televisi nasional. Motivasi memperbaiki dan mengembangkan diri hingga kini masih sebatas wacana yang masih sulit untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan unit usaha di BUMDes.

Peran serta dan tanggung jawab pendamping lokal desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang bertugas di Desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa ditengarai oleh sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Pamboang kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap acara rapat dan diskusi jarang dihadiri oleh pendamping lokal desa, karena para pendamping tersebut tidak menetap

dan bertempat tinggal di desa bersangkutan. Sejumlah stakeholder pemerintahan desa, kerap mengeluhkan kinerja para pendamping lokal yang hanya datang sekali sebulan memonitor perkembangan desa.

Oleh karena BUMDes didirikan di Desa bukan berdasarkan kebutuhan, namun karena sesuatu dan lain hal sehingga Organisasi ini akan dibahas pada point strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDes. Penerapan konsep Kinerja pada organisasi yang dibentuk secara “terpaksa” seperti BUMDes ini, secara otomatis tidak dapat diberlakukan, karena lembaga ini pada dasarnya berada pada kondisi sakit dan tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk lembaga seperti BUMDes ini adalah dengan memperbaiki permasalahan intern hingga menjadi normal dan dapat dijalankan kembali dengan mengaktifkan setiap komponen yang akan menggerakkan organisasi ini.

Pemerintah supra desa selayaknya prihatin dan bertindak strategis dalam membangkitkan semangat ber BUMDes di Kecamatan Pamboang. Pemerintah Supra Desa adalah jenjang tingkat pemerintah yang berada atasnya seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan seterusnya. Penerapan konsep kinerja di BUMDes akan bermuara pada meningkatnya pendapatan asli desa. Aktivitas rutin yang setiap hari akan dijalankan oleh pengelola BUMDes, merupakan salah satu aspek kinerja yang akan dievaluasi nantinya selain dari apa yang akan dihasilkan dari rutinitas setiap hari tersebut. Sehingga nantinya, BUMDes tidak lagi

disebut sebagai aktivitas sampingan, tetapi aktivitas utama bagi pengelola BUMDesa.

4. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDes.

Pada umumnya pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan dalam peningkatan kapabilitas karyawan adalah dalam hal orientasi pada pekerjaan. Kurniawati (2015) mengatakan bahwa pengembangan SDM ini penting searah dengan pengembangan perusahaan. Konsep pembentukan dan pendirian BUMDes menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, pada dasarnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengembangkan SDM Pengelola BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena apa yang direncanakan dan dilakukan BUMDes, sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa juga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pasal 4 Ayat (2), yang telah mengatur dasar pendirian badan usaha milik desa dicantumkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDesa dengan mempertimbangkan, (a) inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, (b) potensi usaha ekonomi desa, (c) sumber daya alam di desa, (d) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa, dan (e) penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk

pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pertimbangan point (d) di atas, yang merupakan salah satu prasyarat dari pendirian BUMDes cenderung diabaikan oleh pemerintah desa di Kecamatan Pamboang. Keterbatasan SDM di desa, relatif dialami oleh BUMDes dalam memenuhi kebutuhan operasionalisasi unit usaha. Tuntutan dari Kebijakan Pemerintah menyangkut prioritas penggunaan dana desa di tahun 2017, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pada pasal 4 menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan tersebut terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, Embung, Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, dan Sarana Olah Raga Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ini harus di publikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat.

Dalam penelitian ini, Penulis berupaya mensinergikan konsep strategi Grant (1995) dan konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Kurniawati (2015) untuk melihat situasi dan kondisi BUMDes di

Kecamatan Pamboang. Teori strategi Grant (1995) yang melibatkan unsur perencanaan yang bersifat menyeluruh, pengerahan sumber daya, dan meraih posisi yang menguntungkan. Secara keseluruhan relatif mampu diaplikasikan oleh BUMDes di Kecamatan Pamboang walau dalam kondisi yang tampil kurang maksimal.

Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia Kurniawati (2015) yang melibatkan unsur peningkatan kompetensi, rutinitas harian yang direncanakan sepanjang tahun, jaminan ketersediaan SDM yang sesuai kebutuhan jabatan, peningkatan kinerja individu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengaplikasian konsep pengembangan SDM Kurniawati oleh beberapa BUMDes di Kecamatan Pamboang, belum mampu dipenuhi dan dijalankan sebagaimana yang diharapkan.

Kebijakan pemerintah cenderung relatif sejalan dengan teori, namun fakta yang terjadi di lapangan penelitian tidak berjalan sesuai dengan kebijakan dan teori. Berdasarkan informasi yang dihimpun penulis berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa mendirikan dan membentuk Badan Usaha Milik Desa, relatif belum memenuhi syarat pertimbangan pendirian khususnya menyangkut sumber daya manusia pengelolaan BUMDes. Pelaksanaan Musyawarah Desa di tiap desa di Kecamatan Pamboang dalam musyawarah pembentukan BUMDes relatif terlaksana dengan dibuktikan berita acara pelaksanaan musyawarah desa. Kebijakan pendirian BUMDes di tiap desa di Kecamatan Pamboang, cenderung terlaksana atas tuntutan pemerintah pusat tentang prioritas penggunaan Dana Desa dengan kata

lain sekedar melaksanakan kewajiban tanpa mempertimbangkan efek yang akan muncul setelah pembentukan BUMDes.

Mencermati program yang setiap tahun dijalankan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Pamboang, relatif tidak nampak satupun program yang mengarah kepada pembinaan dan pelatihan pengelolaan BUMDes. Kurang maksimalnya dukungan pemerintah desa dalam hal pendidikan dan pelatihan pengelolaan BUMDes pada desa-desa di Kecamatan Pamboang, cenderung mengakibatkan progress perkembangan BUMDes menjadi lambat.

Namun, kondisi ini sedikit dapat terobati dengan adanya program pendidikan dan pelatihan yang rutin terlaksana setiap tahun terkait BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Balai Latihan Masyarakat Makassar (BALATMAS Makassar) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, walau tidak melibatkan secara sekaligus seluruh 62 (enam puluh dua) Desa di Kabupaten Majene. Salah satu informan yang berinisial "AN" dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membidangi urusan Desa, menuturkan bahwa "...sejak tiga tahun terakhir ini, BALATMAS Makassar seringkali kami fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihannya. Tidak hanya tentang pengelolaan BUMDes, tetapi juga tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa".

Pelibatan tenaga pendamping profesional yang bertugas mendampingi Desa khususnya dalam Pengembangan BUMDesa yang

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nampaknya tidak berjalan maksimal. Berdasarkan keterangan para informan yang berhasil dihimpun oleh Penulis dalam penelitian ini menunjukkan tidak intensifnya para tenaga pendamping profesional dalam bekerja membantu desa, karena mereka tidak berdomisili di desa yang didampinginya.

Khusus dalam hal pembimbingan pemuda pemudi desa yang berpotensi mengisi kebutuhan jabatan di BUMDes, yang juga merupakan salah satu persoalan utama dalam pengembangan desa. Menurut Penulis, kurang intensifnya pendamping desa dalam membina dan membimbing BUMDes, bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pendamping desa. Hal senada diungkapkan oleh salah satu informan "HY" yang merupakan salah satu unsur pemerintah desa di Kecamatan Pamboang mengatakan bahwa " ..terkadang pendamping desa telah menyediakan waktunya untuk melaksanakan pembinaan secara lebih dekat (*intensif*), namun warga masyarakat yang menjadi fokus pembinaan, punya kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan". Alasan yang berbeda diungkapkan oleh informan "HR" yang merupakan salah satu pengurus BUMDes di Kecamatan Pamboang menyangkut pembinaan dari tenaga pendamping. "*..Mereka (tenaga pendamping)* kalau datang meminta data dan informasi terkait apa yang sudah dilakukan BUMDes. Kami meminta dibimbing, jikalau unit usaha kami sudah jalan. Sedangkan yang kami mau itu, bagaimana

menyusun dan membuat proposal unit usaha yang cocok dengan situasi dan kondisi (*potensi*) desa kami”.

Di dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 pada pasal 25, juga dicantumkan strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari Inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi : (a) Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa ; (b) Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa ; (c) Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan ; (d) Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha; (e) Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor ; (f) Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hampir segala aspek dapat dilaksanakan di BUM Desa ini. Diperlukan adanya perencanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa masing-masing khususnya di Kecamatan Pamboang. Perencanaan usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa perlu dirumuskan dan didokumentasikan sebagai bahan

evaluasi. Namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan para pengurus BUMDes di Kecamatan Pamboang.

Penyusunan sebuah konsep unit usaha di tiap BUMDes di Kecamatan Pamboang hingga saat ini menjadi hal yang agak susah dilaksanakan. Menurut Penulis, kesenjangan informasi pengetahuan tentang bagaimana membuat proposal rencana usaha, terjadi karena rendahnya semangat literasi masyarakat yang kurang memanfaatkan media internet sebagai salah satu sumber informasi. Belum adanya asosiasi atau kumpulan pengurus BUMDes di Kecamatan Pamboang yang bersifat resmi, sehingga sempit ruang gerak kebutuhan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh mereka. Oleh karena itu, Penulis berasumsi bahwa strategi yang tepat untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang adalah dengan melaksanakan program pendampingan khusus secara lebih intensif dan berkala terhadap segenap pengurus BUMDes. Program ini melibatkan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Program P3MD Kabupaten Majene.

5. Pengelolaan BUMDes.

Pengembangan BUMDes di Kecamatan Pamboang bergantung kepada Pengembangan SDM BUMDesa. Kinerja merupakan salah satu bagian dari pengembangan SDM. Indikator perkembangan SDM tersebut seharusnya mengacu pada aspek kinerja yang salah satunya adalah rencana

aktivitas rutin karyawan BUMDes dan hasil dari rutinitas pekerjaannya. Salah satu aspek dari teori Lebas dan Euske tentang kinerja, memberikan pemahaman akan pentingnya aktivitas rutin dari setiap karyawan sehingga dapat mendeskripsikan tahap-tahap perkembangan dari sebuah organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa di Kecamatan Pamboang mengartikan kinerja sebagai suatu keberhasilan setelah melaksanakan pekerjaan penting. Kemampuan mengadakan sarana dan prasarana di wilayah pedesaan, merupakan keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah desa. BUM Desa yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa merupakan keberhasilan, karena selama ini belum pernah dibentuk. Unit usaha terbentuk dan mampu dijalankan oleh BUMDes, juga merupakan sebuah keberhasilan, meskipun tidak berjalan sesuai konsep pemberdayaan yang diisyaratkan oleh Pemerintah Pusat.

Menganalisis kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permen DPDTT RI) Nomor 4 Tahun 2015, tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUM Desa pada pasal 3 (tiga) yang memuat tujuan pendirian BUM Desa. Tujuan-tujuan tersebut merupakan rencana jangka panjang yang akan mengontrol perkembangan BUMDes. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan perekonomian desa; (2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; (3). Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; (4). Mengembangkan rencana kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga; (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung

kebutuhan layanan umum warga; (6). Membuka lapangan kerja; (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan; (8). Meningkatkan pendapatan warga masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan tujuan pendirian tersebut di atas yang coba disandingkan dengan kondisi di lapangan penelitian, dapat diasumsikan bahwa strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan BUM Desa sudah ada dasar pemikiran tentang bagaimana merumuskan pertambahan nilai ekonomi yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat rancangan usaha yang akan dikembangkan di BUMDes. Pengembangan SDM berarti fokus pada aktivitas harian karyawan. Sedangkan BUMDes di Kecamatan Pamboang pada umumnya belum memiliki perencanaan untuk pelaksanaan rutinitas harian. Sehingga konsep pengelolaan hanya dapat diarahkan pada keberhasilan mendirikan BUMDes dan Unit-Unit usaha yang ada didalamnya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kinerja belum mengarah pada bagaimana mendapatkan pendapatan asli daerah, namun sebatas pada bagaimana menciptakan unit usaha yang mampu memberdayakan warga masyarakat desa.

Kelembagaan BUM Desa di Kecamatan Pamboang, sejatinya merupakan angin segar bagi perkembangan usaha kecil dan mikro yang hidup dan berkembang pada lingkungan pedesaan. Kebijakan prioritas Dana Desa untuk penyertaan modal menjadi peluang bagi desa mengumpulkan pendapatan asli desa. Namun rupanya hingga saat ini, pemahaman konsep pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Pamboang

masih belum mampu menembus batas cakrawala berpikir para stakeholder Pemerintahan Desa. Akibatnya sekali lagi, muncul sejumlah kecurigaan yang berkonotasi negatif dari segelintir warga masyarakat di desa, dimana salah satunya menyatakan bahwa anggaran penyertaan modal BUMDes digunakan sebagai dana cadangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa yang tidak terakomodir dalam rencana kerja pembangunan desa. Kecurigaan masyarakat tentang hal tersebut di atas diakui oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Pamboang, dimana salah satu alasannya adalah karena anggaran untuk penyertaan modal untuk BUMDes belum dipergunakan.

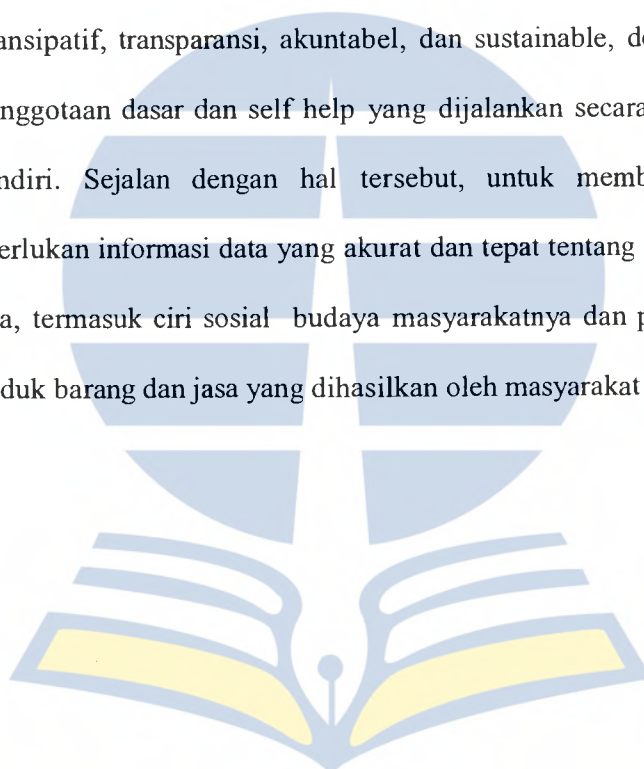
Upaya meningkatkan kinerja organisasi/ lembaga BUMDes di desa-desa pada lingkup wilayah kecamatan Pamboang, dengan melalui penguatan kelembagaan merupakan strategi yang terbaik dengan berdasar kondisi kelembagaan yang masih belum mampu secara sah dan meyakinkan memenuhi persyaratan pembentukan BUMDes. Apabila situasi dan kondisi BUMDes tidak segera diperbaiki, akan muncul lebih banyak persoalan baru yang bisa mengakibatkan permasalahan kronis berkepanjangan. Hal ini dapat memberikan preseden buruk bagi pemerintah desa dan supra desa, seperti yang terjadi pada program-program pemerintah sebelumnya yang menasar pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Jadi, secara umum pendirian BUMDes yang dimaksudkan untuk :

- (1). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standard pelayanan minimal, agar berkembang usaha masyarakat di desa) ;
- (2).

Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonomi berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADEs) ; (3). Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. Hal tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat.

Menurut hemat Penulis, Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes bahwa untuk menjalankan Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan self help yang dijalankan secara professional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Lebih lanjut penulis menguraikan dalam bentuk kesimpulan yang berkaitan dengan strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan BumDes sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pamboang pada faktor rencana yang bersifat menyeluruh, faktor ini menganalisis rencana besar atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, yang kemudian diurai menjadi rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, namun hal ini tidak berjalan secara maksimal. Lalu selanjutnya Strategi Pengembangan SDM dalam Pengelolaan BUMDesa di Kecamatan Pamboang pada faktor pengalokasian sumber daya yang merupakan pengembangan dari faktor rencana yakni seberapa besar sarana dan prasarana yang akan dikerahkan dalam mendukung rencana, dan seberapa besar sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung rencana, semua diuraikan pemanfaatannya dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, hal ini tidak berjalan secara maksimal. Kemudian, Strategi Pengembangan SDM dalam Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pamboang pada faktor meraih posisi yang menguntungkan dalam arti faktor ini adalah target strategi yang merupakan posisi aman pertama harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Hal inipun tidak berjalan maksimal.

2. Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pamboang pada faktor rangkaian kegiatan diartikan bahwa hasil dari merangkai usaha atau pekerjaan berjalan kurang maksimal, lalu selanjutnya pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pamboang pada faktor pemanfaatan sumber daya dalam arti aktivitas menggunakan proses dan sumber, juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pamboang pada faktor pengendalian sumber daya yang berarti bahwa Pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua bisa berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien, itupun tidak berjalan maksimal.
3. Analisis SWOT
 - Strategi SO (Kekuatan Peluang) : Menggunakan Modal Penyertaan, Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung yang ada disiapkan oleh Pemerintah Desa, untuk
 1. Memberdayakan SDM desa utamanya tamatan SMA dan Perguruan tinggi untuk menggarap potensi laut dan pertanian.
 2. Mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM lokal desa.
 3. Menggaji seorang Manajer profesional dalam mengembangkan dan membina pengelolaan BUMDes.
 4. Memanfaatkan potensi pasar skala kecamatan dan kabupaten.

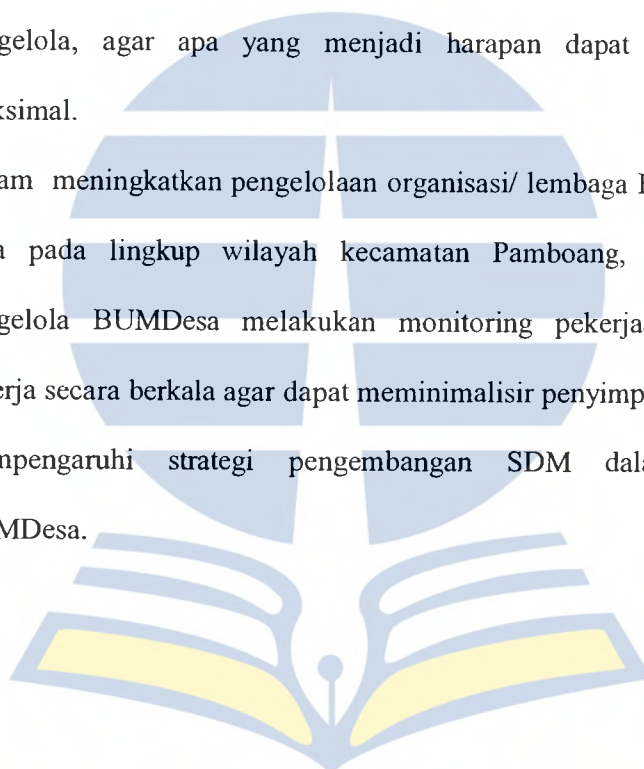
- Strategi WO (Kelemahan-Peluang) : Memanfaatkan SDM Lokal Desa yang ada, meningkatkan kapasitas pengelola dengan bekerja sambil belajar, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi pasar hasil laut dan pertanian.
- Strategi WT (Kelemahan-Ancaman) : meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman yang ada, artinya BUMDes tidak membangun unit usaha yang menimbulkan penggunaan sumber daya yang potensinya tidak dimiliki desa karena akan menimbulkan pembiayaan dan kerugian yang besar.
- Strategi ST (Kekuatan-Ancaman) : Memaksimalkan penggunaan modal penyertaan, fasilitas, sarana dan prasarana yang ada, memberdayakan SDM Lokal Desa, dan tamatan SMA dan Alumni Perguruan Tinggi, untuk :
 1. Mengelola unit usaha simpan pinjam dan penyewaan molen;
 2. Mempekerjakan SDM Lokal Desa bekerja pada unit-unit usaha BUMDes.
 3. Menambah unit usaha BUMDes sesuai dengan potensi lokal masyarakat desa dengan tetap mengembangkan issue pemberhentian subsidi Dana Desa dari Pemerintah Pusat.
 4. Meningkatkan intensitas pengelolaan unit usaha BUMDes dengan memanfaatkan Situasi dan Kondisi Politik dalam lingkungan desa.

Strategi WT : Memanfaatkan keterbatasan SDM Lokal Desa yang ada untuk terus-menerus diberikan pembinaan dengan jalan diberdayakan sesuai dengan kemampuannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas yang sehubungan dengan strategi pengembangan sumber daya manusia dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam hal pencapaian strategi pengembangan yang terkait pengelolaan BUMDes perlu ada jadwal perencanaan yang terukur dan baik, terkhusus pada faktor rencana yang bersifat menyeluruh, faktor penerahan Sumber Daya Manusia dan faktor Meraih Posisi yang Menguntungkan bagi pihak pengelola, agar apa yang menjadi harapan dapat terwujud secara maksimal.
2. Dalam meningkatkan pengelolaan organisasi/ lembaga BUMDes di desa-desa pada lingkup wilayah kecamatan Pamboang, sebaiknya pihak pengelola BUMDesa melakukan monitoring pekerjaan dan evaluasi kinerja secara berkala agar dapat meminimalisir penyimpangan yang dapat mempengaruhi strategi pengembangan SDM dalam pengelolaan BUMDesa.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. C, (2017). Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif . Bandung : Pustaka Jaya.
- Ancok, Djameluddin. (2012). Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aritonang, Lerbin R., (2016). Materi Pokok Penelitian Bisnis. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Bennett, E. E. (2014). Introducing new perspectives on virtual human resource development. *Advances in Developing Human Resources*, 16(3), 263-280.
- Dana, B. G. (2012). SWOT analysis to improve quality management production. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 62, 319-324.
- Diartho, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember.
- Fadhil, R., Maarif, M. S., Bantacut, T., & Hermawan, A. (2017). Model Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Agroindustri Kopi Gayo Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Journal of Technology Management*, 16(2), 141-155.
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 29-34.
- Kurniasih, D. (2017). Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banyumas. *Administrasi Publik Dan Politik*, 1(111).
- Kurniawati. (2015). Materi Pokok Pengembangan SDM;1-9; EKMA 5319/3 sks/ Kurniawati.—Cet.3; Ed.1 --; Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.
- Limawandoyo, E. (2013). Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada PT. Aneka Sejahtera Engineering. *Agora*, 1(2), 884-894.
- Majalah Mammis 2008, Edisi 19/Tahun II/July 2018.
- Majalah Mammis 2018, Edisi 18/Tahun II/Juni 2018.
- Maulana, Agus., (2016). Materi Pokok Manajemen Strategik. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Nahdhah, Najmatun. (2017). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif : Studi Kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Malang : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nisa Akmal (2017. 14 Desember) 8 Youtuber Indonesia ini penghasilannya capai miliaran rupiah. Diambil pada 17 Februari 2019 dari Situs World Wide Web : <https://www.brilio.net>.

Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 9(2), 468-476.

Nupikso, Gunoro., (2015). Materi Pokok Workshop penelitian (panduan). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Panggabean, Mutiara Sibarani,. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Peraturan Bupati Majene No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Majene.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Prawirosentono, Suyadi.,Primasari., Dewi., (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia : Kinerja dan Motivasi Karyawan : Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta : BPFE –Yogyakarta.

Rangkuti, Freddy. (2009). Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus. Integrated Marketing. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Rangkuti, Fredy. (2018). *SWOT BALANCED SCORECARD Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riduwan. (2015). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta : Alfabeta.
- Ruhana, I. (2012). Pengembangan kualitas sumber daya manusia vs daya saing global. *Profit (Jurnal Administrasi Bisnis)*, 6(1).
- Setyobakti, M. H. (2017). Identification of Business Enterprises Bumdes Based on Social and Economic Aspect (Case Study at Bumdes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi). *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 14(2), 101-110.
- Sobirin. Achmad., (2015). *Materi Pokok Manajemen Kinerja*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Sofi, K., & Mutiarin, D. (2019). Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Pongkok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 127-143.
- Sufi, W., & Saputra, T. (2017). Implementation of village empower program in supporting form of institutions of village business institutions (BUMDes)(Study on Dayang Suri Village Bungaraya Sub District Siak Regency Riau Province). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 91-98.
- Sulistyarini, Sri., (2016). *Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Program Magister*. Tangerang Selatan (TAPM) : Universitas Terbuka.
- Sumantara, K., Suryani, K., Widnyana, I. W., Menes, C. C., Sutrisna, I. P., Oktariana, O., & Dana, R. S. (2019). Swot Analysis of Village Owned Enterprises (BUMDES) Trading Business of " Ayu Bagia" Goods in Baha Village-Kecamatan Mengwi Badung District-Bali. *International Journal of Sustainability, Education, and Global Creative Economic (IJSEGCE)*, 2(1), 15-20.
- Sumantra, I. K. (2019, February). Integrated Solid Waste Management Strategy Based On Community. In *The 9th International Conference Rural Research & Planning Group* (pp. 418-427).
- Sundiman, D. (2017). Human resource management in the enhancement processes of knowledge management. *Binus Business Review*, 8(3), 167-173.
- Sutrisno, Edi. (2009). *Manajemen SDM Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tampiko, H. (2014). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Industri Kakao di Sumatera Barat. *Jurnal IPTEK*, 9(1), 40-46.

Teknis BUMDESA Bersama Oleh Kemendesa (2017, 5 Juli), didownload pada 2 September 2018, dari situs World Wide Web [http://www.berdesa.com/ Pedoman](http://www.berdesa.com/Pedoman).

Tim Pengembang Program Pascasarjana UT. (2016). Pedoman bimbingan tugas akhir program magister. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Winarsi, S., Widyantoro, A., & Moechthar, O. (2018). The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management in Indonesia to Improve the Village's Economy. *Sociological Jurisprudence Journal*, 1(2), 130-136.

Yun Iswanto, Andi Sylvana, Ali Muktiyanto. (2015). Materi Pokok Seminar dan Penelitian (panduan). Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Yunita, H. P. (2018). Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung.



MATRIKS ANALISIS SWOT

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

No.	Pertanyaan	Responden	Jawaban	Kriteria SWOT
1.	<i>Apa rencana BUMDes di desa anda ? Apakah cita-cita yang ingin dicapai oleh BUMDes, diurai menjadi rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ?</i>	<i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i>	Kami berencana membuat Gudang untuk tempat menampung Kemiri yang dikumpulkan oleh masyarakat desa. Karena di desa Betteng ini, pohon kemiri sangat banyak disini. Hasilnya pun berlimpah, namun pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini masih menggunakan cara-cara lama yang dilakukan secara turun temurun. Untuk sementara ini sebelum Gudang terbangun, kami juga berencana mengembangkan desa wisata yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa.	Opportunities (Peluang)
			Sementara ini unit usaha yang sementara berjalan adalah usaha simpan dan pinjam dan penyewaan Molen.	Strenght (Kekuatan)
		<i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i>	Melihat karena disini ada sekolah SMP dan SD, kami berencana membuka unit usaha fotocopy dan coba beternak ayam petelur. Selain itu, sementara ini kami membangun gedung kantor BUMDes dan Gedung Olahraga dan sementara dalam tahap pembangunan. Pemerintah Desa fokus kepada pembangunan gedung, sehingga modal operasional usaha untuk BUMDes belum ada.	Opportunities (Peluang)
	<i>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).</i>	Beberapa alat-alat telah kami beli. Sementara ini yang sudah jalan unit usaha TV Kabel. Di tahun 2018 telah diinvestasikan dana sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Berikutnya di tahun 2019 telah dialokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes Marendeng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan dan pengelolaan Pabrik Es.	Strenght (Kekuatan)	


			Karena warga di Desa ini lebih didominasi oleh nelayan. Ada usaha pembuatan sarung sutera mandar dengan menggunakan alat Panette (alat penenun) yang saat ini dijadikan binaan oleh Pemerintah Daerah. Katanya direncanakan pengembangannya nanti untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Namun itu masih dalam tahap persiapan. Sudah ada perencanaan, namun belum diurai secara berjangka.	Opportunities (Peluang)
		<i>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).</i>	Kami rencananya akan membuka unit usaha foto copy dan menjual alat tulis kantor. Berikutnya akan direncanakan membuat usaha ayam petelur dan jual beli air gallon. Itu sudah diusulkan kepada Kepala Desa.	Opportunities (Peluang)
			Hingga saat ini, BUMDes kami telah membuka unit usaha perdagangan dan masih jalan hingga saat ini, walaupun jalannya masih tersendat-sendat.	Strenght (Kekuatan)
			Warga masyarakat sempat mengeluh karena merasa tersaingi dengan usaha perdagangan yang kami jalankan.	Threat (Ancaman)
			Perencanaan secara tertulis belum disusun, apa' andappa niissang inna wassa carana massusung (karena belum diketahui bagaimana cara menyusun).	Weakness (kelemahan)
		<i>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</i>	Kami rencana sebelumnya usaha semacam distributor barang kepada warga masyarakat. Berupa tabung gas yang dijual oleh BUMDes dengan harga distributor dan dijual eceran oleh masyarakat. Ada rencana ke depan untuk mengembangkan usaha foto copy di desa ini, mumpung ada warga masyarakat yang mengerti dan bisa mengutak-atik mesin foto copy.	Opportunities (Peluang)
			namun proses pengurusan untuk menjadi pangkalan gas LPG masih sulit kami lakukan.	Threat (Ancaman)
			Perencanaan untuk usaha BUMDes masih sementara kami diskusikan dengan melihat apa yang menjadi potensi desa kami.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle'</i>	Kami telah menjalankan usaha Peternakan sapi, Jasa Penyewaan, dan Jasa Even Organizer.	Strenght (Kekuatan)

		<i>Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019)</i>	Berikutnya kami menargetkan usaha Jual Beli Semen dengan jumlah yang banyak. Sudah ada orang yang diserahkan tugas untuk menelusuri seluk beluk usaha ini. Jual beli Semen ini merupakan alternatif utama, dan yang kedua adalah Usaha TV Kabel. Distributor LPG sempat kami wacanakan karena sangat potensial, namun karena diperkirakan prosesnya panjang dan lama, akhirnya kami menundanya.	Opportunities (Peluang)
		<i>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</i>	Konsep Rencana BUMDes Bannang Pute berdasarkan dua pilihan, yaitu apa yang penting, dan apa yang mendesak. Dalam program kerja kami, ada lima bidang usaha yang masuk dalam potensi kami, yaitu Pariwisata, Barang dan Jasa, Home Industri, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Lalu kami memiliki rencana untuk membangun Rest Area yang nantinya akan bermitra dengan masyarakat.	Opportunities (Peluang)
			Namun untuk sementara ini hanya ada dua unit usaha yang aktif, yaitu Simpan Pinjam dan Penyewasaan Molen (mesin pengaduk semen).	Strenght (Kekuatan)
		<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	Dari 13 BUMDes di kecamatan Pamboang, hanya ada enam yang aktif hingga saat ini. Yakni BUMDes di Desa Bababulo, Desa Adolang Dhua, Desa Banua Adolang, Desa Bonde, Desa Bonde Utara, dan Desa Tinambung. Penyertaan modalnya di atas Rp. 50 Juta. Usaha yang dijalankan kurang lebih seragam, seperti perdagangan umum, jasa penyewaan, dan peternakan.	Strenght (Kekuatan)
2.	<i>Bagaimana pengerahan Sumber Daya di BUMDesa ? Seberapa besar sarana dan prasarana yang dikerahkan oleh BUMDesa dalam mendukung</i>	<i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i>	Penyertaan modal dari Pemerintah Desa Betteng masih sangat sedikit, itupun juga diperuntukkan untuk usaha simpan pinjam, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Pengelolaannya masih sangat sederhana dengan besar pinjaman maksimal satu juta rupiah yang dikelola oleh satu orang. Jumlah peminjamnya tidak lebih dari 15 orang. Sedangkan molen, hingga saat ini hanya disewa oleh pemerintah Desa dan masyarakat desa dan belum pernah disewa oleh masyarakat di luar desa. Molen inipun masih dikoordinir oleh pemerintah desa sendiri.	Strenght (Kekuatan)

<p>perencanaan ? Seberapa besar SDM yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung rencana ? Apakah diuraikan dalam rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ?</p>	<p><i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i></p>	<p>Pemerintah Desa Simbang merencanakan anggaran pembangunan Gedung Kantor BUMDes dan Gedung Olahraga melalui dua tahap penganggaran selama dua tahun dengan biaya kalau tidak salah kurang lebih 800 juta rupiah lebih. Insyaa Allah pada semester dua di tahun 2019 ini sudah mulai dipergunakan dan dimanfaatkan. Gedung Olahraga ini akan memiliki dua lapangan yaitu lapangan futsal dan lapangan Bulutangkis atau Badminton. Ini akan disewakan kepada masyarakat desa Simbang dan dari luar Desa Simbang.</p>	<p>Strenght (Kekuatan)</p>
	<p><i>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).</i></p>	<p>Kami di sini sementara mempersiapkan unit usaha TV Kabel. Untuk sementara kami mempekerjakan empat orang tenaga untuk memasang dan membentangkan kabel-kabel untuk dipergunakan warga nantinya untuk berlangganan TV Kabel. Rencana berjangkanya sementara disusun oleh pengurus BUMDes, jadi dokumennya belum ada.</p>	<p>Strenght (Kekuatan)</p>
	<p><i>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).</i></p>	<p>Dalam pengelolaan BUMDes, ada tiga orang yang dilibatkan untuk bekerja. Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Pelaksana Operasional BUMDes Al Baroqah di SK-kan oleh Pemerintah Desa Adolang Dhua sejak tahun 2016.</p>	<p>Strenght (Kekuatan)</p>
		<p>Untuk penyusunan laporan keuangan menggunakan komputer dengan program Excel yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Untuk BUMDesa sendiri belum ada pengadaan. Dokumen Perencanaan BUMDes masih kacau, belum sempat diperbaiki. Tempo hari ada dari tenaga pendamping lokal desa yang memberikan kami file-file softcopy, dari situ kami pelajari. Sempat sekali kami dibimbing menyusun itu (dokumen perencanaan), tapi untuk selanjutnya kami lupa bagaimana kelanjutannya.</p>	<p>Weakness (Kelemahan)</p>
	<p><i>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</i></p>	<p>Kurangnya SDM di desa ini, membuat kami kesulitan mencari orang untuk dipekerjakan di BUMDes. Padahal kalau dilihat di desa ini banyak anak-anak muda dan remaja yang bisa dilatih, tapi itu butuh proses dalam mengajak mereka, tidak semudah membalikkan telapak tangan.</p>	<p>Opportunities (peluang)</p>

	<p>Kami sudah meng-SK-kan sejumlah warga untuk menjalankan BUMDes ini, namun cara mengelolanya belum dipahami oleh mereka. Jadi memang kayaknya dibutuhkan semacam pelatihan atau mungkin lebih tepatnya dibimbing secara terus menerus hingga mahir. Memang ada semacam materi tentang BUMDes yang disampaikan dan disarankan kepada kami untuk dipelajari oleh pendamping desa, tapi kami tidak paham, mungkin karena kemampuan memahami kami masih sangat kurang, sehingga sampai saat ini kami malas untuk mempelajari. Jadi secara administratif, perencanaan BUMDes belum kami susun secara berjangka.</p>	Weakness (Kelemahan)
<p><i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).</i></p>	<p>Hingga saat ini, kami mempergunakan warga masyarakat sendiri yang menangani usaha usaha seperti peternakan sapi. Karena sarana dan prasarana penunjang peternakan belum ada, kami membuat perjanjian kerjasama hitam di atas putih dengan warga untuk pemeliharaan hewan ternak.</p>	Strenght (kekuatan)
	<p>Beberapa rencana usaha lain telah kami susun dalam bentuk yang sederhana. Unit Usaha Even Organizer sementara dibentuk, dan pengembangannya nanti akan menyelenggarakan tournament sepak bola, dan beberapa kegiatan-kegiatan besar lainnya.</p>	Opportunities (Peluang)
<p><i>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</i></p>	<p>Pada Musrembang tahun 2019 ini dimana akan dibahas Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun 2020 mendatang, kami akan mengajukan lagi pinjaman modal kepada Pemerintah Desa Bababulo sebesar 50 Juta Rupiah, jadi ada penambahan modal dari yang sudah ada sebesar 25 Juta Rupiah, hingga total modal yang kami miliki nantinya akan sebesar 75 Juta rupiah sebagai modal operasional.</p>	Strenght (kekuatan)

			Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diadakan dan dibangun untuk menunjang jalannya operasional BUMDes dan membutuhkan anggaran besar seperti Molen, Rest Area dan lain-lain, diusulkan pengadaan dan pembangunannya kepada Pemerintah Desa dan menjadi aset Desa yang kemudian dialihkan pengelolaan asetnya kepada BUMDes untuk mendapatkan Penghasilan Asli Desa (PADes). Setiap unit usaha nantinya akan dikelola oleh masyarakat sendiri, namun tetap dikoordinir oleh kami di BUMDes. Untuk pengelolaan unit Simpan Pinjam, saat ini masih dikelola oleh dua orang, yaitu saya sendiri dan bendahara. Karena kami masih kekurangan tenaga. Lalu, molen dikoordinir oleh aparat pemerintah desa Bababulo.	Opportunities (peluang)
		<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	Dominan mereka menggunakan tenaga-tenaga lokal desa. Memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Desa seperti kendaraan dan gedung. Perlengkapan bekerja masih menggunakan fasilitas pribadi para pengurus. Karena yang direkrut sebagai pengurus BUMDes rata-rata memiliki Laptop.	Strenght (kekuatan)
3.	<i>Bagaimana cara BUMDes untuk meraih posisi yang menguntungkan ? Apakah target strategi yang merupakan posisi aman pertama yang harus dilakukan BUMDes, sudah dilakukan ?</i>	<i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i>	Terus terang kami belum berfikir sampai ke tahap itu, yang jelas proses perencanaan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana desa wisata yang menjadi fokus kami.	Opportunities (peluang)
		<i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i>	Berdasarkan kesepakatan kami di BUMDes dengan Pemerintah Desa Simbang, karena letak geografis Desa Simbang berada di daerah perbukitan wilayah Kecamatan Pamboang, strateginya adalah dengan membangun sebuah bangunan yang belum ada di wilayah kecamatan yaitu Lapangan Futsal. Dengan olahraga dapat menjalin hubungan silaturahmi antara masyarakat desa dan diluar desa. Jikalau Gedung Futsal sudah ada, maka akan menjadi alternatif olahraga selain sepakbola dan badminton yang akan berkembang di wilayah Kecamatan Pamboang, maka pendapatan desa akan mengalir dengan sendirinya.	Opportunities (peluang)

	<p>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).</p>	<p>Sumber modal BUMDes diambil dari Dana Desa yang merupakan dana <i>sharing</i> (pembagian) dari pemerintah pusat yang memang diperuntukkan untuk desa-desa di Indonesia. Dalam pelaksanaan pekerjaan di BUMDes, kami masih memakai potongan kertas sebagai bukti pembayaran iuran bulanan berlangganan TV Kabel. Untuk memudahkan perhitungan dan penginputan, kami sudah menggunakan komputer.</p>	<p>Opportunities (peluang)</p>
		<p>Struktur kepengurusan di BUMDes terdiri dari Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional. Pada pelaksana operasional terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Masing-masing memiliki Tupoksi (tugas pokok dan fungsi).</p>	<p>Strenght (kekuatan)</p>
		<p>Karena kepengurusan ini tergolong masih baru, jaringan kami masih sebatas warga masyarakat di desa. belum ada jalinan kerjasama yang kami bangun dengan pihak di luar dari desa kami. Target kami adalah berjalannya Unit Usaha TV Kabel.</p>	<p>Weakness (kelemahan)</p>
	<p>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).</p>	<p>Sumber dana BUMDes Al Baroqah diambil dari Dana Desa. Dana desa ini bersumber dari pembagian anggaran Pemerintah Pusat yang tujuan untuk desa. Karena di desa kami, belum ada warga yang membuka usaha fotocopy. Apalagi, di desa kami ada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan rencananya, kami akan membangun kerjasama pengadaan ATK untuk kedua sekolah tersebut. Kami mengusahakan agar Unit Usaha Fotocopy bisa berjalan nantinya sebagai target utama.</p>	
	<p>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</p>	<p>Saat ini BUMDesa di sini belum bisa memberikan keuntungan yang maksimal, apalagi BUMDesa ini masih terbilang baru...dalam arti kami masih tahap meraba-raba tentang apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Terus terang kami tidak mau gegabah, hanya karena melihat desa lain sudah mulai mengembangkan BUMDes-nya dengan berbagai macam unit usaha. Bisa jadi ini yang dikatakan oleh teman-teman dari desa lain, bahwa ada semacam kekhawatiran dalam menyertakan modal usaha ke BUMDes dalam jumlah besar. Kami tidak mau disoroti oleh Masyarakat. Namun, yang menjadi target kami sementara ini adalah berjalannya unit usaha yang bisa menopang</p>	<p>Opportunities (peluang)</p>

			keuangan desa yaitu stasiun SPBU mini atau pertamini. Karena bahan bakar bensin dipergunakan setiap hari oleh warga desa kami	
		<i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).</i>	Kami berusaha membuat usaha yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Namun semua masih dalam tahap uji coba, sambil terus mempelajari segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Unit usaha distributor semen, TV Kabel, dan distributor tabung gas LPG merupakan rencana besar kami, jika salah satunya sudah terwujud, kami merasa sudah berada pada posisi aman pertama.	Opportunities (peluang)
		<i>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</i>	Hingga saat ini, meski kekurangan personil, kami masih aktif melakukan komunikasi ke Pemerintah Desa terkait kekurangan-kekurangan yang ada di internal BUMDes. Target awal kami selain perbaikan internal kelembagaan, Unit Simpan Pinjam dan Molen akan diperbaiki pengelolaannya hingga memperoleh pendapatan yang lebih baik. Hingga saat ini pendapatan dari simpan pinjam sudah mencapai angka 3 Juta Rupiah dan Molen sudah 1 jutaan.	Strength (kekuatan)
		<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	Pada umumnya BUMDes di Pamboang belum ada yang berkembang secara signifikan, karena dalam pengelolaannya masih memerlukan bimbingan. Usaha-usaha yang dibentuk oleh BUMDes di Kecamatan Pamboang khususnya sebagian besar belum tepat sasaran, beberapa potensi utamanya belum disentuh dan dikembangkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa BUMDes sampai saat ini belum berada pada posisi yang menguntungkan.	Weakness (kelemahan)
4.	Bagaimana Kompetensi Pengelola ?	<i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i>	Kami masih butuh pembinaan dengan cara didampingi pak. Kemampuan dan pengetahuan kami masih terbatas.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i>	Kemampuan dan pengetahuan kami terbatas pak untuk menjalankan BUMDes ini, apalagi saya bukan sarjana..hanya lulusan SMA. Sekretaris saya orang yang sementara kuliah, begitu juga dengan bendahara.	Weakness (kelemahan)

		<i>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).</i>	Ketua BUMDes itu punya toko Handphone di pinggir jalan besar. Selain itu dia juga berpendidikan sarjana strata satu. Sudah pernah kami ikutkan dalam pelatihan BUMDes di Kantor DPMD Kabupaten Majene. Jadi setidaknya dia punya pengalaman dalam membangun usaha. Begitu juga dengan sekretaris dan bendaharanya, masing-masing tingkat pendidikannya sarjana S1.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).</i>	Itulah Pak yang menjadi masalah kami di sini. Kemampuan dan pengetahuan kami terbatas untuk mengembangkan BUMDes ditambah dengan kekurangan SDM Desa.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</i>	Keterbatasan SDM dengan kemampuan pengelolaan yang baik cukup menyulitkan kami dalam menambah personil BUMDes. Kemampuan pengelola saat ini masih sangat memerlukan pembimbingan.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).</i>	Kemampuan mengelola kami memang masih sangat kurang, masih butuh bimbingan dan pelatihan yang lebih. SDM di desa ini banyak, tapi apakah mereka mau ikut terjun membantu mengembangkan BUMDes ini tanpa ada gaji perbulannya..?.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</i>	Semuanya kembali kepada pemerintah desa yang mendirikan BUMDes ini. Kami selaku pengelola BUMDes yang baru terpilih, yang baru sekali mengikuti pelatihan. Masih bingung bagaimana harus memulai. Pikiran kami masih terfokus ke anggaran operasional yang terbatas. Apalagi kalau kita ingin memberdayakan masyarakat yang jelas butuh biaya untuk itu.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	Kami menyadari betul akan kesulitan penganggaran dan kemampuan SDM yang dialami oleh BUMDes di Kabupaten Majene. Namun kami juga belum mampu berbuat dikarenakan anggaran di alokasikan kepada kami itu sangat minim dalam hal pembinaan dan fasilitasi.	Weakness (kelemahan)
5.	<i>Bagaimana aktivitas sepanjang tahun ?</i>	<i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i>	Kegiatan rutin yang kami kerja itu hanya pencatatan dan penagihan pada masyarakat, itupun setelah penagihan.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo</i>	Apa na niua pak. apa' belum ada yang bisa kami kerjakan. Biaya	Weakness (kelemahan)

		<i>(Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i>	operasional belum ada yang diberikan kepada kami.	
		<i>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).</i>	Kami masih melengkapi fasilitas pekerjaan BUMDes. Untuk sementara, penyertaan modal belum ada.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).</i>	Sementara ini, kami masih menggali potensi yang bisa garap. Kegiatan pencatatan masih nihil.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</i>	Untuk sementara ini, kami masih melayani kebutuhan bensin nelayan yang akan ke laut mencari ikan. Jadi nelayan kami, tidak perlu sudah-susah mencari bensin ke sana ke mari, BUMDes yang menyediakan.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).</i>	Kegiatan BUMDes selama ini mempersiapkan kebutuhan unit usaha, seperti usaha penggemukan sapi yang membutuhkan garam dan obat-obatan dalam perawatannya setiap bulan sampai sapi tersebut laku terjual jelang hari raya idul adha nanti. Setiap biaya yang dikeluarkan tercatat sebagai biaya operasional penggemukan sapi. Begitu juga dengan penyewaan Molen, semua biaya yang dikeluarkan dicatat sebagai biaya operasional yang diambil dari persediaan kas. Molen ini bisa dibilang, jarang istirahat, karena pekerjaan pembangunan aktif dilaksanakan.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</i>	Karena kami masih dalam tahap penyesuaian, sehingga usaha yang ada yang kami jalankan. Aktivitas usaha simpan pinjam masyarakat rutin dijalankan setiap bulan ketika penagihan.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	Kami di DPMD jarang melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional BUMDes di desa-desa. Jadi, kami hanya menyimpulkan aktivitas mereka jalan jika mendapatkan penghasilan asli desa.	Weakness (kelemahan)
6.	<i>Bagaimana ketersediaan SDM ?</i>	<i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i>	Kami masih sangat kekurangan orang untuk menjalankan usaha.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo</i>	Kalau fasilitas BUMDes sudah terbangun, seperti kantor dan	Opportunities

		<i>Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i>	GOR, orang yang akan mengelola sudah siap nantinya, tinggal diberi pembinaan.	(peluang)
		<i>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).</i>	Kami sementara menyiapkan orang-orang yang akan mengelola unit-unit usaha. Beberapa barang sudah kami produksi melalui masyarakat. Tinggal bagaimana pemasarannya	Strenght (kekuatan)
		<i>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).</i>	Orang yang mengurus usaha TV Kabel kami adalah orang-orang yang berpengalaman. Untuk unit usaha lainnya masih kita jajaki potensinya begitu juga dengan potensi orang-orangnya.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</i>	Berbicara mengenai ketersediaan SDM yang akan mengelola jalannya operasional BUMDes, terus terang itulah kesulitan kami. Pemerintah Desa kurang melakukan pembinaan kepada masyarakat.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).</i>	Berbicara SDM di Desa Tinambung cukup banyak, namun perlu dilakukan pembinaan. Ketersediaan SDM merupakan wewenang Pemerintah Desa.	Opportunities (peluang)
		<i>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</i>	SDM kami di Desa Bababulo cukup banyak. Cuma kondisi perpolitikan di Desa ini suhunya cukup tinggi, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan proses penjajakan terhadap SDM yang berkualitas.	Threat (ancaman)
		<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	Setiap tahun selalu diadakan pendidikan dan pelatihan bagaimana mengelola BUMDes. Namun kami akui kalau tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena diselenggarakan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini merupakan kegiatan aspirasi anggota dewan.	Threat (ancaman)
	<i>Bagaimana rangkaian kegiatan di BUMDes ? Apa yang dihasilkan dari rangkaian pekerjaan yang telah dilakukan oleh</i>	<i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i>	Karena masih dua unit usaha simpan pinjam dan penyewaan molen, maka ketika ada orang yang meminjam uang, kami juga melihat orangnya, maksudnya orang yang bisa dipercaya. Umumnya masih kerabat dekat dan bukan orang lain bagi kami.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21</i>	Kegiatan operasional di BUMDes kami terus terang belum ada, karena masih dalam perencanaan dan penyiapan fasilitas untuk	Weakness (kelemahan)

BUMDesa ?	Januari 2019).	dikelola nantinya.	
	(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).	Pemerintah desa menyiapkan sarana dan prasarana, lalu BUMDesa yang menjalankan Usahanya, seperti usaha TV Kabel yang kami maksud. Tiga orang pelaksana operasional BUMDes telah mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes di kantor PMD Kabupaten Majene di tahun 2018. Kegiatan rutin pelaksana operasional selama ini membukukan keluar masuknya uang di kas BUMDes. Usaha TV Kabel ini masih terus kami kembangkan, hingga saat ini masih dalam tahap sosialisasi ke rumah-rumah warga sekaligus pemasangan jaringan kabel televisi. Rencananya kami lakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan anggaran kas BUMDes.	Strenght (kekuatan)
	(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).	Belum banyak yang bisa kami lakukan dalam pengembangan BUMDes ini.	Weakness (kelemahan)
	(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).	Belajar dari orang yang punya pengalaman mengelola usaha. Menjual barang-barang campuran sudah pernah kami lakukan, tapi warga protes karena merasa tersaingi dengan usaha BUMDes. Jadi setahun terakhir ini, pemerintah desa membangunkan kami gedung kantor yang letaknya berhadapan dengan sekolah menengah pertama. Nanti akan dibuat pappoto copiang (usaha fotocopy) dan jualan ATK (Alat Tulis Kantor).	Threat (ancaman)
	(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).	Beberapa Pengurus BUMDes telah mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Majene. Sejak kepengurusan baru terbentuk, selalu diadakan pertemuan dan diskusi diantara sesama pengurus terkait perkembangan BUMDes, baik melalui pertemuan khusus, maupun lewat media WA (WhatsApp). Namun untuk aktivitas sehari-hari, belum ada perencanaan. Karena kondisi keuangan yang belum stabil, belum dapat menawarkan pendapatan bulanan kepada pengurus dan pengelola unit usaha. Kami memiliki Unit usaha Even Organizer dan Tim Penggerak PKK Desa, yang cukup antusias	Strenght (kekuatan)

			<p>melaksanakan kegiatan selama setahun terakhir. Warga masyarakat yang terlibat mulai memahami peranan BUMDes di desa Tinambung. Kami sudah merencanakan untuk mengadakan pelatihan khusus tentang penyusunan rencana usaha buat warga masyarakat yang disponsori oleh Pemerintah Desa dan diselenggarakan oleh BUMDes sebagai pihak yang akan memfasilitasi tindak lanjut dari rencana usaha dari warga masyarakat. Walaupun hingga saat ini, BUMDes belum mampu memberikan PADes (Pendapatan Asli Desa) buat desa, namun setidaknya sudah ada usaha yang kami lakukan dan sementara berjalan, meskipun belum maksimal.</p>	
		<p>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</p>	<p>Hingga saat ini, aktivitas simpan pinjam nasabah di BUMDes masih menggunakan aplikasi sederhana dengan jumlah nasabah tersisa 15 (lima belas) orang dari 35 orang peminjam. Rata-rata peminjaman pada kisaran 500 Ribu Rupiah per orang. Prosesnya peminjamannya sederhana, yaitu peminjam datang ke kami mengajukan permohonan pinjaman lalu diberikan sesuai apa yang mereka ajukan yang tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Penyewaan molen juga sederhana, penyewa datang ke pengelola yaitu aparat pemerintah desa dan langsung meminjam barang tersebut tanpa ada perjanjian tertulis.</p>	<p>Strenght (kekuatan)</p>
		<p>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</p>	<p>Kami melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa sekali setahun, karena keterbatasan anggaran. Jadi, data yang bisa kami himpun itu setahun sekali. Namun yang kami ketahui bahwa aktivitas BUMDes khususnya di Pamboang berjalan sangat lambat, meskipun telah pernah mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan. Ya itu tadi. Bagaimana mereka mau bekerja dengan baik, sedangkan penghasilan yang didapatkan dari bekerja di BUMDes tidak jelas. Kalau diperhatikan selama ini, belum pernah pemerintah desa khususnya di Pamboang, mengadakan kegiatan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes. Kamipun di Pemerintah Daerah, belum pernah mengadakan itu.</p>	<p>Weakness (kelemahan)</p>

			Namun, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa yang diwakili oleh Balai Latihan Masyarakat perwakilan Makassar, sudah sering melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengelolaan BUMDes. Bahkan setiap tahun kurang lebih sejak 3 tahun terakhir.	Strenght (kekuatan)
			Yang kami ketahui adalah bahwa BUMDes kesulitan dalam mencari SDM yang bisa membantu mengembangkan usahanya. Hal itu dikarenakan bekerja di BUMDes merupakan pekerjaan sosial. BUMDes hingga saat ini bukanlah tempat yang menarik untuk bekerja mendapatkan uang.	Threat (ancaman)
			Nah, jikalau Pemerintah Desa mau berbesar hati untuk belajar bagaimana mengembangkan BUMDes-nya, kami yakin mereka bisa berkembang. Kami menilai, pemerintah desa belum bisa ikhlas menyertakan dananya untuk dikelola BUMDes. Kalau konsep kinerja mampu diserap oleh pemerintah desa, berarti semua dapat terukur. Namun melihat situasi dan kondisi desa yang minim SDM, kecil kemungkinan kinerja dapat berjalan dengan baik.	Opportunities (peluang)
	<p><i>Bagaimana pemanfaatan sumber daya di BUMDes. Apakah aktivitas pengelolaan di BUMDes menggunakan potensi desa ? dan bagaimana cara/proses menggunakan potensi itu ? Apakah ada prosedur penggunaan sumber</i></p>	<p><i>(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).</i></p>	Selama ini, BUMDes berjalan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan kami. Belum ada cara-cara khusus yang dapat kami lakukan. Kami juga sebenarnya masih bingung bagaimana memanfaatkan potensi desa yang ada. Hingga saat ini, pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan BUMDes sangat jarang dilakukan di desa. Kalau diperhatikan, banyak-banyak perencanaan terbentur pada persoalan anggaran. Apalagi, kami di BUMDes tidak mendapatkan gaji hanya pembagian sisa hasil usaha. Itupun nanti pada akhir tahun berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.	Weakness (kelemahan)
		<p><i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i></p>	Belum ada pak. Selama ini juga kami terpilih sebagai pengurus, itupun berdasarkan penunjukan, bukan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan BUMDes kalau mau dijalankan.	Weakness (kelemahan)
		<p><i>(Darmansyah, Ketua BUMDes</i></p>	Secara umum, aktivitas pengelolaan di BUMDes kami masih	Weakness (kelemahan)

	<i>daya yang ada ?</i>	Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).	menggunakan metode kekerabatan atau kekeluargaan. Pemanfaatan potensi desa masih berdasarkan kebutuhan masyarakat secara umum yaitu uang. Adapun Molen yang merupakan aset desa dimanfaatkan dan dikelola oleh kami, itupun masih menggunakan personil dari pemerintah desa sebagai koordinatonya.	
		<i>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019)</i>	Kami menggunakan warga masyarakat yang punya kemampuan dibidang teknis TV Kabel seperti memasang bentangan kabel yang tersambung ke rumah-rumah warga. Kami memilih orang yang dianggap mampu mengelola usaha, tapi tetap melalui musyawarah yang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan para kepala dusun. Pelaksana operasional terpilih yang namanya telah dicantumkan di SK penetapan pengurus merupakan para sarjana strata satu. Karena unit usaha ini masih baru, belum ada cara-cara khusus yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja. Namun akan kami usahakan pada saatnya nanti.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).</i>	Waktu itu di tahun 2016, kami menganggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk BUMDes, namun tidak habis terpakai, karena sebagian dana dipakai untuk membangun kantor operasional BUMDes Al Baroqah yang saat ini pembangunannya sudah mencapai sekitar 50%. In Syaa Allah, tahun ini 2019 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk mengembangkan usaha BUMDes. <i>Sicco dzuai barang nialli, apa' sangga' ni cowai di'ee</i> (masih sedikit barang yang kami beli, karena masih dalam tahap percobaan). Berusaha <i>mi tau</i> (pengurus BUMDes) <i>cappu dibaluang</i> (menjual habis barang) dengan cara (<i>niantarrangi ni boyanna se'iya</i>) mengantar pesanan ke rumah-rumah warga yang rumahnya punya tempat penjualan. Dicoba mengajak beberapa warga untuk ikut terlibat dalam menjual barang campurannya BUMDes, tapi kayaknya belum maksimal. Karena dikasi' sama (jalan beriringan) dengan sosialisasi.	Strenght (kekuatan)

		<i>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</i>	Belajar dari orang yang punya pengalaman mengelola usaha. Yang kami lakukan selama ini membeli ikan hasil tangkapan nelayan atau menukar dengan bahan bakar bensin. Kami berusaha mencari dan melihat potensi warga yang bisa diajak kerjasama membuka unit usaha. Ada beberapa remaja yang sudah tamat dari sekolah menengah atas, yang kami coba dekati. Masih dalam proses perekrutan kalau bisa dibilang begitu. Karena anak-anak SMA sekarang, pada umumnya sudah mampu mengoperasikan komputer dan internet. Yah, desa ini kan (<i>andangi karao wega</i>) tidak jauh dari kota kecamatan, sehingga hal-hal yang berbaur modern sudah mulai terbiasa di desa ini. Komputer dan Internet pada anak-anak remaja seusia SMA sudah bukan hal yang luar biasa bagi mereka. Oleh karena itu, direncanakan akan melakukan pemetaan potensi desa.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).</i>	Sudah ada wacana membuat rencana kinerja, namun masih perlu meminta pertimbangan dari pengurus dan warga, agar perencanaan kinerja ini bisa berjalan lebih baik. Beberapa kebijakan yang berproses dalam pemberdayaan masyarakat, rencananya akan diimplementasikan setelah proposal unit usaha	Opportunities (peluang)
			telah disosialisasikan dan diajarkan kepada warga masyarakat. Kami belum menyusun kegiatan rutin bagi pengurus dan bagi pengelola unit usaha lainnya. Hasil terbaik yang telah kami lakukan selama ini adalah telah berhasil membentuk dan mendirikan BUMDes, menciptakan peluang usaha peternakan sapi yang dikelola oleh masyarakat, telah berhasil membeli mesin pengaduk semen, dan telah berhasil membentuk event organizer dengan kegiatan pertama yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan turnamen sepak bola antar klub. Dengan besaran nilai penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar Rp. 50.000.000,-, kami telah menciptakan tiga unit usaha yang dijalankan oleh warga masyarakat.	Strenght (kekuatan)
		<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi</i>	Dari hasil monitoring yang kami laksanakan di tahun 2018, terlihat sejumlah aktivitas BUMDes di kantor Desa memberikan	Strenght (kekuatan)

		<i>Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	penjelasan kepada warga masyarakat untuk bisa terlibat dalam pengelolaan BUMDes.	
<p>Bagaimana pengendalian sumberdaya untuk mencapai tujuan ? Apakah ada aktivitas pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi berdasarkan rencana yang sudah tersusun dan disepakati sebelumnya ? Jikalau ada, apakah aktivitas pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi berdasarkan rencana yang sudah tersusun dan disepakati sebelumnya, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan ? Apakah aktivitas tersebut, dapat</p>		<i>.(Syarifuddin, Ketua BUMDes Sumaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019)</i>	Biasa ji ada Pak. Kami selalu ji perhatikan sama kepala Desa. Bahkan terkadang kami sering mendapat perintah dari Kepala Desa untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan BUMDes. Proses simpan pinjam berjalan dengan cara sederhana. Masyarakat datang mengajukan pinjaman, karena orangnya sudah dikenal dan bisa dipercaya, maka kami di BUMDes meminjamkan. Belum ada yang seperti Bapak bilang kajian kelayakan pemberian pinjaman. Karena berdasarkan kekeluargaan.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).</i>	Yah...karena belum ada modal operasional, maka kami belum bisa menjalankan usaha. Belum ada kesepakatan yang dihasilkan tentang bagaimana pengelolaan Gedung Olah Raga (GOR) itu nantinya. Kepala Desa juga belum menentukan orang-orangnya siapa yang akan mengurus GOR itu nantinya.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).</i>	Terus terang, kami masih tahap mempelajari segala kemungkinan yang akan datang, namun sudah didiskusikan bersama kepala desa dan pengawas mengenai pengendalian kegiatan unit usaha. Kami berusaha berbuat sebisa mungkin mengontrol penggemukan sapi, penyewaan molen dan Even Organizer.	Opportunities (peluang)
		<i>(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).</i>	Usaha pengendalian kami terhadap BUMDes masih tergolong sederhana, karena usaha belum banyak, masih satu unit seperti penyediaan bahan bakar bensin untuk nelayan.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Haidir, Ketua BUMDesa Al Buroqah, 28 Januari 2019).</i>	Saat ini unit usaha dihentikan dahulu hingga kantor BUMDes selesai dikerjakan.	Weakness (kelemahan)
		<i>(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).</i>	Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam di BUMDes kami cenderung sangat sederhana pengelolaannya, karena masih menggunakan hubungan kekerabatan. Karena tidak sembarang orang yang kami	Weakness (kelemahan)

<i>berfungsi secara maksimal ?</i>		berikan pinjaman. Standard peminjaman belum menggunakan metode yang secara umum dilakukan seperti layaknya lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Namun begitu, unit simpan pinjam ini masih berjalan sampai sekarang. Begitujuga dengan mesin Molen.	
	<i>(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).</i>	Ada, tapi tidak selalu, itupun sifatnya tidak resmi. Tidak melalui rapat-rapat.	Weakness (kelemahan)
	<i>(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).</i>	Berdasarkan permendes, pengelolaan Pemerintah Desa dan BUMDes itu terpisah secara struktural. Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan BUMDes dalam melaksanakan kegiatan unit usahanya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa BUMDes di Kecamatan Pamboang memperlihatkan keseriusannya dalam membangun organisasinya.	Strenght (kekuatan)
		Namun untuk penyusunan rencana kinerja, hingga saat ini belum ada laporan kalau ada BUMDes yang menerapkan. Paling tidak untuk saat ini, kami cukup puas melihat BUMDes mulai bangkit merekonstruksi kembali kepengurusannya.	Weakness (kelemahan)



Tujuan Penelitian : Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pamboang Kab. Majene

Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDes	Indikator Pengelolaan BUMDes
1. Kegiatan Menambah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan ; 2. Pelatihan harus dilaksanakan Organisasi ; 3. Dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan.	1. Rangkaian kegiatan ; 2. Pemanfaatan semua sumber daya ; 3. Mencapai tujuan.

MATRIKS SWOT BERDASARKAN HASIL WAWANCARA

Responden	FAKTOR INTERNAL BUMDES	FAKTOR EKSTERNAL BUMDES
	KEKUATAN	PELUANG
1. Kepala Desa Desa Bonde Utara	1. Beberapa alat-alat telah kami beli. Sementara ini yang sudah jalan unit usaha TV Kabel. Di tahun 2018 telah diinvestasikan dana sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Berikutnya di tahun 2019 telah dialokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes Marendeng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan dan pengelolaan Pabrik Es. Karena warga di Desa ini lebih didominasi oleh nelayan. 2. Usaha pembuatan sarung sutera mandar dengan menggunakan alat Panette (alat penenun) yang saat ini dijadikan binaan oleh Pemerintah Daerah. 3. Kami di sini sementara mempersiapkan unit usaha TV Kabel. Untuk sementara kami mempekerjakan empat orang tenaga untuk memasang dan membentangkan	1. direncanakan pengembangannya nanti untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Namun itu masih dalam tahap persiapan. Sudah ada perencanaan, namun belum diurai secara berjangka. 2. Untuk unit usaha lainnya masih kita jajaki potensinya begitu juga dengan potensi orang-orangnya.

	<p>kabel-kabel untuk dipergunakan warga nantinya untuk berlangganan TV Kabel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua BUMDes itu punya toko Handphone di pinggir jalan besar. Selain itu dia juga berpendidikan sarjana strata satu. Sudah pernah kami ikutkan dalam pelatihan BUMDes di Kantor DPMD Kabupaten Majene. Jadi setidaknya dia punya pengalaman dalam membangun usaha. Begitu juga dengan sekretaris dan bendaharanya, masing-masing tingkat pendidikannya sarjana S1. 5. Orang yang mengurus usaha TV Kabel kami adalah orang-orang yang berpengalaman. 6. Pemerintah desa menyiapkan sarana dan prasarana, lalu BUMDesa yang menjalankan Usahanya, seperti usaha TV Kabel yang kami maksud. Tiga orang pelaksana operasional BUMDes telah mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes di kantor PMD Kabupaten Majene di tahun 2018. Kegiatan rutin pelaksana operasional selama ini membukukan keluar masuknya uang di kas BUMDes. Usaha TV Kabel ini masih terus kami kembangkan, hingga saat ini masih dalam tahap sosialisasi ke rumah-rumah warga sekaligus pemasangan jaringan kabel televisi. Rencananya kami lakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan anggaran kas BUMDes. 7. Kami menggunakan warga masyarakat yang punya kemampuan dibidang teknis TV Kabel seperti memasang bentangan kabel yang tersambung ke 	
--	---	--

	<p>rumah-rumah warga. Kami memilih orang yang dianggap mampu mengelola usaha, tapi tetap melalui musyawarah yang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan para kepala dusun. Pelaksana operasional terpilih yang namanya telah dicantumkan di SK penetapan pengurus merupakan para sarjana strata satu.</p>	
<p>2. Ketua BUMDes Desa Bababulo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Namun untuk sementara ini hanya ada dua unit usaha yang aktif, yaitu Simpan Pinjam dan Penyewasaan Molen (mesin pengaduk semen). 2. Modal sebesar 25 Juta Rupiah dari Pemerintah Desa. 3. Hingga saat ini pendapatan dari simpan pinjam sudah mencapai angka 3 Juta Rupiah dan Molen sudah 1 jutaan. 4. Karena kami masih dalam tahap penyesuaian, sehingga usaha yang ada yang kami jalankan. Aktivitas usaha simpan pinjam masyarakat rutin dijalankan setiap bulan ketika penagihan. 5. SDM kami di Desa Bababulo cukup banyak. 6. Hingga saat ini, aktivitas simpan pinjam nasabah di BUMDes masih menggunakan aplikasi sederhana dengan jumlah nasabah tersisa 15 (lima belas) orang dari 35 orang peminjam. Rata-rata peminjaman pada kisaran 500 Ribu Rupiah per orang. Prosesnya peminjamannya sederhana, yaitu peminjam datang ke kami mengajukan permohonan pinjaman lalu diberikan sesuai apa yang mereka ajukan yang tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Penyewaan molen juga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Rencana BUMDes Bannang Pute berdasarkan dua pilihan, yaitu apa yang penting, dan apa yang mendesak. Dalam program kerja kami, ada lima bidang usaha yang masuk dalam potensi kami, yaitu Pariwisata, Barang dan Jasa, Home Industri, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. 2. Lalu kami memiliki rencana untuk membangun Rest Area yang nantinya akan bermitra dengan masyarakat. 3. Pada Musrembang tahun 2019 ini dimana akan dibahas Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun 2020 mendatang, kami akan mengajukan lagi pinjaman modal kepada Pemerintah Desa Bababulo sebesar 50 Juta Rupiah

	<p>sederhana, penyewa datang ke pengelola yaitu aparat pemerintah desa dan langsung meminjam barang tersebut tanpa ada perjanjian tertulis.</p>	
7. Sekretaris BUMDes Desa Tinambung	<ol style="list-style-type: none"> 1. aku terjual jelang hari raya idul adha nanti. Setiap biaya yang dikeluarkan tercatat sebagai biaya operasional penggemukan sapi. Begitu juga dengan penyewaan Molen, semua biaya yang dikeluarkan dicatat sebagai biaya operasional yang diambil dari persediaan kas. Molen ini bisa dibilang, jarang istirahat, karena pekerjaan pembangunan aktif dilaksanakan. 2. Beberapa Pengurus BUMDes telah mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Majene. Sejak kepengurusan baru terbentuk, selalu diadakan pertemuan dan diskusi diantara sesama pengurus terkait perkembangan BUMDes, baik melalui pertemuan khusus, maupun lewat media WA (WhatsAp). 3. Namun untuk. Kami memiliki Unit usaha Even Organizer dan Tim Penggerak PKK Desa, yang cukup antusias melaksanakan kegiatan selama setahun terakhir. Warga masyarakat yang terlibat mulai memahami peranan BUMDes di desa Tinambung. 4. Hasil terbaik yang telah kami lakukan selama ini adalah telah berhasil membentuk dan mendirikan BUMDes, menciptakan peluang usaha peternakan sapi yang dikelola oleh masyarakat, telah berhasil membeli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berikutnya kami menargetkan usaha Jual Beli Semen dengan jumlah yang banyak. Sudah ada orang yang diserahkan tugas untuk menelusuri seluk beluk usaha ini. Jual beli Semen ini merupakan alternatif utama, dan yang kedua adalah Usaha TV Kabel. Distributor LPG sempat kami wacanakan karena sangat potensial, namun karena diperkirakan prosesnya panjang dan lama, akhirnya kami menundanya. 2. Unit Usaha Even Organizer sementara dibentuk, dan pengembangannya nanti akan menyelenggarakan tournament sepak bola, dan beberapa kegiatan-kegiatan besar lainnya. 3. Unit usaha distributor semen, TV Kabel, dan distributor tabung gas LPG merupakan rencana besar kami, jika salah satunya sudah terwujud, kami merasa sudah berada pada posisi aman pertama. 4. Berbicara SDM di Desa Tinambung cukup banyak, namun perlu dilakukan pembinaan. Ketersediaan SDM merupakan wewenang Pemerintah Desa. 5. Kami sudah merencanakan untuk mengadakan pelatihan khusus tentang penyusunan rencana usaha buat warga masyarakat yang disponsori

	<p>mesin pengaduk semen, dan telah berhasil membentuk event organizer dengan kegiatan pertama yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan turnamen sepak bola antar klub. Dengan besaran nilai penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar Rp. 50.000.000,-, kami telah menciptakan tiga unit usaha yang dijalankan oleh warga masyarakat.</p> <p>5. Terus terang, kami masih tahap mempelajari segala kemungkinan yang akan datang, namun sudah didiskusikan bersama kepala desa dan pengawas mengenai pengendalian kegiatan unit usaha. Kami berusaha berbuat sebisa mungkin mengontrol penggemukan sapi, penyewaan molen dan Even Organizer.</p>	<p>oleh Pemerintah Desa dan diselenggarakan oleh BUMDes sebagai pihak yang akan memfasilitasi tindak lanjut dari rencana usaha dari warga masyarakat. Walaupun hingga saat ini, BUMDes belum mampu memberikan PADes (Pendapatan Asli Desa) buat desa, namun setidaknya sudah ada usaha yang kami lakukan dan sementara berjalan, meskipun belum maksimal.</p> <p>6. Sudah ada wacana membuat rencana kinerja, namun masih perlu meminta pertimbangan dari pengurus dan warga, agar perencanaan kinerja ini bisa berjalan lebih baik. Beberapa kebijakan yang berproses dalam pemberdayaan masyarakat, rencananya akan diimplementasikan setelah proposal unit usaha telah disosialisasikan dan diajarkan kepada warga masyarakat.</p>
8. Ketua BUMDes Desa Betteng	<p>1. Sementara ini unit usaha yang sementara berjalan adalah usaha simpan dan pinjam dan penyewaan Molen.</p> <p>2. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa Betteng masih sangat sedikit, itupun juga diperuntukkan untuk usaha simpan pinjam, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Pengelolaannya masih sangat sederhana dengan besar pinjaman maksimal satu juta rupiah yang dikelola oleh satu orang. Jumlah peminjamnya tidak lebih dari 15 orang. Sedangkan molen, hingga saat ini hanya disewa oleh pemerintah Desa dan masyarakat desa dan belum pernah disewa oleh masyarakat di luar desa.</p>	<p>1. berencana membuat Gudang untuk tempat menampung Kemiri yang dikumpulkan oleh masyarakat desa. Karena di desa Betteng ini, pohon kemiri sangat banyak disini. Hasilnya pun berlimpah, namun pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini masih menggunakan cara-cara lama yang dilakukan secara turun temurun. Untuk sementara ini sebelum Gudang terbangun, kami juga berencana mengembangkan desa wisata yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa.</p>

	<p>3. Terus terang kami belum berfikir sampai ke tahap itu, yang jelas proses perencanaan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana desa wisata yang menjadi fokus kami.</p> <p>4. Karena masih dua unit usaha simpan pinjam dan penyewaan molen, maka ketika ada orang yang meminjam uang, kami juga melihat orangnya, maksudnya orang yang bisa dipercaya. Umumnya masih kerabat dekat dan bukan orang lain bagi kami.</p>	
9. Ketua BUMDes Desa Simbang	<p>1. Selain itu, sementara ini kami membangun gedung kantor BUMDes dan Gedung Olahraga dan sementara dalam tahap pembangunan. Pemerintah Desa fokus kepada pembangunan gedung, sehingga modal operasional usaha untuk BUMDes belum ada.</p> <p>2. Pemerintah Desa Simbang merencanakan anggaran pembangunan Gedung Kantor BUMDes dan Gedung Olahraga melalui dua tahap penganggaran selama dua tahun dengan biaya kalau tidak salah kurang lebih 800 juta rupiah lebih. Insyaa Allah pada semester dua di tahun 2019 ini sudah mulai dipergunakan dan dimanfaatkan. Gedung Olahraga ini akan memiliki dua lapangan yaitu lapangan futsal dan lapangan Bulutangkis atau Badminton. Ini akan disewakan kepada masyarakat desa Simbang dan dari luar Desa Simbang.</p>	<p>1. Melihat karena disini ada sekolah SMP dan SD, kami berencana membuka unit usaha fotocopy dan coba beternak ayam petelur.</p> <p>2. letak geografis Desa Simbang berada di daerah perbukitan wilayah Kecamatan Pamboang, strateginya adalah dengan membangun sebuah bangunan yang belum ada di wilayah kecamatan yaitu Lapangan Futsal. Dengan olahraga dapat menjalin hubungan silaturahmi antara masyarakat desa dan diluar desa. Jikalau Gedung Futsal sudah ada, maka akan menjadi alternatif olahraga selain sepakbola dan badminton yang akan berkembang di wilayah Kecamatan Pamboang, maka pendapatan desa akan mengalir dengan sendirinya.</p> <p>3. Kalau fasilitas BUMDes sudah terbangun, seperti kantor dan GOR, orang yang akan mengelola sudah siap nantinya, tinggal diberi pembinaan.</p>
10. Kepala Desa	<p>1. Untuk sementara ini, kami masih melayani kebutuhan</p>	<p>1. Ada rencana ke depan untuk mengembangkan</p>

<p>Pesuloang</p>	<p>bensin nelayan yang akan ke laut mencari ikan. Jadi nelayan kami, tidak perlu sudah-susah mencari bensin ke sana ke mari, BUMDes yang menyediakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belajar dari orang yang punya pengalaman mengelola usaha. Yang kami lakukan selama ini membeli ikan hasil tangkapan nelayan atau menukar dengan bahan bakar bensin. Kami berusaha mencari dan melihat potensi warga yang bisa diajak kerjasama membuka unit usaha. 3. Usaha pengendalian kami terhadap BUMDes masih tergolong sederhana, karena usaha belum banyak, masih satu unit seperti penyediaan bahan bakar bensin untuk nelayan. 	<p>usaha foto copy di desa ini, mumpung ada warga masyarakat yang mengerti dan bisa mengutak-atik mesin foto copy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. dibutuhkan semacam pelatihan atau mungkin lebih tepatnya dibimbing secara terus menerus hingga mahir. Memang ada semacam materi tentang BUMDes yang disampaikan dan disarankan kepada kami untuk dipelajari oleh pendamping desa, tapi kami tidak paham, mungkin karena kemampuan memahami kami masih sangat kurang, sehingga sampai saat ini kami malas untuk mempelajari. 3. Ada beberapa remaja yang sudah tamat dari sekolah menengah atas, yang kami coba dekati. Masih dalam proses perekrutan kalau bisa dibilang begitu. Karena anak-anak SMA sekarang, pada umumnya sudah mampu mengoperasikan komputer dan internet. Yah, desa ini kan (<i>andangi karao wega</i>) tidak jauh dari kota kecamatan, sehingga hal-hal yang berbaur modern sudah mulai terbiasa di desa ini. Komputer dan Internet pada anak-anak remaja seusia SMA sudah bukan hal yang luar biasa bagi mereka. Oleh karena itu, direncanakan akan melakukan pemetaan potensi desa.
------------------	--	--

<p>11. Ketua BUMDes Desa Adolang Dhua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami sementara menyiapkan orang-orang yang akan mengelola unit-unit usaha. Beberapa barang sudah kami produksi melalui masyarakat. 2. Waktu itu di tahun 2016, kami menganggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk BUMDes, namun tidak habis terpakai, karena sebagian dana dipakai untuk membangun kantor operasional BUMDes Al Baroqah yang saat ini pembangunannya sudah mencapai sekitar 50%. In Syaa Allah, tahun ini 2019 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk mengembangkan usaha BUMDes. 3. <i>Sicco dzuai barang nialli, apa' sangga' ni cowai di'ee</i> (masih sedikit barang yang kami beli, karena masih dalam tahap percobaan). Berusaha <i>mi tau</i> (pengurus BUMDes) <i>cappu dibaluang</i> (menjual habis barang) dengan cara (<i>niantarrangi ni boyanna se'iya</i>) mengantar pesanan ke rumah-rumah warga yang rumahnya punya tempat penjualan. Dicoba mengajak beberapa warga untuk ikut terlibat dalam menjual barang campurannya 4. BUMDes, tapi kayaknya belum maksimal. Karena dikasi' sama (jalan beriringan) dengan sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami rencananya akan membuka unit usaha foto copy dan menjual alat tulis kantor. Berikutnya akan direncanakan membuat usaha ayam petelur dan jual beli air gallon. 2. Jadi setahun terakhir ini, pemerintah desa membangun kami gedung kantor yang letaknya berhadapan dengan sekolah menengah pertama. Nanti akan dibuat pappoto copiang (usaha fotocopy) dan jualan ATK (Alat Tulis Kantor).
---	---	--

<p>Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene</p>	<p>Dari 13 BUMDes di kecamatan Pamboang, hanya ada enam yang aktif hingga saat ini. Yakni BUMDes di Desa Bababulo, Desa Adolang Dhua, Desa Banua Adolang, Desa Bonde, Desa Bonde Utara, dan Desa Tinambung. Penyertaan modalnya di atas Rp. 50 Juta. Dominan mereka menggunakan tenaga-tenaga lokal desa. Memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Desa seperti kendaraan dan gedung. Karena yang direkrut sebagai pengurus BUMDes rata-rata memiliki Laptop. Dari hasil monitoring yang kami laksanakan di tahun 2018, terlihat sejumlah aktivitas BUMDes di kantor Desa memberikan penjelasan kepada warga masyarakat untuk bisa terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Berdasarkan permendes, pengelolaan Pemerintah Desa dan BUMDes itu terpisah secara struktural. Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan BUMDes dalam melaksanakan kegiatan unit usahanya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa BUMDes di Kecamatan Pamboang memperlihatkan keseriusannya dalam membangun organisasinya. Namun untuk penyusunan rencana kinerja, hingga saat ini belum ada laporan kalau ada BUMDes yang menerapkan. Paling tidak untuk saat ini, kami cukup puas melihat BUMDes mulai bangkit merekonstruksi kembali kepengurusannya.</p>	<p>Setiap tahun selalu diadakan pendidikan dan pelatihan bagaimana mengelola BUMDes. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa yang diwakili oleh Balai Latihan Masyarakat perwakilan Makassar, sudah sering melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengelolaan BUMDes. Bahkan setiap tahun kurang lebih sejak 3 tahun terakhir.</p>
--	---	--

	KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Kepala Desa Desa Bonde Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana berjangkanya sementara disusun oleh pengurus BUMDes, jadi dokumennya belum ada. 2. Kami masih melengkapi fasilitas pekerjaan BUMDes. Untuk sementara, penyertaan modal belum ada. 3. Karena unit usaha ini masih baru, belum ada cara-cara khusus yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja. Namun akan kami usahakan pada saatnya nanti. 4. Ada, tapi tidak selalu, itupun sifatnya tidak resmi. Tidak melalui rapat-rapat. 	Unit Usaha BUMDes Desa Tetangga yang sama.
2. Ketua BUMDes Desa Bababulo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pengelolaan unit Simpan Pinjam, saat ini masih dikelola oleh dua orang, yaitu Ketua BUMDes dan bendahara. 2. Hingga saat ini, meski kekurangan personil, kami masih aktif melakukan komunikasi ke Pemerintah Desa terkait kekurangan-kekurangan yang ada di internal BUMDes. Hingga saat ini, meski kekurangan personil, kami masih aktif melakukan komunikasi ke Pemerintah Desa terkait kekurangan-kekurangan yang ada di internal BUMDes. 3. Semuanya kembali kepada pemerintah desa yang mendirikan BUMDes ini. Kami selaku pengelola BUMDes yang baru terpilih, yang baru sekali mengikuti pelatihan. Masih bingung bagaimana harus memulai. Pikiran kami masih terfokus ke anggaran operasional yang terbatas. Apalagi kalau kita ingin memberdayakan masyarakat yang jelas butuh biaya 	Kondisi perpolitikan di Desa ini suhunya cukup tinggi, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan proses penajakan terhadap SDM yang berkualitas.

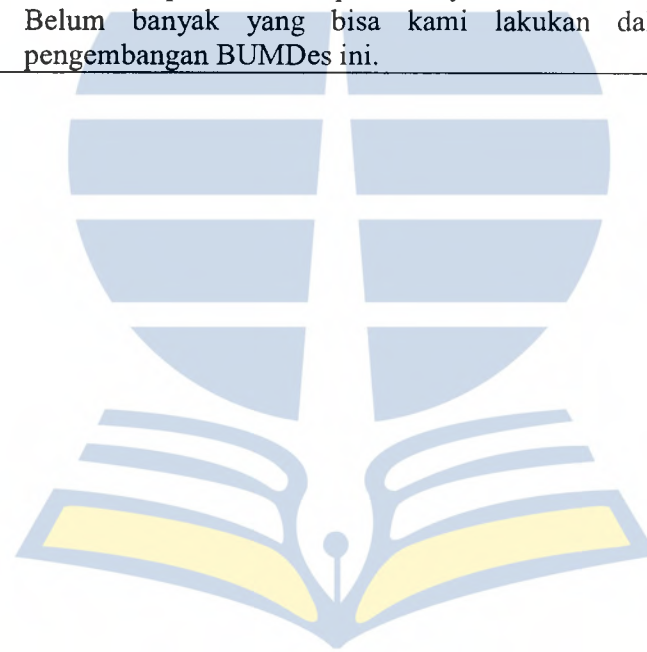
	<p>untuk itu.</p> <p>4. Prosesnya peminjamannya sederhana, yaitu peminjam datang ke kami mengajukan permohonan pinjaman lalu diberikan sesuai apa yang mereka ajukan yang tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Penyewaan molen juga sederhana, penyewa datang ke pengelola yaitu aparat pemerintah desa dan langsung meminjam barang tersebut tanpa ada perjanjian tertulis.</p> <p>5. Secara umum, aktivitas pengelolaan di BUMDes kami masih menggunakan metode kekerabatan atau kekeluargaan. Pemanfaatan potensi desa masih berdasarkan kebutuhan masyarakat secara umum yaitu uang. Adapun Molen yang merupakan aset desa dimanfaatkan dan dikelola oleh kami, itupun masih menggunakan personil dari pemerintah desa sebagai koordinatonya.</p> <p>6. Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam di BUMDes kami cenderung sangat sederhana pengelolaannya, karena masih menggunakan hubungan kekerabatan. Karena tidak sembarang orang yang kami berikan pinjaman. Standard peminjaman belum menggunakan metode yang secara umum dilakukan seperti layaknya lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Namun begitu, unit simpan pinjam ini masih berjalan sampai sekarang. Begitujuga dengan mesin Molen.</p>	
3. Sekretaris BUMDes Desa Tinambung	<p>1. Secara administratif, dokumen perencanaan BUMDes belum tersusun dengan baik dan secara berjangka.</p> <p>2. Kemampuan mengelola kami memang masih sangat</p>	<p>1. Kemampuan mengelola kami memang masih sangat kurang, masih butuh bimbingan dan pelatihan yang lebih. SDM di desa ini banyak, tapi</p>

	<p>kurang, masih butuh bimbingan dan pelatihan yang lebih. SDM di desa ini banyak, tapi apakah mereka mau ikut terjun membantu mengembangkan BUMDes ini tanpa ada gaji perbulannya..?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. aktivitas sehari-hari, belum ada perencanaan. 4. Karena kondisi keuangan yang belum stabil, belum dapat menawarkan pendapatan bulanan kepada pengurus dan pengelola unit usaha. 5. Kami belum menyusun kegiatan rutin bagi pengurus dan bagi pengelola unit usaha lainnya. 	<p>apakah mereka mau ikut terjun membantu mengembangkan BUMDes ini tanpa ada gaji perbulannya..?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Karena kondisi keuangan yang belum stabil, belum dapat menawarkan pendapatan bulanan kepada pengurus dan pengelola unit usaha.
<p>4. Ketua BUMDes Desa Betteng</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Molen inipun masih dikoordinir oleh pemerintah desa sendiri. 2. Kegiatan rutin yang kami kerja itu hanya pencatatan dan penagihan pada masyarakat, itupun setelah penagihan. 3. Kami masih sangat kekurangan orang untuk menjalankan usaha. 4. Karena masih dua unit usaha simpan pinjam dan penyewaan molen, maka ketika ada orang yang meminjam uang, kami juga melihat orangnya, maksudnya orang yang bisa dipercaya. Umumnya masih kerabat dekat dan bukan orang lain bagi kami. 5. Selama ini, BUMDes berjalan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan kami. Belum ada cara-cara khusus yang dapat kami lakukan. Kami juga sebenarnya masih bingung bagaimana memanfaatkan potensi desa yang ada. Hingga saat ini, pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan BUMDes sangat 	<p>Kami masih butuh pembinaan dengan cara didampingi pak. Kemampuan dan pengetahuan kami masih terbatas.</p>

	<p>jarang dilakukan di desa. Kalau diperhatikan, banyak-banyak perencanaan terbentur pada persoalan anggaran. Apalagi, kami di BUMDes tidak mendapatkan gaji hanya pembagian sisa hasil usaha. Itupun nanti pada akhir tahun berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p> <p>6. Biasa ji ada Pak. Kami selalu ji perhatikan sama kepala Desa. Bahkan terkadang kami sering mendapat perintah dari Kepala Desa untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan BUMDes. Proses simpan pinjam berjalan dengan cara sederhana. Masyarakat datang mengajukan pinjaman, karena orangnya sudah dikenal dan bisa dipercaya, maka kami di BUMDes meminjamkan. Belum ada yang seperti Bapak bilang kajian kelayakan pemberian pinjaman. Karena berdasarkan kekeluargaan.</p>	
<p>5. Ketua BUMDes Desa Simbang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan dan pengetahuan kami terbatas pak untuk menjalankan BUMDes ini, apalagi saya bukan sarjana..hanya lulusan SMA. Sekretaris saya orang yang sementara kuliah, begitu juga dengan bendahara. 2. Apa na niua pak, apa' belum ada yang bisa kami kerjakan. Biaya operasional belum ada yang diberikan kepada kami. 3. Kegiatan operasional di BUMDes kami terus terang belum ada, karena masih dalam perencanaan dan penyiapan fasilitas untuk dikelola nantinya. 4. Yah...karena belum ada modal operasional, maka kami belum bisa menjalankan usaha. Belum ada 	<p>Belum ada pak. Selama ini juga kami terpilih sebagai pengurus, itupun berdasarkan penunjukan, bukan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan BUMDes kalau mau dijalankan.</p>

	<p>kesepakatan yang dihasilkan tentang bagaimana pengelolaan Gedung Olah Raga (GOR) itu nantinya. Kepala Desa juga belum menentukan orang-orangnya siapa yang akan mengurus GOR itu nantinya.</p>	
<p>6. Kepala Desa Pesuloang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami rencana sebelumnya usaha semacam distributor barang kepada warga masyarakat. Berupa tabung gas yang dijual oleh BUMDes dengan harga distributor dan dijual eceran oleh masyarakat, namun proses pengurusan untuk menjadi pangkalan gas LPG masih sulit kami lakukan. 2. Perencanaan untuk usaha BUMDes masih sementara kami diskusikan dengan melihat apa yang menjadi potensi desa kami. 3. Kurangnya SDM di desa ini, membuat kami kesulitan mencari orang untuk dipekerjakan di BUMDes. Padahal kalau dilihat di desa ini banyak anak-anak muda dan remaja yang bisa dilatih, tapi itu butuh proses dalam mengajak mereka, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami sudah meng-SK-kan sejumlah warga untuk menjalankan BUMDes ini, namun cara mengelolanya belum dipahami oleh mereka. 4. Perencanaan BUMDes belum kami susun secara berjangka. 5. Kekhawatiran dalam menyertakan modal usaha ke BUMDes dalam jumlah besar. Kami tidak mau disoroti oleh Masyarakat. 6. Keterbatasan SDM dengan kemampuan pengelolaan 	<p>Kurangnya SDM di desa ini, membuat kami kesulitan mencari orang untuk dipekerjakan di BUMDes.</p>

	<p>yang baik cukup menyulitkan kami dalam menambah personil BUMDes. Kemampuan pengelola saat ini masih sangat memerlukan pembimbingan.</p> <p>7. Berbicara mengenai ketersediaan SDM yang akan mengelola jalannya operasional BUMDes, terus terang itulah kesulitan kami. Pemerintah Desa kurang melakukan pembinaan kepada masyarakat.</p> <p>8. Belum banyak yang bisa kami lakukan dalam pengembangan BUMDes ini.</p>	
--	--	--



<p>7. Ketua BUMDes Desa Adolang Dhua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMDes kami telah membuka unit usaha perdagangan dan masih jalan hingga saat ini, walaupun jalannya masih tersendat-sendat. Warga masyarakat sempat mengeluh karena merasa tersaingi dengan usaha perdagangan yang kami jalankan. 2. Perencanaan secara tertulis belum disusun, apa' andappa niissang inna wassa cara massusung (karena belum diketahui bagaimana cara menyusun). 3. Dokumen Perencanaan BUMDes masih kacau, belum sempat diperbaiki. 4. Kemampuan dan pengetahuan kami terbatas untuk mengembangkan BUMDes ditambah dengan kekurangan SDM Desa. 5. Sementara ini, kami masih menggali potensi yang bisa garap. Kegiatan pencatatan masih nihil. 6. Tinggal bagaimana pemasarannya. 7. Saat ini unit usaha dihentikan dahulu hingga kantor BUMDes selesai dikerjakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar dari orang yang punya pengalaman mengelola usaha. Menjual barang-barang campuran sudah pernah kami lakukan, tapi warga protes karena merasa tersaingi dengan usaha BUMDes. 2. Kemampuan dan pengetahuan kami terbatas untuk mengembangkan BUMDes ditambah dengan kekurangan SDM Desa.
<p><i>Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene</i></p>	<p>Perlengkapan bekerja masih menggunakan fasilitas pribadi para pengurus. Pada umumnya BUMDes di Pamboang belum ada yang berkembang secara signifikan, karena dalam pengelolaannya masih memerlukan bimbingan. Usaha-usaha yang dibentuk oleh BUMDes di Kecamatan Pamboang khususnya sebagian besar belum tepat sasaran,</p>	<p>Usaha yang dijalankan kurang lebih seragam, seperti perdagangan umum, jasa penyewaan, dan peternakan. Yang kami ketahui adalah bahwa BUMDes kesulitan dalam mencari SDM yang bisa membantu mengembangkan usahanya. Hal itu dikarenakan bekerja di BUMDes merupakan pekerjaan sosial. BUMDes hingga saat ini bukanlah tempat yang</p>

	<p>beberapa potensi utamanya belum disentuh dan dikembangkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa BUMDes sampai saat ini belum berada pada posisi yang menguntungkan.</p> <p>Kami menyadari betul akan kesulitan penganggaran dan kemampuan SDM yang dialami oleh BUMDes di Kabupaten Majene. Namun kami juga belum mampu berbuat dikarenakan anggaran di alokasikan kepada kami itu sangat minim dalam hal pembinaan dan fasilitasi.</p> <p>Kami di DPMD jarang melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional BUMDes di desa-desa. Jadi, kami hanya menyimpulkan aktivitas mereka jalan jika mendapatkan penghasilan asli desa.</p> <p>Setiap tahun selalu diadakan pendidikan dan pelatihan bagaimana mengelola BUMDes. Namun kami akui kalau tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena diselenggarakan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini merupakan kegiatan aspirasi anggota dewan.</p> <p>Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, data yang berhasil kami himpun menunjukkan bahwa kinerja BUMDes di Kecamatan Pamboang kurang menunjukkan perkembangan yang cukup berarti ditimbang dari jumlah penyertaan modal yang diberikan ke BUMDes. Beberapa Desa masih disibukkan dengan membangun fasilitas saran dan prasarana untuk mendukung operasionalisasi BUMDes, karena pembangunannya rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun lamanya.</p> <p>Kami melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa</p>	<p>menarik untuk bekerja mendapatkan uang. Bagaimana mereka mau bekerja dengan baik, sedangkan penghasilan yang didapatkan dari bekerja di BUMDes tidak jelas.</p>
--	---	--

	<p>sekali setahun, karena keterbatasan anggaran. Jadi, data yang bisa kami himpun itu setahun sekali.</p> <p>Namun yang kami ketahui bahwa aktivitas BUMDes khususnya di Pamboang berjalan sangat lambat, meskipun telah pernah mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan. Ya itu tadi. Kalau diperhatikan selama ini, belum pernah pemerintah desa khususnya di Pamboang, mengadakan kegiatan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes. Kamipun di Pemerintah Daerah, belum pernah mengadakan itu. Namun, Nah, jikalau Pemerintah Desa mau berbesar hati untuk belajar bagaimana mengembangkan BUMDes-nya, kami yakin mereka bisa berkembang. Kami menilai, pemerintah desa belum bisa ikhlas menyertakan dananya untuk dikelola BUMDes. Kalau konsep kinerja mampu diserap oleh pemerintah desa, berarti semua dapat terukur. Namun melihat situasi dan kondisi desa yang minim SDM, kecil kemungkinan kinerja dapat berjalan dengan baik.</p>	
--	---	--

MATRIKS SWOT

IFAS EFAS	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	Menciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mendapatkan peluang.
THREATS (ANCAMAN)	Menciptakan strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

MATRIKS ANALISIS SWOT
SO – WO – ST – WT

IFAS EFAS	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	<p>Menggunakan Modal Penyertaan, Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung yang ada disiapkan oleh Pemerintah Desa, untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan SDM desa utamanya tamatan SMA dan Perguruan tinggi untuk menggarap potensi laut dan pertanian. 2. Mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM lokal desa. 3. Menggaji seorang Manajer professional dalam mengembangkan dan membina pengelolaan BUMDes. 4. Memanfaatkan potensi pasar skala kecamatan dan kabupaten. 	<p>Memanfaatkan SDM Lokal Desa yang ada, meningkatkan kapasitas pengelola dengan bekerja sambil belajar, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi pasar hasil laut dan pertanian.</p>
THREATS (ANCAMAN)	<p>Memaksimalkan penggunaan modal penyertaan, fasilitas, sarana dan prasarana yang ada, memberdayakan SDM Lokal</p>	<p>Memanfaatkan keterbatasan SDM Lokal Desa yang ada untuk terus-menerus diberikan</p>
	<p>Desa, dan tamatan SMA dan Alumni Perguruan Tinggi, untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengelola unit usaha simpan pinjam dan penyewaan molen; 6. Mempekerjakan SDM Lokal Desa bekerja pada unit-unit usaha BUMDes. 7. Menambah unit usaha BUMDes sesuai dengan potensi lokal masyarakat desa dengan tetap mengembangkan isu pemberhentian subsidi Dana Desa dari Pemerintah Pusat. 8. Meningkatkan intensitas pengelolaan unit usaha BUMDes dengan memanfaatkan Situasi dan Kondisi Politik dalam lingkungan desa. 	<p>pembinaan dengan jalan diberdayakan sesuai dengan kemampuannya.</p>



**ANALISIS SWOT : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENGELOLAAN BUMDES
DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE**

Tujuan Penelitian (Goal/Target) :

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

INTERNAL BUMDES	EKSTERNAL BUMDES
Kekuatan (Strength)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyertaan Modal, dari 7 (tujuh) BUMDes yang dijadikan lokus penelitian, 6 (enam) Desa yang sudah mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa yang bernilai rata-rata di atas Rp. 50 Juta. 2. Faktor SDM Pengelola, dari 7 (tujuh) BUMDes, 5 (lima) diantaranya rata-rata berkapasitas sarjana. 3. Faktor fasilitas, sarana dan prasarana, dari 7 (tujuh) BUMDes, semuanya sementara dalam proses pembangunan. 4. Pemberdayaan SDM Lokal Desa. 5. Alumni SMA dan Perguruan Tinggi yang bertambah setiap tahunnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan BUMDes. 2. Berpotensi mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, jika usaha menunjukkan perkembangan. 3. Potensi Perikanan Laut dan Pertanian cukup besar untuk digarap, namun masih dalam tahap penajakan. 4. Potensi pemberdayaan usaha dari warga masyarakat. 5. Potensi pasar komoditi hasil laut dan perikanan serta pertanian yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. 6. Potensi pemanfaatan pasar skala Kecamatan dan Kabupaten.
Kelemahan (Weakness)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM pada masing-masing BUMDes di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian. 2. Minim diprogramkan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian. 3. Minim kegiatan unit usaha yang dijalankan di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian. 4. Tidak adanya system penggajian bulanan dalam system keuangan yang dibangun oleh BUMDes di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian. 5. Dokumen Perencanaan belum disusun di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian. 6. Minimnya Program Pembinaan dan Fasilitasi pengembangan kapasitas SDM Pengelola BUMDes dari Pemerintah Daerah di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian. 7. Dominasi Penggunaan dan Pemanfaatan 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Simpan Pinjam dan Sewa Molen merupakan Unit Usaha yang sama dijalankan oleh 7 (tujuh) BUMDes lokus penelitian. 10. Unit Usaha yang dijalankan hanya berskala Lokal. 11. SDM lokal cenderung memilih bekerja keluar desa, karena kurang diberdayakan oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes. 12. Berkembangnya issue bahwa akan berhentinya subsidi Dana Desa dari Pemerintah Pusat. 13. Situasi dan Kondisi Politik dalam desa.

<p>Dana Desa mengarah kepada pembangunan fisik, seperti bangunan, drainase dan jalan setapak.</p> <p>8. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian.</p> <p>9. Minimnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes di 7 (tujuh) Desa Lokus Penelitian.</p> <p>10. Pemberdayaan SDM Lokal Desa umumnya dilakukan terhadap warga desa yang dekat dengan pengurus BUMDes atau Pejabat Pemerintah Desa.</p> <p>11. Kekhawatiran Pemerintah Desa memberikan anggaran yang besar untuk penyertaan modal ke BUMDes.</p>	
--	--

A. Bagaimana Strategi BUMDes.

1. Apa rencana BUMDes di desa anda ?

Apakah cita-cita yang ingin dicapai oleh BUMDes, diurai menjadi rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ?

- (1) Kami berencana membuat Gudang untuk tempat menampung Kemiri yang dikumpulkan oleh masyarakat desa. Karena di desa Betteng ini, pohon kemiri sangat banyak disini. Hasilnya pun berlimpah, namun pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini masih menggunakan cara-cara lama yang dilakukan secara turun temurun. Untuk sementara ini sebelum Gudang terbangun, kami juga berencana mengembangkan desa wisata yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa. Sementara ini unit usaha yang sementara berjalan adalah usaha simpan dan pinjam dan penyewaan Molen. *(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).*
- (2) Melihat karena disini ada sekolah SMP dan SD, kami berencana membuka unit usaha fotocopy dan coba beternak ayam petelur. Selain itu, sementara ini kami membangun gedung kantor BUMDes dan Gedung Olahraga dan sementara dalam tahap pembangunan. Pemerintah Desa fokus kepada pembangunan gedung, sehingga modal operasional usaha untuk BUMDes belum ada. *(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).*
- (3) Beberapa alat-alat telah kami beli. Sementara ini yang sudah jalan unit usaha TV Kabel. Di tahun 2018 telah diinvestasikan dana sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Berikutnya di tahun 2019 telah dialokasikan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes Marendeng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan dan pengelolaan Pabrik Es. Karena warga di Desa ini lebih didominasi oleh nelayan. Ada usaha pembuatan sarung sutera mandar dengan menggunakan alat Panette (alat penenun) yang saat ini dijadikan binaan oleh Pemerintah Daerah. Katanya direncanakan pengembangannya nanti untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Namun itu masih dalam tahap persiapan. Sudah ada perencanaan, namun belum diurai secara berjangka. (*Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019*).

- (4) Kami rencananya akan membuka unit usaha foto copy dan menjual alat tulis kantor. Berikutnya akan direncanakan membuat usaha ayam petelur dan jual beli air gallon. Itu sudah diusulkan kepada Kepala Desa. Hingga saat ini, BUMDes kami telah membuka unit usaha perdagangan dan masih jalan hingga saat ini, walaupun jalannya masih tersendat-sendat. Warga masyarakat sempat mengeluh karena merasa tersaingi dengan usaha perdagangan yang kami jalankan. Perencanaan secara tertulis belum disusun, apa' andappa niissang inna wassa carana massusung (karena belum diketahui bagaimana cara menyusun). (*Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019*).
 - (5) Kami rencana sebelumnya usaha semacam distributor barang kepada warga masyarakat. Berupa tabung gas yang dijual oleh BUMDes dengan harga distributor dan dijual eceran oleh masyarakat, namun proses pengurusan untuk menjadi pangkalan gas LPG masih sulit kami lakukan. Ada rencana ke depan untuk mengembangkan usaha foto copy di desa ini, mumpung ada warga masyarakat yang mengerti dan bisa mengutak-atik mesin foto copy. Perencanaan untuk usaha BUMDes masih sementara kami diskusikan dengan melihat apa yang menjadi potensi desa kami. (*Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019*).
 - (6) Kami telah menjalankan usaha Peternakan sapi, Jasa Penyewaan, dan Jasa Even Organizer. Berikutnya kami menargetkan usaha Jual Beli Semen dengan jumlah yang banyak. Sudah ada orang yang diserahkan tugas untuk menelusuri seluk beluk usaha ini. Jual beli Semen ini merupakan alternatif utama, dan yang kedua adalah Usaha TV Kabel. Distributor LPG sempat kami wacanakan karena sangat potensial, namun karena diperkirakan prosesnya panjang dan lama, akhirnya kami menundanya. (*Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019*).
 - (7) Konsep Rencana BUMDes Bannang Pute berdasarkan dua pilihan, yaitu apa yang penting, dan apa yang mendesak. Dalam program kerja kami, ada lima bidang usaha yang masuk dalam potensi kami, yaitu Pariwisata, Barang dan Jasa, Home Industri, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Namun untuk sementara ini hanya ada dua unit usaha yang aktif, yaitu Simpan Pinjam dan Penyewasaan Molen (mesin pengaduk semen). Lalu kami memiliki rencana untuk membangun Rest Area yang nantinya akan bermitra dengan masyarakat. (*Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019*).
 - (8) Dari 13 BUMDes di kecamatan Pamboang, hanya ada enam yang aktif hingga saat ini. Yakni BUMDes di Desa Bababulo, Desa Adolang Dhua, Desa Banua Adolang, Desa Bonde, Desa Bonde Utara, dan Desa Tinambung. Penyertaan modalnya di atas Rp. 50 Juta. Usaha yang dijalankan kurang lebih seragam, seperti perdagangan umum, jasa penyewaan, dan peternakan. (*Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019*).
2. *Bagaimana pengerahan Sumber Daya di BUMDesa ?
Seberapa besar sarana dan prasarana yang dikerahkan oleh BUMDesa dalam mendukung perencanaan ? Seberapa besar SDM yang bisa dimanfaatkan dalam*

mendukung rencana ? Apakah diuraikan dalam rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ?

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa Betteng masih sangat sedikit, itupun juga diperuntukkan untuk usaha simpan pinjam, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Pengelolaannya masih sangat sederhana dengan besar pinjaman maksimal satu juta rupiah yang dikelola oleh satu orang. Jumlah peminjamnya tidak lebih dari 15 orang. Sedangkan molen, hingga saat ini hanya disewa oleh pemerintah Desa dan masyarakat desa dan belum pernah disewa oleh masyarakat di luar desa. Molen inipun masih dikoordinir oleh pemerintah desa sendiri. ***(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).***
- (2) Pemerintah Desa Simbang merencanakan anggaran pembangunan Gedung Kantor BUMDes dan Gedung Olahraga melalui dua tahap penganggaran selama dua tahun dengan biaya kalau tidak salah kurang lebih 800 juta rupiah lebih. Insyaa Allah pada semester dua di tahun 2019 ini sudah mulai dipergunakan dan dimanfaatkan. Gedung Olahraga ini akan memiliki dua lapangan yaitu lapangan futsal dan lapangan Bulutangkis atau Badminton. Ini akan disewakan kepada masyarakat desa Simbang dan dari luar Desa Simbang. ***(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).***
- (3) Kami di sini sementara mempersiapkan unit usaha TV Kabel. Untuk sementara kami mempekerjakan empat orang tenaga untuk memasang dan membentangkan kabel-kabel untuk dipergunakan warga nantinya untuk berlangganan TV Kabel. Rencana berjangkanya sementara disusun oleh pengurus BUMDes, jadi dokumennya belum ada. ***(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).***
- (4) Dalam pengelolaan BUMDes, ada tiga orang yang dilibatkan untuk bekerja. Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Pelaksana Operasional BUMDes Al Baroqah di SK-kan oleh Pemerintah Desa Adolang Dhua sejak tahun 2016. Untuk penyusunan laporan keuangan menggunakan komputer dengan program Excel yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Untuk BUMDesa sendiri belum ada pengadaan. Dokumen Perencanaan BUMDes masih kacau, belum sempat diperbaiki. Tempo hari ada dari tenaga pendamping lokal desa yang memberikan kami file-file softcopy, dari situ kami pelajari. Sempat sekali kami dibimbing menyusun itu (dokumen perencanaan), tapi untuk selanjutnya kami lupa bagaimana kelanjutannya. ***(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).*** **Kekuatan dan Kelemahan**
- (5) Kurangnya SDM di desa ini, membuat kami kesulitan mencari orang untuk dipekerjakan di BUMDes. Padahal kalau dilihat di desa ini banyak anak-anak muda dan remaja yang bisa dilatih, tapi itu butuh proses dalam mengajak mereka, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami sudah meng-SK-kan sejumlah warga untuk menjalankan BUMDes ini, namun cara mengelolanya belum dipahami oleh mereka. Jadi memang kayaknya dibutuhkan semacam pelatihan atau mungkin lebih tepatnya dibimbing secara terus menerus hingga mahir. Memang ada semacam materi tentang BUMDes yang disampaikan dan disarankan kepada kami untuk dipelajari oleh pendamping desa, tapi kami tidak paham, mungkin karena kemampuan memahami kami masih sangat kurang, sehingga sampai saat ini kami malas untuk mempelajari. Jadi secara administratif, perencanaan BUMDes belum kami susun secara berjangka. ***(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).***

- (6) Hingga saat ini, kami mempergunakan warga masyarakat sendiri yang menangani usaha usaha seperti peternakan sapi. Karena sarana dan prasarana penunjang peternakan belum ada, kami membuat perjanjian kerjasama hitam di atas putih dengan warga untuk pemeliharaan hewan ternak. Beberapa rencana usaha lain telah kami susun dalam bentuk yang sederhana. Unit Usaha Even Organizer sementara dibentuk, dan pengembangannya nanti akan menyelenggarakan tournament sepak bola, dan beberapa kegiatan-kegiatan besar lainnya. Secara administratif, dokumen perencanaan BUMDes belum tersusun dengan baik dan secara berjangka. **(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019). Kekuatan dan Kelemahan.**
- (7) Pada Musrembang tahun 2019 ini dimana akan dibahas Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk tahun 2020 mendatang, kami akan mengajukan lagi pinjaman modal kepada Pemerintah Desa Bababulo sebesar 50 Juta Rupiah, jadi ada penambahan modal dari yang sudah ada sebesar 25 Juta Rupiah, hingga total modal yang kami miliki nantinya akan sebesar 75 Juta rupiah sebagai modal operasional. Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diadakan dan dibangun untuk menunjang jalannya operasional BUMDes dan membutuhkan anggaran besar seperti Molen, Rest Area dan lain-lain, diusulkan pengadaan dan pembangunannya kepada Pemerintah Desa dan menjadi aset Desa yang kemudian dialihkan pengelolaan asetnya kepada BUMDes untuk mendapatkan Penghasilan Asli Desa (PADes). Setiap unit usaha nantinya akan dikelola oleh masyarakat sendiri, namun tetap dikoordinir oleh kami di BUMDes. Untuk pengelolaan unit Simpan Pinjam, saat ini masih dikelola oleh dua orang, yaitu saya sendiri dan bendahara. Karena kami masih kekurangan tenaga. Lalu, molen dikoordinir oleh aparat pemerintah desa Bababulo. **(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019). Kekuatan dan Kelemahan**
- (8) Dominan mereka menggunakan tenaga-tenaga lokal desa. Memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Desa seperti kendaraan dan gedung. Perlengkapan bekerja masih menggunakan fasilitas pribadi para pengurus. Karena yang direkrut sebagai pengurus BUMDes rata-rata memiliki Laptop. **(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019). Kekuatan dan Kelemahan.**
3. **Bagaimana cara BUMDes untuk meraih posisi yang menguntungkan ?**
Apakah target strategi yang merupakan posisi aman pertama yang harus dilakukan BUMDes, sudah dilakukan ?
- (1) Terus terang kami belum berfikir sampai ke tahap itu, yang jelas proses perencanaan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana desa wisata yang menjadi fokus kami. **(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019). Kekuatan dan Kelemahan.**
- (2) Berdasarkan kesepakatan kami di BUMDes dengan Pemerintah Desa Simbang, karena letak geografis Desa Simbang berada di daerah perbukitan wilayah Kecamatan Pamboang, strateginya adalah dengan membangun sebuah bangunan yang belum ada di wilayah kecamatan yaitu Lapangan Futsal. Dengan olahraga dapat menjalin hubungan silaturahmi antara masyarakat desa dan diluar desa. Jikalau Gedung Futsal sudah ada, maka akan menjadi alternatif olahraga selain sepakbola dan badminton

yang akan berkembang di wilayah Kecamatan Pamboang, maka pendapatan desa akan mengalir dengan sendirinya. (*Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019*). **Kekuatan**

- (3) Sumber modal BUMDes diambil dari Dana Desa yang merupakan dana *sharing* (pembagian) dari pemerintah pusat yang memang diperuntukkan untuk desa-desa di Indonesia. Dalam pelaksanaan pekerjaan di BUMDes, kami masih memakai potongan kertas sebagai bukti pembayaran iuran bulanan berlangganan TV Kabel. Untuk memudahkan perhitungan dan penginputan, kami sudah menggunakan komputer. Struktur kepengurusan di BUMDes terdiri dari Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional. Pada pelaksana operasional terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Masing-masing memiliki Tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Karena kepengurusan ini tergolong masih baru, jaringan kami masih sebatas warga masyarakat di desa. belum ada jalinan kerjasama yang kami bangun dengan pihak di luar dari desa kami. Target kami adalah berjalannya Unit Usaha TV Kabel. (*Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019*). **Kekuatan dan Kelemahan.**
- (4) Sumber dana BUMDes Al Baroqah diambil dari Dana Desa. Dana desa ini bersumber dari pembagian anggaran Pemerintah Pusat yang tujuan untuk desa. Karena di desa kami, belum ada warga yang membuka usaha fotocopy. Apalagi, di desa kami ada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan rencananya, kami akan membangun kerjasama pengadaan ATK untuk kedua sekolah tersebut. Kami mengusahakan agar Unit Usaha Fotocopy bisa berjalan nantinya sebagai target utama. (*Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019*). **Kekuatan**
- (5) Saat ini BUMDesa di sini belum bisa memberikan keuntungan yang maksimal, apalagi BUMDesa ini masih terbilang baru...dalam arti kami masih tahap merab-raba tentang apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Terus terang kami tidak mau gegabah, hanya karena melihat desa lain sudah mulai mengembangkan BUMDes-nya dengan berbagai macam unit usaha. Bisa jadi ini yang dikatakan oleh teman-teman dari desa lain, bahwa ada semacam kekhawatiran dalam menyertakan modal usaha ke BUMDes dalam jumlah besar. Kami tidak mau disoroti oleh Masyarakat. Namun, yang menjadi target kami sementara ini adalah berjalannya unit usaha yang bisa menopang keuangan desa yaitu stasiun SPBU mini atau pertamini. Karena bahan bakar bensin dipergunakan setiap hari oleh warga desa kami (*Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019*). **Kelemahan.**
- (6) Kami berusaha membuat usaha yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Namun semua masih dalam tahap uji coba, sambil terus mempelajari segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Unit usaha distributor semen, TV Kabel, dan distributor tabung gas LPG merupakan rencana besar kami, jika salah satunya sudah terwujud, kami merasa sudah berada pada posisi aman pertama. (*Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019*). **Kekuatan.**
- (7) Hingga saat ini, meski kekurangan personil, kami masih aktif melakukan komunikasi ke Pemerintah Desa terkait kekurangan-kekurangan yang ada di internal BUMDes. Target awal kami selain perbaikan internal kelembagaan, Unit Simpan Pinjam dan Molen akan diperbaiki pengelolaannya hingga memperoleh pendapatan yang lebih baik. Hingga saat ini pendapatan dari simpan pinjam sudah mencapai angka 3 Juta Rupiah dan Molen sudah 1 jutaan. **Kekuatan dan Kelemahan.**

(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).

- (8) Pada umumnya BUMDes di Pamboang belum ada yang berkembang secara signifikan, karena dalam pengelolaannya **masih memerlukan bimbingan**. Usaha-usaha yang dibentuk oleh BUMDes di Kecamatan Pamboang khususnya sebagian besar belum tepat sasaran, beberapa potensi utamanya belum disentuh dan dikembangkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa BUMDes sampai saat ini belum berada pada posisi yang menguntungkan. **(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019). Kelamahan.**

B. Bagaimana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMDes.

1. Bagaimana Kompetensi Pengelola ?

- (1) Kami masih butuh pembinaan dengan cara didampingi pak. Kemampuan dan pengetahuan kami masih terbatas. **(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).**
- (2) Kemampuan dan pengetahuan kami terbatas pak untuk menjalankan BUMDes ini, apalagi saya bukan sarjana..hanya lulusan SMA. Sekretaris saya orang yang sementara kuliah, begitu juga dengan bendahara. **(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).**
- (3) Ketua BUMDes itu punya toko Handphone di pinggir jalan besar. Selain itu dia juga berpendidikan sarjana strata satu. Sudah pernah kami ikutkan dalam pelatihan BUMDes di Kantor DPMD Kabupaten Majene. Jadi setidaknya dia punya pengalaman dalam membangun usaha. Begitu juga dengan sekretaris dan bendaharanya, masing-masing tingkat pendidikannya sarjana S1. **(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).**
- (4) Itulah Pak yang menjadi masalah kami di sini. Kemampuan dan pengetahuan kami terbatas untuk mengembangkan BUMDes ditambah dengan kekurangan SDM Desa. **(Haidir, Ketua BUMDes Al Baroqah, 28 Januari 2019).**
- (5) Keterbatasan SDM dengan kemampuan pengelolaan yang baik cukup menyulitkan kami dalam menambah personil BUMDes. Kemampuan pengelola saat ini masih sangat memerlukan pembimbingan. **(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).**
- (6) Kemampuan mengelola kami memang masih sangat kurang, masih butuh bimbingan dan pelatihan yang lebih. SDM di desa ini banyak, tapi apakah mereka mau ikut terjun membantu mengembangkan BUMDes ini tanpa ada gaji perbulannya..?. **(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).**
- (7) Semuanya kembali kepada pemerintah desa yang mendirikan BUMDes ini. Kami selaku pengelola BUMDes yang baru terpilih, yang baru sekali mengikuti pelatihan. Masih bingung bagaimana harus memulai. Pikiran kami masih terfokus ke anggaran operasional yang terbatas. Apalagi kalau kita ingin memberdayakan masyarakat yang jelas butuh biaya untuk itu. **(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).**
- (8) Kami menyadari betul akan kesulitan penganggaran dan kemampuan SDM yang dialami oleh BUMDes di Kabupaten Majene. Namun kami juga belum mampu berbuat dikarenakan anggaran di alokasikan kepada kami itu sangat minim dalam hal pembinaan dan fasilitasi. **(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi**

Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).

2. *Bagaimana aktivitas sepanjang tahun ?*

- (1) Kegiatan rutin yang kami kerja itu hanya pencatatan dan penagihan pada masyarakat, itupun setelah penagihan. *(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).*
- (2) Apa na nua pak, apa' belum ada yang bisa kami kerjakan. Biaya operasional belum ada yang diberikan kepada kami. *(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).*
- (3) Kami masih melengkapi fasilitas pekerjaan BUMDes. Untuk sementara, penyertaan modal belum ada. *(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).*
- (4) Sementara ini, kami masih menggali potensi yang bisa garap. Kegiatan pencatatan masih nihil. *(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).*
- (5) Untuk sementara ini, kami masih melayani kebutuhan bensin nelayan yang akan ke laut mencari ikan. Jadi nelayan kami, tidak perlu sudah-susah mencari bensin ke sana ke mari, BUMDes yang menyediakan. *(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).*
- (6) Kegiatan BUMDes selama ini mempersiapkan kebutuhan unit usaha, seperti usaha penggemukan sapi yang membutuhkan garam dan obat-obatan dalam perawatannya setiap bulan sampai sapi tersebut laku terjual jelang hari raya idul adha nanti. Setiap biaya yang dikeluarkan tercatat sebagai biaya operasional penggemukan sapi. Begitu juga dengan penyewaan Molen, semua biaya yang dikeluarkan dicatat sebagai biaya operasional yang diambil dari persediaan kas. Molen ini bisa dibilang, jarang istirahat, karena pekerjaan pembangunan aktif dilaksanakan. *(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).*
- (7) Karena kami masih dalam tahap penyesuaian, sehingga usaha yang ada yang kami jalankan. Aktivitas usaha simpan pinjam masyarakat rutin dijalankan setiap bulan ketika penagihan. *(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).*
- (8) Kami di DPMD jarang melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional BUMDes di desa-desa. Jadi, kami hanya menyimpulkan aktivitas mereka jalan jika mendapatkan penghasilan asli desa. *(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).*

3. *Bagaimana ketersediaan SDM ?*

- (1) Kami masih sangat kekurangan orang untuk menjalankan usaha. *(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).*
- (2) Kalau fasilitas BUMDes sudah terbangun, seperti kantor dan GOR, orang yang akan mengelola sudah siap nantinya, tinggal diberi pembinaan. *(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).*
- (3) Orang yang mengurus usaha TV Kabel kami adalah orang-orang yang berpengalaman. Untuk unit usaha lainnya masih kita jajaki potensinya begitu juga dengan potensi orang-orangnya. *(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).*

- (4) Kami sementara menyiapkan orang-orang yang akan mengelola unit-unit usaha. Beberapa barang sudah kami produksi melalui masyarakat. Tinggal bagaimana pemasarannya. *(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).*
- (5) Berbicara mengenai ketersediaan SDM yang akan mengelola jalannya operasional BUMDes, terus terang itulah kesulitan kami. Pemerintah Desa kurang melakukan pembinaan kepada masyarakat. *(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).*
- (6) Berbicara SDM di Desa Tinambung cukup banyak, namun perlu dilakukan pembinaan. Ketersediaan SDM merupakan wewenang Pemerintah Desa. *(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).*
- (7) SDM kami di Desa Bababulo cukup banyak. Cuma kondisi perpolitikan di Desa ini suhunya cukup tinggi, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan proses penjuragan terhadap SDM yang berkualitas. *(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).*
- (8) Setiap tahun selalu diadakan pendidikan dan pelatihan bagaimana mengelola BUMDes. Namun kami akui kalau tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena diselenggarakan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini merupakan kegiatan aspirasi anggota dewan. *(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).*

4. Bagaimana peningkatan kinerja ?

- (1) *(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).*
- (2) *(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).*
- (3) *(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).*
- (4) *(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).*
- (5) *(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).*
- (6) *(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).*
- (7) *(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).*
- (8) Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, data yang berhasil kami himpun menunjukkan bahwa kinerja BUMDes di Kecamatan Pamboang kurang menunjukkan perkembangan yang cukup berarti ditimbang dari jumlah penyertaan modal yang diberikan ke BUMDes. Beberapa Desa masih disibukkan dengan membangun fasilitas saran dan prasarana untuk mendukung operasionalisasi BUMDes, karena pembangunannya rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun lamanya. *(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).*

C. Bagaimana Pengelolaan Organisasi BUMDesa.

1. Bagaimana rangkaian kegiatan di BUMDes ?

Apa yang dihasilkan dari rangkaian pekerjaan yang telah dilakukan oleh BUMDesa ?

- (1) Karena masih dua unit usaha simpan pinjam dan penyewaan molen, maka ketika ada orang yang meminjam uang, kami juga melihat orangnya, maksudnya orang yang bisa dipercaya. Umumnya masih kerabat dekat dan bukan orang lain bagi kami. *(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).*

- (2) Kegiatan operasional di BUMDes kami terus terang belum ada, karena masih dalam perencanaan dan penyiapan fasilitas untuk dikelola nantinya. *(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).*
- (3) Pemerintah desa menyiapkan sarana dan prasarana, lalu BUMDesa yang menjalankan Usahanya, seperti usaha TV Kabel yang kami maksud. Tiga orang pelaksana operasional BUMDes telah mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes di kantor PMD Kabupaten Majene di tahun 2018. Kegiatan rutin pelaksana operasional selama ini membukukan keluar masuknya uang di kas BUMDes. Usaha TV Kabel ini masih terus kami kembangkan, hingga saat ini masih dalam tahap sosialisasi ke rumah-rumah warga sekaligus pemasangan jaringan kabel televisi. Rencananya kami lakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan anggaran kas BUMDes. *(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).*
- (4) Belum banyak yang bisa kami lakukan dalam pengembangan BUMDes ini. *(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).*
- (5) Belajar dari orang yang punya pengalaman mengelola usaha. Menjual barang-barang campuran sudah pernah kami lakukan, tapi warga protes karena merasa tersaingi dengan usaha BUMDes. Jadi setahun terakhir ini, pemerintah desa membangunkan kami gedung kantor yang letaknya berhadapan dengan sekolah menengah pertama. Nanti akan dibuat pappoto copiang (usaha fotocopy) dan jualan ATK (Alat Tulis Kantor). *(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).*
- (6) Beberapa Pengurus BUMDes telah mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Majene. Sejak kepengurusan baru terbentuk, selalu diadakan pertemuan dan diskusi diantara sesama pengurus terkait perkembangan BUMDes, baik melalui pertemuan khusus, maupun lewat media WA (WhatsApp). Namun untuk aktivitas sehari-hari, belum ada perencanaan. Karena kondisi keuangan yang belum stabil, belum dapat menawarkan pendapatan bulanan kepada pengurus dan pengelola unit usaha. Kami memiliki Unit usaha Even Organizer dan Tim Penggerak PKK Desa, yang cukup antusias melaksanakan kegiatan selama setahun terakhir. Warga masyarakat yang terlibat mulai memahami peranan BUMDes di desa Tinambung. Kami sudah merencanakan untuk mengadakan pelatihan khusus tentang penyusunan rencana usaha buat warga masyarakat yang disponsori oleh Pemerintah Desa dan diselenggarakan oleh BUMDes sebagai pihak yang akan memfasilitasi tindak lanjut dari rencana usaha dari warga masyarakat. Walaupun hingga saat ini, BUMDes belum mampu memberikan PADes (Pendapatan Asli Desa) buat desa, namun setidaknya sudah ada usaha yang kami lakukan dan sementara berjalan, meskipun belum maksimal. *(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).*
- (7) Hingga saat ini, aktivitas simpan pinjam nasabah di BUMDes masih menggunakan aplikasi sederhana dengan jumlah nasabah tersisa 15 (lima belas) orang dari 35 orang peminjam. Rata-rata peminjaman pada kisaran 500 Ribu Rupiah per orang. Prosesnya peminjamannya sederhana, yaitu peminjam datang ke kami mengajukan permohonan pinjaman lalu diberikan sesuai apa yang mereka ajukan yang tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Penyewaan molen juga sederhana, penyewa datang ke pengelola yaitu aparat pemerintah desa dan langsung meminjam barang tersebut tanpa ada perjanjian

tertulis. (Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).

- (8) Kami melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa sekali setahun, karena keterbatasan anggaran. Jadi, data yang bisa kami himpun itu setahun sekali. Namun yang kami ketahui bahwa aktivitas BUMDes khususnya di Pamboang berjalan sangat lambat, meskipun telah pernah mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan. Ya itu tadi. Bagaimana mereka mau bekerja dengan baik, sedangkan penghasilan yang didapatkan dari bekerja di BUMDes tidak jelas. Kalau diperhatikan selama ini, belum pernah pemerintah desa khususnya di Pamboang, mengadakan kegiatan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes. Kamipun di Pemerintah Daerah, belum pernah mengadakan itu. Namun, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa yang diwakili oleh Balai Latihan Masyarakat perwakilan Makassar, sudah sering melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengelolaan BUMDes. Bahkan setiap tahun kurang lebih sejak 3 tahun terakhir. Yang kami ketahui adalah bahwa BUMDes kesulitan dalam mencari SDM yang bisa membantu mengembangkan usahanya. Hal itu dikarenakan bekerja di BUMDes merupakan pekerjaan sosial. BUMDes hingga saat ini bukanlah tempat yang menarik untuk bekerja mendapatkan uang. Nah, jikalau Pemerintah Desa mau berbesar hati untuk belajar bagaimana mengembangkan BUMDes-nya, kami yakin mereka bisa berkembang. Kami menilai, pemerintah desa belum bisa ikhlas menyertakan dananya untuk dikelola BUMDes. Kalau konsep kinerja mampu diserap oleh pemerintah desa, berarti semua dapat terukur. Namun melihat situasi dan kondisi desa yang minim SDM, kecim kemungkinan kinerja dapat berjalan dengan baik. (Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).

2. *Bagaimana pemanfaatan sumber daya di BUMDesa.*

Apakah aktivitas pengelolaan di BUMDes menggunakan potensi desa ? dan bagaimana cara/proses menggunakan potensi itu ? Apakah ada prosedur penggunaan sumber daya yang ada ?

- (1) Selama ini, BUMDes berjalan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan kami. Belum ada cara-cara khusus yang dapat kami lakukan. Kami juga sebenarnya masih bingung bagaimana memanfaatkan potensi desa yang ada. Hingga saat ini, pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan BUMDes sangat jarang dilakukan di desa. Kalau diperhatikan, banyak-banyak perencanaan terbentur pada persoalan anggaran. Apalagi, kami di BUMDes tidak mendapatkan gaji hanya pembagian sisa hasil usaha. Itupun nanti pada akhir tahun berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. (Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).
- (2) Belum ada pak. Selama ini juga kami terpilih sebagai pengurus, itupun berdasarkan penunjukan, bukan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan BUMDes kalau mau dijalankan. (Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).
- (3) Secara umum, aktivitas pengelolaan di BUMDes kami masih menggunakan metode kekerabatan atau kekeluargaan. Pemanfaatan potensi desa masih berdasarkan kebutuhan masyarakat secara umum yaitu uang. Adapun Molen yang merupakan aset desa dimanfaatkan dan dikelola oleh kami, itupun masih menggunakan personil dari

pemerintah desa sebagai koordinatornya. (Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).

- (4) Kami menggunakan warga masyarakat yang punya kemampuan dibidang teknis TV Kabel seperti memasang bentangan kabel yang tersambung ke rumah-rumah warga. Kami memilih orang yang dianggap mampu mengelola usaha, tapi tetap melalui musyawarah yang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan para kepala dusun. Pelaksana operasional terpilih yang namanya telah dicantumkan di SK penetapan pengurus merupakan para sarjana strata satu. Karena unit usaha ini masih baru, belum ada cara-cara khusus yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja. Namun akan kami usahakan pada saatnya nanti. (Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019)
- (5) Waktu itu di tahun 2016, kami menganggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk BUMDes, namun tidak habis terpakai, karena sebagian dana dipakai untuk membangun kantor operasional BUMDes Al Baroqah yang saat ini pembangunannya sudah mencapai sekitar 50%. In Sya Allah, tahun ini 2019 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk mengembangkan usaha BUMDes. *Sicco dzuai barang nialli, apa' sangga' ni cowai di'ee* (masih sedikit barang yang kami beli, karena masih dalam tahap percobaan). Berusaha *mi tau* (pengurus BUMDes) *cappu dibaluang* (menjual habis barang) dengan cara (*niantarrangi ni boyanna se'iya*) mengantar pesanan ke rumah-rumah warga yang rumahnya punya tempat penjualan. Dicoba mengajak beberapa warga untuk ikut terlibat dalam menjual barang campurannya BUMDes, tapi kayaknya belum maksimal. Karena dikasi' sama (jalan beriringan) dengan sosialisasi. (Haidir, Ketua BUMDes Al Baroqah, 28 Januari 2019).
- (6) Belajar dari orang yang punya pengalaman mengelola usaha. Yang kami lakukan selama ini membeli ikan hasil tangkapan nelayan atau menukar dengan bahan bakar bensin. Kami berusaha mencari dan melihat potensi warga yang bisa diajak kerjasama membuka unit usaha. Ada beberapa remaja yang sudah tamat dari sekolah menengah atas, yang kami coba dekati. Masih dalam proses perekrutan kalau bisa dibilang begitu. Karena anak-anak SMA sekarang, pada umumnya sudah mampu mengoperasikan komputer dan internet. Yah, desa ini kan (*andangi karao wega*) tidak jauh dari kota kecamatan, sehingga hal-hal yang berbaur modern sudah mulai terbiasa di desa ini. Komputer dan Internet pada anak-anak remaja seusia SMA sudah bukan hal yang luar biasa bagi mereka. Oleh karena itu, direncanakan akan melakukan pemetaan potensi desa. (Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).
- (7) Sudah ada wacana membuat rencana kinerja, namun masih perlu meminta pertimbangan dari pengurus dan warga, agar perencanaan kinerja ini bisa berjalan lebih baik. Beberapa kebijakan yang berproses dalam pemberdayaan masyarakat, rencananya akan diimplementasikan setelah proposal unit usaha telah disosialisasikan dan diajarkan kepada warga masyarakat. Kami belum menyusun kegiatan rutin bagi pengurus dan bagi pengelola unit usaha lainnya. Hasil terbaik yang telah kami lakukan selama ini adalah telah berhasil membentuk dan mendirikan BUMDes, menciptakan peluang usaha peternakan sapi yang dikelola oleh masyarakat, telah berhasil membeli mesin pengaduk semen, dan telah berhasil membentuk event organizer dengan kegiatan pertama yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan

tumamen sepak bola antar klub. Dengan besaran nilai penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar Rp. 50.000.000,-, kami telah menciptakan tiga unit usaha yang dijalankan oleh warga masyarakat. *(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).*

(8) Dari hasil monitoring yang kami laksanakan di tahun 2018, terlihat sejumlah aktivitas BUMDes di kantor Desa memberikan penjelasan kepada warga masyarakat untuk bisa terlibat dalam pengelolaan BUMDes. *(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).*

3. *Bagaimana pengendalian sumberdaya untuk mencapai tujuan ?*

Apakah ada aktivitas pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi berdasarkan rencana yang sudah tersusun dan disepakati sebelumnya ? Jikalau ada, apakah aktivitas pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi berdasarkan rencana yang sudah tersusun dan disepakati sebelumnya, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan ? Apakah aktivitas tersebut, dapat berfungsi secara maksimal ?

(1) Biasa ji ada Pak. Kami selalu ji perhatikan sama kepala Desa. Bahkan terkadang kami sering mendapat perintah dari Kepala Desa untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan BUMDes. Proses simpan pinjam berjalan dengan cara sederhana. Masyarakat datang mengajukan pinjaman, karena orangnya sudah dikenal dan bisa dipercaya, maka kami di BUMDes meminjamkan. Belum ada yang seperti Bapak bilang kajian kelayakan pemberian pinjaman. Karena berdasarkan kekeluargaan. *(Syarifuddin, Ketua BUMDes Samaturu Desa Betteng, 21 Januari 2019).*

(2) Yah...karena belum ada modal operasional, maka kami belum bisa menjalankan usaha. Belum ada kesepakatan yang dihasilkan tentang bagaimana pengelolaan Gedung Olah Raga (GOR) itu nantinya. Kepala Desa juga belum menentukan orang-orangnya siapa yang akan mengurus GOR itu nantinya. *(Irwansyah, Ketua BUMDes Tuo Marendeng Desa Simbang, 21 Januari 2019).*

(3) Terus terang, kami masih tahap mempelajari segala kemungkinan yang akan datang, namun sudah didiskusikan bersama kepala desa dan pengawas mengenai pengendalian kegiatan unit usaha. Kami berusaha berbuat sebisa mungkin mengontrol penggemukan sapi, penyewaan molen dan Even Organizer. *(Burhanuddin, Sekretaris BUMDesa Dalle' Passiolaolangang Desa Tinambung, 21 Januari 2019).*

(4) Usaha pengendalian kami terhadap BUMDes masih tergolong sederhana, karena usaha belum banyak, masih satu unit seperti penyediaan bahan bakar bensin untuk nelayan. *(Muhammad Yusuf, Kepala Desa Pesuloang, 04 Februari 2019).*

(5) Saat ini unit usaha dihentikan dahulu hingga kantor BUMDes selesai dikerjakan. *(Haidir, Ketua BUMDesa Al Baroqah, 28 Januari 2019).*

(6) Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam di BUMDes kami cenderung sangat sederhana pengelolaannya, karena masih menggunakan hubungan kekerabatan. Karena tidak sembarang orang yang kami berikan pinjaman. Standard peminjaman belum menggunakan metode yang secara umum dilakukan seperti layaknya lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Namun begitu, unit simpan pinjam ini masih berjalan sampai sekarang. Begitu juga dengan mesin Molen. *(Darmansyah, Ketua BUMDes Bannang Pute Desa Bababulo, 1 Mei 2019).*

(7) Ada, tapi tidak selalu, itupun sifatnya tidak resmi. Tidak melalui rapat-rapat. *(Ilham, Kepala Desa Bonde Utara, 21 Januari 2019).*

- (8) Berdasarkan permendes, pengelolaan Pemerintah Desa dan BUMDes itu terpisah secara struktural. Tindakan yang dilakukan oleh pimpinan BUMDes dalam melaksanakan kegiatan unit usahanya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa BUMDes di Kecamatan Pamboang memperlihatkan keseriusannya dalam membangun organisasinya. Namun untuk penyusunan rencana kinerja, hingga saat ini belum ada laporan kalau ada BUMDes yang menerapkan. Paling tidak untuk saat ini, kami cukup puas melihat BUMDes mulai bangkit merekonstruksi kembali kepengurusannya. *(Arfan Aras, Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, 22 Januari 2019).*

